



PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH



2025

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025** ini dapat kami susun dan sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh tepat pada waktunya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini disampaikan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dapat kami sampaikan bahwa tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini adalah melaksanakan salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah dalam bentuk penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh. Adapun substansi yang dilaporkan menyangkut dasar hukum, kondisi geografis daerah, gambaran umum demografis, kondisi ekonomi, potensi unggulan daerah, pertumbuhan ekonomi/PDRB, kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan tugas pembantuan selama tahun anggaran 2025. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, angka yang disajikan adalah angka sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan selama tahun 2025 yang tergambar dalam laporan ini masih belum mendekati kesempurnaan. Untuk itu, rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban ini nantinya sangat kami harapkan.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh pada masa yang akan datang.

Payakumbuh, Maret 2026

WALI KOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Secara *de jure* Kotamadya Payakumbuh telah ada dan terbentuk pada tahun 1956 bersamaan dengan 4 (empat) kota lainnya di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yaitu Kotamadya Pekan Baru, Sawah Lunto, Padang Panjang dan Solok melalui Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Namun, peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh sebagai daerah Kotamadya baru dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Amir Machmud yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh. Keterlambatan tersebut disebabkan karena adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 yang menyatakan bahwa daerah-daerah yang dibentuk sebagai kota kecil, termasuk Payakumbuh, harus menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri tentang batas daerah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan disusul kemudian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 membawa angin segar terhadap upaya percepatan perealisasi Kotamadya Payakumbuh. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dipilih untuk Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I Sumatera Barat adalah sebanyak 14 orang. Sementara Daerah Tingkat I Sumatera Barat saat itu hanya memiliki 8 kabupaten dan 4 kotamadya. Hal ini menjadi peluang bagi Payakumbuh dan Solok untuk segera diresmikan sebelum Pemilu Tahun 1971.

Pada tahun 1970 terbentuklah Panitia Realisasi Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh yang diketuai oleh H. C. Israr berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 95/GSB/70 Tanggal 8 Juli 1970 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 16/Blk 70 Tanggal 1 Agustus 1970. Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh bertugas menentukan batas Kota, menyusun profil *nagari* yang akan bergabung ke Kota dan menginventarisir bangunan untuk sarana pemerintahan dan rumah Walikota termasuk masalah keuangan. Segera setelah Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh menyelesaikan tugas-tugasnya, dibentuklah Panitia Peresmian Kotamadya Payakumbuh. Sesuai dengan radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor SDP.9/6/181, peresmian Kotamadya Payakumbuh dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

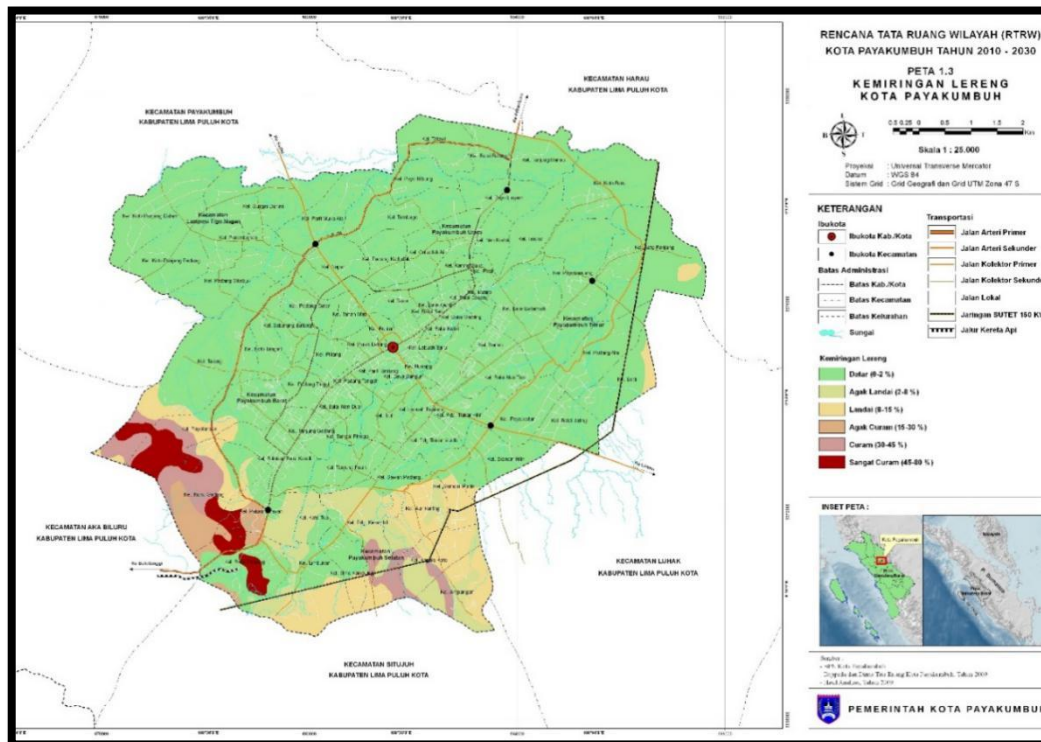
Pada tahun 2024 lahir Undang-Undang Nomor 56 tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Undang-undang ini mengatur tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Data Geografis Wilayah

1) Aspek Geografis

Secara geografis, Kota Payakumbuh terletak pada 00°10' sampai dengan 00°17' LS dan 100°35' sampai dengan 100°45' BT pada ketinggian 514 m dari permukaan laut. Kota Payakumbuh merupakan kota kecil dengan luas wilayah $\pm 80,43 \text{ Km}^2$ atau $\pm 0,19\%$ dari luas Provinsi Sumatera Barat dan berjarak ± 120 km dari Kota Padang sebagai pusat ibukota Provinsi Sumatera Barat. Didominasi oleh dataran dengan kemiringan $<2,00\%$ seluas 6.601,7 Ha atau 82,08% dari total luas Kota Payakumbuh, selebihnya merupakan dataran dengan kemiringan $>2,00\%$ seluas 1.441,3 Ha atau 17,92% dari luas wilayah Kota Payakumbuh yang berlokasi di wilayah selatan dan barat daya Kota Payakumbuh.

Gambar 1.1
Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

Tabel 1.1
Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh

No	Kemiringan Lahan	Lereng (%)	Kelas	(Luas)	
				Ha	%
1	Datar	0-2	A	6.601,7	82,08
2	Agak Landai	2-8	B	304,0	3,78
3	Landai	8-15	C	588,8	7,32
4	Agak Curam	15-30	D	112,6	1,40
5	Curam	30-45	E	298,4	3,71
6	Sangat Curam	45-60	F	137,5	1,71
Luas				8.043,0	100,00

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

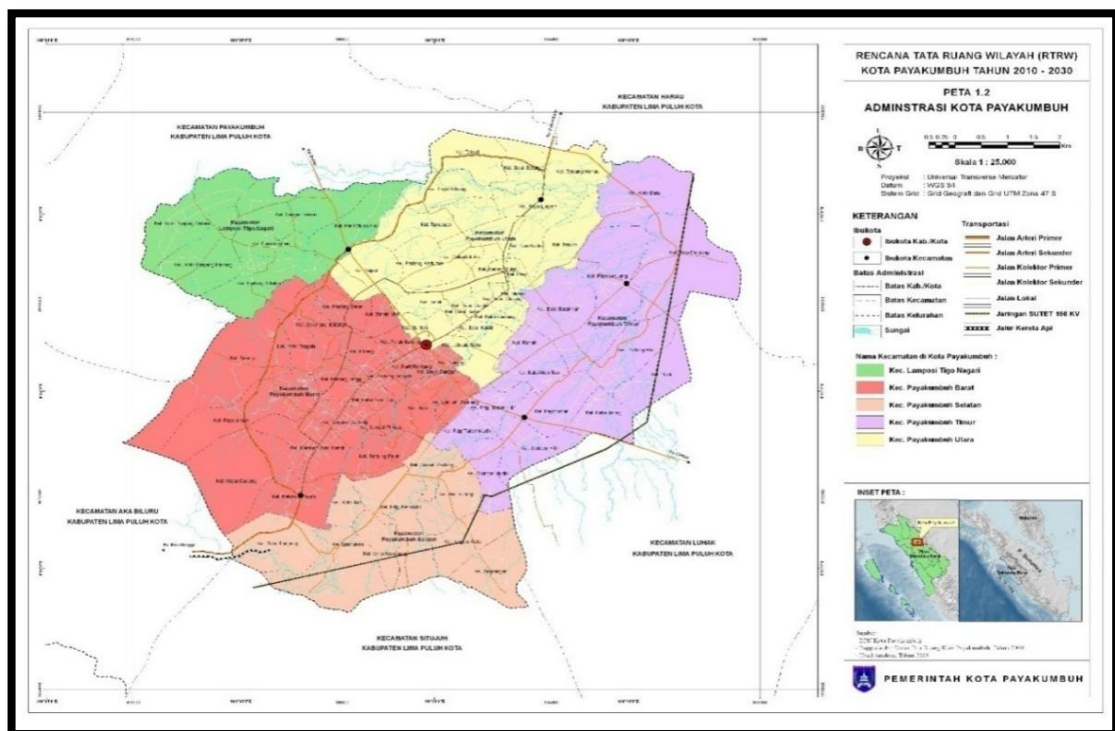
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, maka terbentuklah Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sehingga Kota Payakumbuh memiliki 5 (lima) kecamatan yang sebelumnya memiliki 3 (tiga) kecamatan. Kelima Kecamatan di Kota Payakumbuh tersebut adalah Kecamatan Payakumbuh

Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Iamposi Tigo Nagori.

Selanjutnya Secara administratif Kota Payakumbuh berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh
(Kabupaten Lima Puluh Kota)
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah
(Kabupaten Lima Puluh Kota)
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru
(Kabupaten Lima Puluh Kota)
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau
(Kabupaten Lima Puluh Kota)

Gambar 1.2
Batas Administrasi Kota Payakumbuh



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

Tabel 1.2
Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah		
				Kelurahan	RW	RT
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	19,07	17	58	168
2	Payakumbuh Utara	Tigo Koto Diate	14,53	9	35	122
3	Payakumbuh Timur	Tiakar	22,73	9	33	91
4	Payakumbuh Selatan	Sawahpadang Aua Kuniang	14,68	6	16	50
5	Lamposi Tigo Nagori	Sungai Durian	9,42	6	14	51
Total			80,43	47	156	482

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2025

Kota Payakumbuh dialiri oleh 7 (tujuh) sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku, kegiatan pertanian dan objek wisata. Sungai yang mengalir di Kota Payakumbuh tersebut diantaranya:

1. Sungai Batang Agam

Sungai Batang Agam mengalir melalui Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara sepanjang 15,60 km dan lebar 25 meter. Sungai ini juga dijadikan sumber air baku oleh PDAM semenjak tahun 2019. Terhitung tahun 2020, sungai batang agam juga dijadikan sebagai salah satu objek wisata oleh Pemerintah Kota dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung di sepanjang sungai batang agam tersebut dimana pada tahun ini fasilitas pendukung telah selesai dibangun di Kawasan Tanjung Gadang Sungai Pinago dan Tanjung Pauh. Sumber air sungai batang agam ini berasal dari air permukaan dengan rata-rata debit air sebesar 4,52 m³/detik.

2. Sungai Batang Lampasi

Sungai Batang Lampasi memiliki panjang 11,60 km dan lebar 20 meter mengalir melewati Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Utara dengan rata-rata debit air sebesar 3,53 m³/detik. Air sungai ini dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh masyarakat.

3. Sungai Batang Sikali

Sungai Batang Sikali dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian mereka dimana rata-rata debit air sungai ini 0,51 m³/detik dan

panjang 10 km dan lebar 6 meter yang melewati Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Timur

4. Sungai Baih

Sungai Baih juga termasuk sungai yang masuk pada rencana pengembangan jaringan drainase primer di Kota Payakumbuh. Sungai ini memiliki panjang 5 km dan lebar 6 meter yang mengalir melewati kecamatan Payakumbuh Timur.

5. Sungai Talang

Sungai Talang mengalir melewati Kecamatan Payakumbuh Timur dengan panjang 5 km dan lebar 5 meter. Dalam Rencana Detail Tata Ruang, direncanakan jaringan drainase primer terdapat pada sungai talang yang merupakan sistem jaringan drainase perkotaan.

6. Sungai Batang Pulau

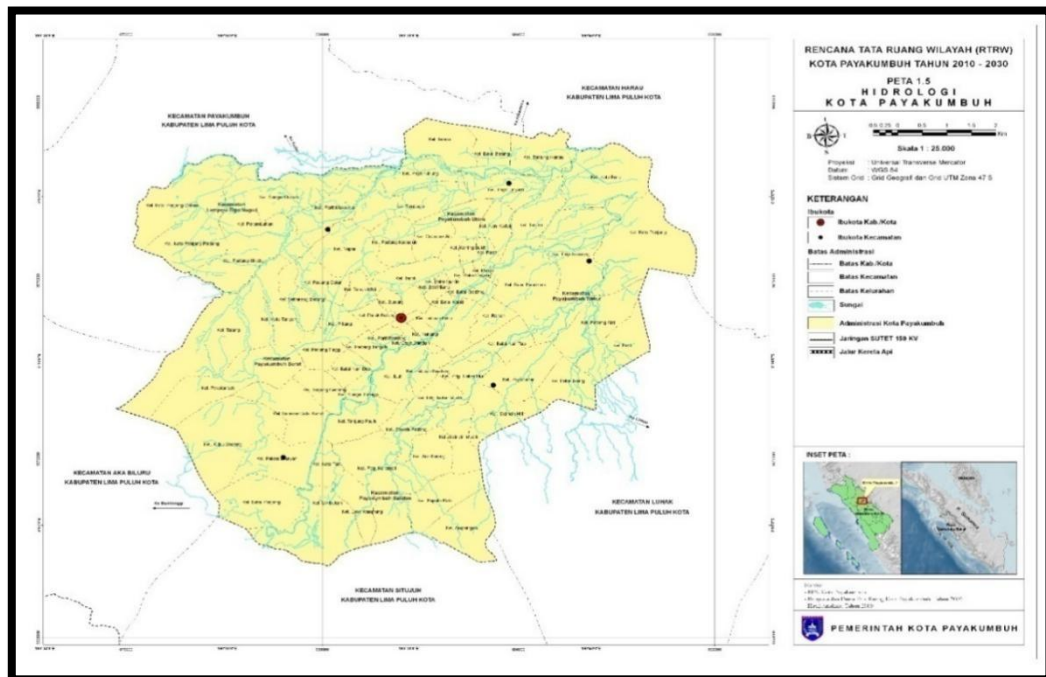
Sungai Batang Pulau telah dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengalir lahan masyarakat. Sungai ini memiliki panjang 11,40 km dan lebar 5 meter yang melewati Sungai Batang Lampasi memiliki panjang 11,60 km dan lebar 20 meter mengalir melewati Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Utara. Air dari sungai ini dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh masyarakat.

7. Sungai Tembok Jua

Sungai Tembok Jua juga dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian mereka. Sungai ini memiliki panjang 6,30 km dan lebar 4 km yang melewati Payakumbuh Utara.

Untuk menjaga agar sungai ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat mengalir dengan baik, maka Pemerintah Kota Payakumbuh selalu merencanakan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap sungai ini dan kawasan pendukungnya.

Gambar 1.3
Peta Hidrologi Kota Payakumbuh



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Untuk mendukung kegiatan pertanian dan ketersediaan air baku, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pendanaan APBN dan sumber dana lainnya telah memiliki 2 embung yaitu:

1. Mata Air Bulakan/Embung Bulakan

Mata Air Bulakan berada di wilayah Kelurahan Limbukan, dimana selain sebagai sumber air baku, mata air ini juga digunakan untuk lahan pertanian dan perikanan. Embung Bulakan dibangun pada tahun 2018 dengan dana APBN yang memiliki debit air sebesar 500 liter/detik.

2. Embung Lurah Rawang

Pembangunan embung ini dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara pada tahun 2018. Pembangunan embung ini ditujukan untuk penyediaan sumber air baku yang dipergunakan untuk air minum, irigasi lahan pertanian masyarakat dan peternakan dengan debit air sebesar 7 liter/detik.

Pemanfaatan ruang wilayah di Kota Payakumbuh lebih didominasi untuk areal pertanian seperti lahan persawahan dan kebun/ladang. Pemanfaatan ruang wilayah merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta

karakter kegiatan manusia dan alam. Berikut dapat dilihat luas penggunaan lahan menurut jenisnya di Kota Payakumbuh pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh
Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Penggunaan Lahan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
1.	Sawah	2.749	34,18	2.749	34,18	2.751	34,2	2.733	33,98	2.719	33.81
2.	Tanah utk Bangu-nan & Sekitarnya	2.968	36,9	2.970	36,92	2.543	31,62	1.831	22,76	1.861,71	23,15
3.	Kebun/ Ladang	1.450	18,03	1.450	18,03	1.320	16,41	2.301	28,61	2.314	28.77
4.	Kolam	-	-	-	-	-	-	64	0,80	71	0.88
5.	Hutan	283	3,52	283	3,52	283	3,52	458	5,70	458,3	5.70
6.	Padang Rumput	4	0,05	4	0,05	4	0,05	4	0,05	11	0.14
7.	Lainnya	589	7,32	587	7,3	1.142	14,2	652	8,10	607,79	7,56
Jumlah		8.043	100	8.043	100	8.043	100	8.043	100	8.043	100

Sumber : Dinas Pertanian 2024

Perubahan luas penggunaan lahan menurut jenisnya di Kota Payakumbuh sesuai dengan hasil kajian revisi RTRW Perda Nomor 5 Tahun 2020 dan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Payakumbuh Nomor 1 tahun 2021. Dimana pada tahun 2023, lahan sawah berkurang dari tahun sebelumnya sebesar 0,17% menjadi 2,719 Ha, tanah untuk bangunan dan sekitarnya naik sebesar 0,39% menjadi 1.861,71 Ha, lahan peruntukan kolam naik sebesar 0,08% menjadi 71 Ha dan peruntukan lainnya turun sebesar 0,54% menjadi 607,79 Ha. Sementara itu untuk lahan kebun/ladang naik sebesar 0,16% menjadi 2.314 Ha, hutan naik sebesar 0,003% menjadi 458,3 Ha dan padang rumput naik sebesar 0,09 menjadi 11 Ha.

Tabel 1.4
Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Payakumbuh
Tahun 2019-2024 (Ha)

No	Kecamatan	Luas Daerah	2020		2021		2022		2023		2024	
			Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah
1	Payakumbuh Barat	1.966	529	577	414,23	567	414,23	567	411,72	324	410,63	570,3
2	Payakumbuh Timur	2.273	663	772	847,57	772	847,57	772	845,47	397	845,00	774,3
3	Payakumbuh Utara	1.453	745	191	713,45	191	713,45	191	709,85	149	711,00	193,3
4	Payakumbuh Selatan	1.409	378	491	397,04	491	397,04	491	395	179	395,00	492,3
5	Lamposi Tigo Nagori	942	436	293	360,87	293	360,87	293	357	281	357,41	296,3
Jumlah		8.043	2.749	2.358	2.749	2.324	2.733,16	2.314	2.719,04	1.330	2.719,50	2.326,5

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2020-2024

Berdasarkan data tahun 2024 dari Dinas Pertanian Kota Payakumbuh penggunaan lahan untuk lahan pertanian lebih banyak di Kecamatan Payakumbuh Timur dengan total luas lahan pertanian sebesar 1.619 Ha atau 71,22% dari luas wilayahnya, yang didominasi lahan yang digarap sebagai sawah sebanyak 845 Ha. Jika dilihat dari rata-rata penggunaan lahan dari masing-masing wilayah kecamatan, 4 (empat) kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh penggunaan lahannya ditujukan untuk lahan pertanian yaitu >50,00% dari luas masing-masing wilayah, yaitu Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara, Payakumbuh Selatan dan Lamposi Tigo Nagori.

2) Aspek Geologi

Material padat pembentuk permukaan Kota Payakumbuh terdiri dari humus, soil (tanah), aluvial (sungai dari farmasi sedimen), metamorphosis (malihan), vulkanik dan intrusi (terobosan). Pembentukan dan penyebaran material tersebut merupakan hasil dari berbagai proses yang berasal dari dalam bumi (endogen) dan dari luar (exogen). Berbagai proses dalam (endogen) mencakup tektonik dan vulkanisme (kegunungapian). Berbagai proses dari luar terdiri dari pelapukan, erosi, transportasi dan sedimentasi.

Urutan tata letak material padat penyusun bentang alam Kota Payakumbuh secara stratigrafis adalah sebagai berikut:

- 1) Humus dan *Soil* (tanah) dengan ketebalan beragam dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter.
- 2) Aluvial sungai (Q al) terdiri dari lempung, pasir, kerikil dan bongkah batuan beku dan kwarsit, vdiendapkan disepanjang dataran banjir. Ketebalan bervariasi dapat mencapai puluhan meter.
- 3) Seimen Formasi Brani (Tob) Konglomerat kasar beraneka ragam dengan sisipan batu pasir. Komponen dari konglomerat kasar terdiri dari : kwarsit, granit, filit dan batu gamping. Tersementasi dengan baik, dan secara lokal ada yang terbersikkan. Ketebalan formasi brani 600 m, berumur oligosen dan hubungan secara manjari-jemari (*Intenfingering*) dengan sedimen Formasi Sangkarewang.
- 4) Malihan, anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (PCks) mayoritas terdiri dari serpih dan filit kemerahan sampai coklat tua mengandung sisipan tipis batusabak kelabu, kwarsit, batu lanan, rijang kelabu dan lava andesit sampai basalt. Pada kontak dengan batuan intrusi, PCks bermalih menjadi sekis, genes dan batu tanduk. PCks berhubungan secara menjari-jemari (*Interfingering*) dengan PCKl dan PCkg, dengan tebal keseluruhan mencapai 5000 m, berumur Permo-Karbon.
- 5) Malihan, anggota batu gamping Formasi Kuantan (PCKl) Batu gamping pejal, berongga, putih kelabu hingga kemerahan. Mengandung sisipan tipis batusabak, filit, serpih terkensikkan dan kwarsit. Umumnya membentuk topografi kasar, berumur karbon. Di Kota Payakumbuh, material PCks dan PCKl, tersingkap (exposed) di batas barat daya kota, dan menjadi salah satu objek wisata di gua Nagalau Indah.
- 6) Vulkanik Tufa batuapung (Qpt) terdiri dari batuapung putih kekuningan, berdiameter $\frac{1}{2}$ s/d 10 cm didalam massa dasar kaca kelaran bekomposisi riolit. Secara lokal, dibagian bawah Qpt mencapai ratusan meter, berumur kwaiter, dan merupakan mayoritas material penyusun permukaan Kota Payakumbuh.
- 7) Vulkanik Andesit Gunung Malintang (Qamg) : Breksi andesit sampai basalt, aglomerat, pecahan lava berongga, endapan lahan dan lava. Merupakan

material dan kegiatan gunung api malintang, diselatan Kota Payakumbuh berumur Kwaiter.

- 8) Vulkanik Andesit sampai basalt (Ta) : aliran lava yang tak dipisah, breksi, aglomerat dan batuan hipabisal berkomposisi andesit sampai basalt. Berumur miosen (Tersier atas) tersingkap di barat daya perbukitan batugamping (PCKI) dibatas barat daya Kota Payakumbuh.

Data struktur geologi yang ada di Kota Payakumbuh, hanya satu kedudukan struktur lapisan pada sedimen formasi brani yaitu sudut kemiringan (dip) lapisan 250 dengan arah kemiringan (dip direction) kearah selatan dilereng utara Gunung Malintang . Data perihal kehadiran struktur patahan (sesar) maupun kekar (joint), nihil. Namun, data regional memperlihatkan bahwa Kota Payakumbuh di kelilingi oleh tiga zona patahan besar yaitu :

- a. Zona Patahan Mangani ; 12 km di barat laut Kota Payakumbuh
- b. Zona Patahan Sungai Takung ; 15 km di tenggara di balik Gunung Malintang
- c. Zona Patahan Sungai Pakis ; 35 km di timur laut Kota Payakumbuh.

Ketiga zona patahan tersebut, diluar wilayah administrasi Kota Payakumbuh, namun hal tersebut diatas perlu diantisipasi sebagai kawasan yang akan terkena dampak sebagai kawasan evakuasi bencana alam, dari wilayah sekitarnya.

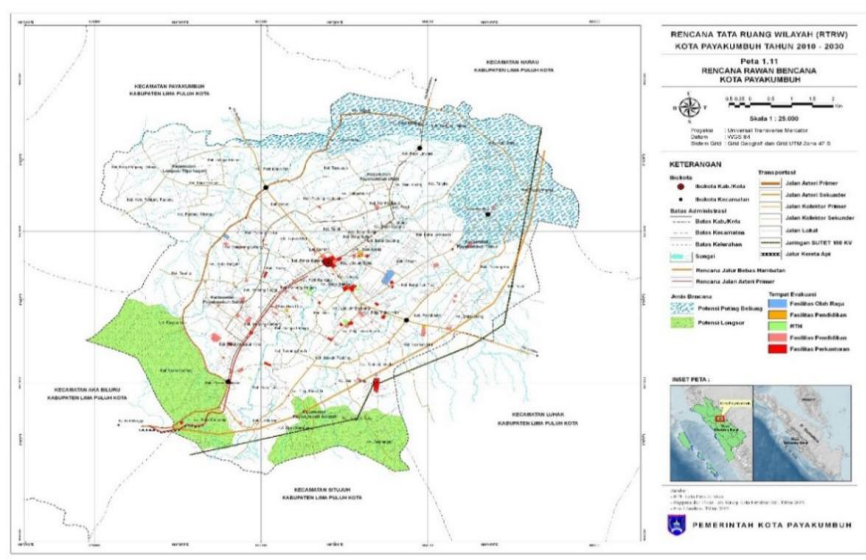
3) Wilayah Rawan Bencana

Kejadian bencana alam ataupun bencana sosial mengakibatkan penurunan pada daya dukung wilayah, dikarenakan adanya sumber daya yang rusak akibat bencana. Merujuk data topografi lahan di Kota Payakumbuh, dimana didominasi lahan yang berada pada kemiringan <2,00% atau datar dan curah hujan yang cukup tinggi, maka bencana yang cukup rawan terjadi di Kota Payakumbuh dan harus menjadi perhatian adalah bencana angin puting beliung baik itu disertai oleh hujan deras maupun tidak. Selain itu potensi bencana tanah longsor dapat terjadi di beberapa kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Selatan. Sedangkan ancaman bencana alam gempa

bumi, Kota Payakumbuh relatif aman karena Payakumbuh tidak terletak pada zona patahan, begitu juga bencana alam banjir, dan letusan gunung api.

Dengan mengetahui potensi bencana tersebut, peruntukan pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan lokasi pembangunan seperti pemukiman, perdagangan, pendidikan dan sebagainya; serta pengawasan dan pengendalian dari izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan untuk meminimalkan penyelewengan pembangunan dan resiko yang muncul apabila bencana terjadi. Gambar 1.4 di bawah menunjukkan potensi rawan bencana yang ada di Kota Payakumbuh.

Gambar 1.4
Peta Rencana Rawan Bencana Kota Payakumbuh



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

c. Informasi Umum Data Kependudukan

1) Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Kondisi kependudukan Kota Payakumbuh setiap tahun mengalami peningkatan, dimana tercatat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,31% pada tahun 2024. Penduduk ini bermukim tersebar pada 5 (lima) kecamatan, sehingga kepadatan penduduk pada setiap kecamatan berbeda-beda. Kondisi ini ditampilkan pada tabel 1.5 berikut:

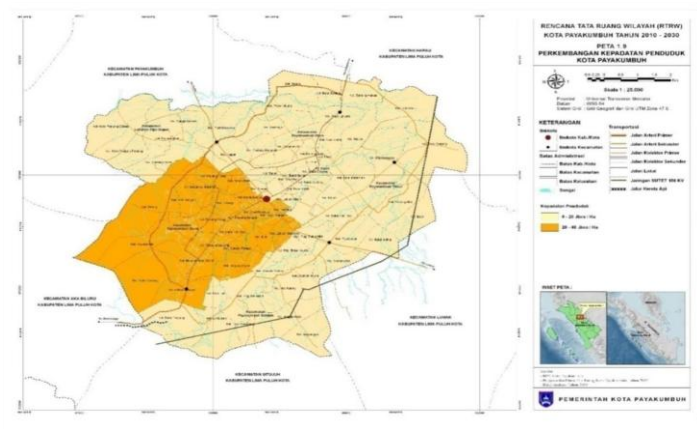
Tabel 1.5
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	LUAS (KM ²)	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/ Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/ Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/ Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/ Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/ Km ²)
1.	Payakumbuh Barat	19,064	54.532	2.861	55.133	2.893	55.938	2.934	56.490	2.964	57.200	3.001
2.	Payakumbuh Timur	22,730	29.325	1.290	29.669	1.305	32.762	1.441	30.450	1.339	12.931	1.357
3.	Payakumbuh Utara	14,528	32.242	2,219	32.443	2.233	30.125	2.074	32.930	2.266	30.850	2.284
4.	Payakumbuh Selatan	14,683	11.990	817	12.205	831	12.469	849	12.680	864	33.190	881
5.	Lamposi Tigo Nagori	9,425	11.487	1.218	11.734	1.244	12.031	1.276	12.280	1.303	12.560	1.333
Total		80,43	139.576	1.735	141.184	1.755	143.325	1.782	144.830	1.801	146.731	1.825

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2019–2024

Data di atas menunjukkan tingkat kepadatan penduduk mengalami peningkatan di setiap kecamatan, dimana tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat dengan kepadatan 3.001 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Payakumbuh Utara dengan kepadatan sebesar 2.284 jiwa/km². Kondisi ini disebabkan oleh kedua kecamatan ini merupakan pusat perdagangan barang dan jasa atau daerah pusat bisnis serta pusat pemerintahan di Kota Payakumbuh. Selain dari faktor tersebut pilihan/preferensi masyarakat terhadap lokasi pemukiman juga dipengaruhi oleh topografi wilayah seperti luas daerah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak terlalu berbeda, tetapi karena Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih didominasi perbukitan, sehingga kecamatan Payakumbuh Utara lebih dipilih sebagai kawasan pemukiman dibandingkan Payakumbuh Selatan.

Gambar 1.5
Peta Perkembangan Kepadatan Kota Payakumbuh



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

2) Struktur dan Karakteristik Penduduk

a) Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

Klasifikasi penduduk berdasarkan usia berguna untuk memperlihatkan karakteristik penduduk suatu daerah, dan juga untuk menunjukkan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) antara penduduk produktif dengan penduduk non produktif. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data pada tabel 1.7, didapatkan *dependency ratio* atau rasio ketergantungan penduduk di Kota Payakumbuh.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2020-2024

No	Kelompok Usia	2020	2021	2022	2023	2024
1.	0-4	12.682	12.728	12.825	13.190	13.110
2.	5 -9	11.521	11.467	11.503	11.630	11.970
3.	10 -14	12.392	12.284	12.180	11.870	11.660
4.	15-19	11.761	11.777	11.848	12.260	12.391
5.	20-24	11.357	11.338	11.358	11.380	11.470
6.	25-29	11.406	11.493	11.604	11.390	11.330
7.	30-34	10.459	10.606	10.788	11.110	11.350
8.	35-39	10.417	10.582	10.786	10.400	10.440
9.	40-44	9.879	10.032	10.218	10.240	10.340
10.	45-49	9.019	9.202	9.424	9.470	9.610
11.	50-54	7.758	7.923	8.114	8.450	8.680
12.	55-59	6.664	6.843	7.052	7.190	7.380
13.	60-64	5.385	5.549	5.728	6.020	6.210

No	Kelompok Usia	2020	2021	2022	2023	2024
14.	65+	8.876	9.360	9.897	10.250	10.820
	Jumlah	139.576	141.184	143.325	144.830	146.731

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2020–2024

Jika memperhatikan tabel jumlah penduduk perkelompok usia di atas, kondisi kependudukan di Kota Payakumbuh bercirikan ekspansif, dimana tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian, yang berarti kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup baik dari tahun ke tahun. Selain itu jumlah penduduk produktif (15 -64 tahun) lebih banyak dari jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), dimana perbandingan ini akan menghasilkan rasio beban tanggungan penduduk yang ditampilkan pada tabel 1.7.

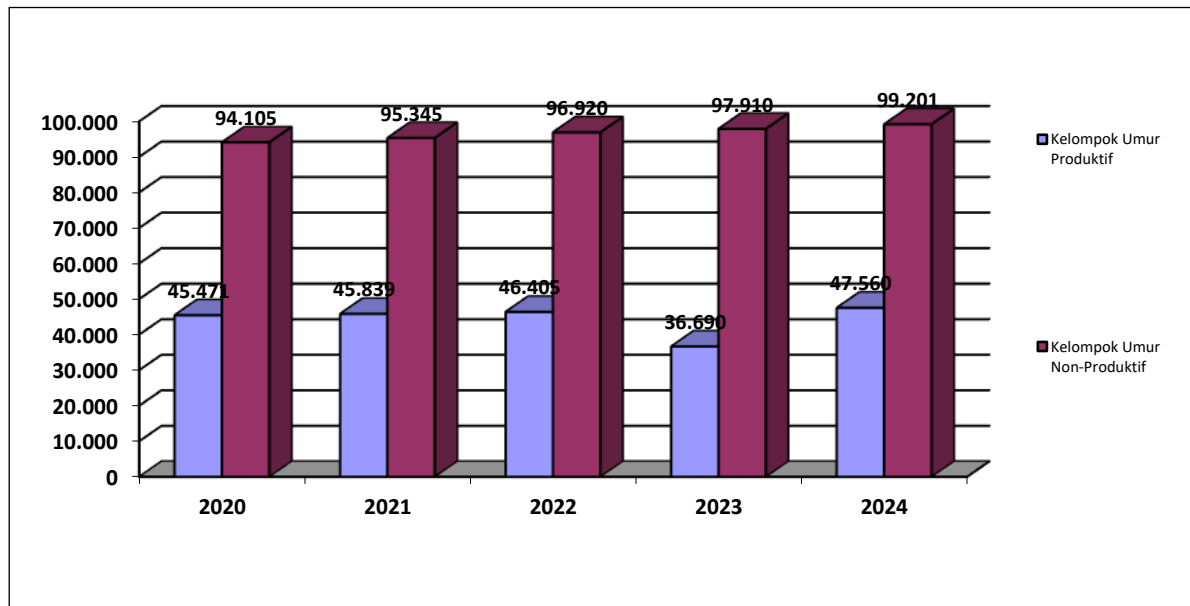
Tabel 1.7
Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2020– 2024

No	Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelompok Umur Non-Produktif	45.471	45.839	46.405	36.690	47.560
2	Kelompok Umur Produktif	94.105	95.345	96.920	97.910	99.201
3	Rasio Beban Tanggungan (:100)	48	48	48	48	48

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2021-2025

Pengolahan data di atas menunjukkan dari tahun 2020 sampai 2024, rasio tanggungan antara usia non produktif dengan usia produktif berada pada posisi 48:100 dimana setiap 100 jiwa usia produktif akan menanggung 48 jiwa non produktif.

Diagram 1.1
Rasio Beban Tanggungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024



Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2021-2025

b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan rasio jenis kelamin di Kota Payakumbuh, dimana untuk tahun 2023 rasio jumlah laki-laki terhadap perempuan adalah 101,47 dimana dari 100 jiwa perempuan di Kota Payakumbuh sebanding dengan 101 jiwa laki-laki, komposisi ini dapat dilihat pada tabel 1.9.

Tabel 1.8
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Payakumbuh Barat	27.330	27.204	27.567	27.566	28.100	27.838	28.100	27.838	28.921	28.623
2.	Payakumbuh Timur	14.825	14.500	14.981	14.688	16.817	15.945	16.817	15.945	16.226	15.790
3.	Payakumbuh Utara	16.247	15.995	16.382	16.061	15.294	14.831	15.294	14.831	17.471	17.298
4.	Payakumbuh Selatan	6.044	5.946	6.163	6.042	6.359	6.110	6.359	6.110	6.511	6.389
5.	Lamposi Tigo Nagori	5.804	5.681	5.925	5.809	6.164	5.867	6.164	5.867	6.362	6.237
Total		70.250	69.326	71.018	70.166	72.734	70.591	73.760	72.971	75.491	74.337

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2021-2025

c) Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Payakumbuh pada tahun 2024 didominasi oleh sektor jasa sebanyak 49.432 orang diikuti oleh sektor industri pengolahan sebanyak 15.372 orang dan terakhir sektor pertanian, kehutanan, perburuhan dan perikanan sebanyak 9.281 orang. Semua sektor mata pencaharian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Payakumbuh pada tahun 2024 adalah 77.876 jiwa, dimana 74.085 jiwa merupakan penduduk yang sudah bekerja atau 95,13% dari angkatan kerja.

Tabel 1.9
Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuhan, Perikanan	6.259	7.100	7.100	10.902	9.281
2.	Industri Pengolahan	13.891	14.419	14.419	14.445	15.372
3.	Jasa	44.994	47.979	47.979	48.790	49.432
Jumlah yang Bekerja		63.182	65.144	69.498	74.137	74.085
Jumlah Pengangguran/ yang Mencari Kerja		2.710	4.664	4.805	3.770	3.791
Total		65.892	69.808	74.303	77.907	77.876

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2021–2025

d) Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat partisipasi pendidikan di Kota Payakumbuh pada tabel I.10 terlihat bahwa secara umum meningkat setiap jenjang pendidikan setiap tahun, ini terjadi karena peningkatan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan. Data ini juga berguna bagi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menghitung jumlah guru, sekolah dan sarana pendidikan lainnya yang berguna untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing.

Tabel 1.10
Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2020-2024

No	Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH	23.287	23.436	23.584	24.018	24.621
2.	TIDAK/BELUM TAMAT SD	16.157	15.873	15.875	16.127	16.228
3.	SD	18.800	17.607	17.293	17.033	17.564
4.	SLTP	20.258	20.065	19.804	20.033	20.205
5.	SLTA	44.713	46.653	47.350	48.968	49.052
6.	DIPLOMA I/II	706	668	668	678	631
7.	AKADEMISI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	3.759	3.863	3.877	3.990	4.035
8.	DIPLOMA IV/ S1	11.709	12.272	12.479	12.956	13.426
9.	S2 DAN S3	812	847	883	924	968
TOTAL		140.201	141.284	141.813	144.727	146.731

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2021-2025

d. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dengan lahirnya PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka ditetapkanlah Jumlah Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh sebanyak 31 Perangkat Daerah dan 20 UPTD dan UPTB.

Tabel 1.11
Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	
2	Sekretariat DPRD	
3	Dinas Pendidikan	
4	Dinas Kesehatan	
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

6	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	
8	Dinas Pertanian	
9	Dinas Sosial	
10	Dinas Lingkungan Hidup	
11	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga	
12	Dinas Koperasi Dan UKM	
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
14	Dinas PMPTSP	
15	Dinas P3AP2KB	
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
17	Dinas Perhubungan	
18	Dinas Komunikasi Dan Informasi	
19	Dinas Ketahanan Pangan	
20	Satuan Polisi Dan Pamong Praja	
21	Inspektorat	
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
23	Badan Keuangan Daerah	
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	
25	Kec. Payakumbuh Barat	
26	Kec. Payakumbuh Utara	
27	Kec. Payakumbuh Timur	
28	Kec. Payakumbuh Selatan	
29	Kec. Lamposi Tigo Nagori	
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2024
31	Kantor Kesbangpol	Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013

Sumber : Setda Kota Payakumbuh

Tabel 1.12
Nama-nama UPT Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh

No	Dinas	UPT
1	Dinas Pendidikan	– Satuan Pendidikan Formal TK
		– Satuan Pendidikan Formal SD
		– Satuan Pendidikan Formal SMP

No	Dinas	UPT
2	Dinas Kesehatan	– Instalasi Farmasi
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	– Alat Berat
		– Laboratorium Konstruksi
4	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	– Pusat Pelayanan Pengembangan Rendang
5	Dinas Pertanian	– Perbenihan Dan Pelayanan Jasa Alsintan
		– Puskesmas
		– RPH Dan Pasar Ternak
		– Perbenihan Dan Pakan Ikan
		– Pembibitan Dan Pakan Ternak
6	Dinas Lingkungan Hidup	– Laboratorium Lingkungan
7	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga	– Pengelola Objek Wisata Dan Usaha Pariwisata
8	Dinas Koperasi Dan Ukm	– Promosi Produk UMKM
9	Dinas Perhubungan	– Parkir
		– Terminal
		– Penguji Kendaraan Bermotor
10	Badan Keuangan Daerah	– Pajak Daerah
		– Fasilitas Pembiayaan

Sumber : Setda Kota Payakumbuh

Tabel 1.13
Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat Kota Payakumbuh

No	Pusat Layanan Kesehatan
1	RSUD dr. Adnaan Wd
2	Puskesmas Ibuh
3	Puskesmas Parit Rantang
4	Puskesmas Tiakar
5	Puskesmas Air Tabit
6	Puskesmas Lampasi

7	Puskesmas Tarok
8	Puskesmas Payolansek
9	Puskesmas Padang Karambia

Sumber : Setda Kota Payakumbuh

e. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah

Berdasarkan bezetting tahun 2025 jumlah Pegawai pemerintah kota Payakumbuh menurut golongan sebagaimana tergambar pada Tabel I.14.

Tabel 1.14
Jumlah PNS Kota Payakumbuh menurut Kelompok Jenis Klasifikasi

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	Pengadaan dan Pemberdayaan Masyarakat	16	24	31	71
2	Sekretariat DPRD	Pengadaan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	4	15	23
3	Inspektorat	Kuangan dan Inspektorat	5	40	5	50
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	7	23	6	36
5	Badan Keuangan Daerah	Kuangan dan Publik, Keuangan dan Inpektorat, Keuangan dan Publik	21	17	21	59
6	Badan Kepegawaian dan PSDM	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5	10	31	46
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketenraman dan Ketertiban umum, Serta Penanggulangan Bencana	6	6	15	27
8	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Ketenraman dan Ketertiban umum, Serta Penanggulangan Bencana	12	-	28	40

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
9	Dinas Kesehatan	Kesehatan	26	547	68	641
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	14	15	29	58
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	4	13	23
12	Dinas Pendidikan	Pendidikan	11	688	58	757
13	Dinas Sosial	Sosial	5	7	7	19
14	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian	8	2	8	18
15	Dinas P3A dan P2, Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	5	7	10	22
16	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan	5	4	6	15
17	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	6	5	14	25
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	6	8	7	21
19	Dinas Perhubungan	Perhubungan	14	2	22	38
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika, Keuangan dan Publik, Statistik, Persandian	5	17	4	26
21	Dinas Koperasi dan UKM	Perdagangan, Koperasi dan UMKM	9	7	21	37
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Penanaman Modal	3	10	6	19
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	9	7	12	28
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kearsipan dan Perpustakaan	5	7	3	15
25	Dinas Pertanian	Pertanian, Perikanan	15	43	16	74

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
26	Kecamatan Payakumbuh Utara	Kewilayahan	42	-	7	49
27	Kecamatan Payakumbuh Barat	Kewilayahan	68	-	6	74
28	Kecamatan Payakumbuh Timur	Kewilayahan	43	-	8	51
29	Kecamatan Payakumbuh Selatan	Kewilayahan	33	-	5	38
30	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Kewilayahan	31	-	6	37
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	3	9
	Jumlah		450	1505	491	2446

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, 2025

Tabel 1.15

Jumlah PNS Kota Payakumbuh menurut Kelompok Jenis Klasifikasi

No	Jenis	Jumlah
1	Guru	607
2	Kesehatan	510
3	JF. Tertentu (selain Guru dan Kesehatan)	388
4	Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana	941
5	PPPK	822
6	PPPK Paruh Waktu	1,034
Total		4,302

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Sesuai Tabel 1.15 di atas, jumlah PNS Kota Payakumbuh yang terbesar yaitu pada jenis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana yaitu sebanyak 941 orang, diikuti Tenaga Guru sebanyak 607 orang dan Tenaga Kesehatan sebanyak 510 orang.

Tabel 1.16
Jumlah PNS Kota Payakumbuh menurut Golongan

No	Jenis	Jumlah
1	Gol IV	539
2	Gol III	1.721
3	Gol II	181
4	Gol I	5
Total		2.446

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Berdasarkan Tabel I.16 di atas, jumlah PNS Kota Payakumbuh terbanyak berada pada Golongan III sebanyak 1.721 orang, diikuti oleh Golongan IV sebanyak 539 orang, Golongan II sebanyak 181 orang dan Golongan I sebanyak 5 orang.

Tabel 1.17
Jumlah PPPK Kota Payakumbuh menurut Golongan

No	Jenis	Jumlah
1	Gol X	48
2	Gol IX	483
3	Gol VII	178
4	Gol V	113
Total		822

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Berdasarkan Tabel I.17 di atas, jumlah PPPK Kota Payakumbuh terbanyak berada pada Golongan IX sebanyak 483 orang, diikuti Golongan VII sebanyak 178 orang, Golongan V sebanyak 113 orang dan Golongan X berjumlah sebanyak 48 orang.

Tabel 1.18
Jumlah PNS Kota Payakumbuh Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenis	Jumlah
1	S3	2
2	S2	332
3	S1/D-IV	2,211
4	D-III/D-II	681
5	SLTA/D-I	985

6	SLTP	45
7	SD	46
Total		4,302

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Berdasarkan Tabel I.18 di atas, jumlah PNS Kota Payakumbuh berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah jenjang S1/DIV sebanyak 2.211 orang, diikuti oleh DIII/DII sebanyak 681 orang, lalu SLTA/DI sebanyak 985 orang, S2 berjumlah sebanyak 332 orang, SLTP dan SD sebanyak 45 orang dan 46 orang dan yang memiliki pendidikan S3 berjumlah 2 orang.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Realisasi Pendapatan menurut jenis Pendapatan

Dalam TA 2025, Pemerintah Kota Payakumbuh merencanakan penerimaan pendapatan daerah melalui APBD setelah perubahan sebesar Rp762.795.053.515,00 dengan realisasi Rp782.436.280.864,00. Jumlah tersebut mencapai poin 102,57% dari jumlah pendapatan yang telah ditargetkan.

Secara rinci capaian realisasi penerimaan Tahun 2025 jika dibanding dengan anggaran Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.19
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
4	PENDAPATAN DAERAH	762.795.053.515,00	782.436.280.864,00	102,57
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	157.990.952.046,00	166.878.567.156,00	105,63
4.1.01	Pajak Daerah	41.080.651.214,00	44.752.209.670,00	108,94
4.1.02	Retribusi Daerah	92.534.636.288,00	96.656.956.695,00	104,45
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.275.525.706,00	13.275.525.706,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.100.138.838,00	12.193.875.085,00	109,85
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	157.990.952.046,00	166.878.567.156,00	105,63
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	604.804.101.469,00	611.557.713.708,00	101,12
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	574.958.593.689,00	579.808.401.303,00	100,84
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.845.507.780,00	31.749.312.405,00	106,38
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	29.845.507.780,00	31.749.312.405,00	106,38
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	604.804.101.469,00	611.557.713.708,00	101,12
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	4.000.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	4.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	4.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	762.795.053.515,00	782.436.280.863,93	102,57

Berdasarkan tabel Pendapatan Tahun Anggaran 2025, dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp762.795.053.515 dan direalisasikan sebesar Rp782.436.280.864 atau mencapai 102,57%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 secara umum telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan daerah tersebut terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, serta didukung oleh realisasi pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggaran ditetapkan sebesar Rp157.990.952.046 dan direalisasikan sebesar Rp166.878.567.156 atau mencapai 105,63%. Realisasi PAD tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp44.752.209.670 atau 108,94%, Retribusi Daerah sebesar Rp96.656.956.695 atau 104,45%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp13.275.525.706 atau 100,00%, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp12.193.875.085 atau 109,85%. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan PAD pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik dan mampu melampaui target yang direncanakan.

Selanjutnya, pada kelompok Pendapatan Transfer, anggaran sebesar Rp604.804.101.469 direalisasikan sebesar Rp611.557.713.708 atau mencapai 101,12%. Realisasi tersebut terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp579.808.401.303 atau 100,84% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp31.749.312.405 atau 106,38%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan transfer, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun antar daerah, telah terealisasi dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian total pendapatan daerah.

Adapun pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, tidak terdapat alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025, namun dalam realisasinya tercatat sebesar Rp4.000.000.000, yang seluruhnya berasal dari Dana Darurat, sedangkan Pendapatan Hibah tidak terealisasi. Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang baik karena mampu melampaui target anggaran yang telah ditetapkan, sehingga memberikan dukungan positif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah.

untuk melihat capaian kinerja pendapatan tahun 2025 ini dibandingkan dengan Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.20
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	2025			2024		
		anggaran	realisasi	persentase capaian	anggaran	realisasi	persentase capaian
1	2	3	4	6,00	7	8	9
4	PENDAPATAN DAERAH	762.795.053.515,00	782.436.280.863,93	102,57	733.573.159.828,00	753.320.524.913,00	102,69
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	157.990.952.046,00	166.878.567.155,93	105,63	130.174.080.614,00	138.649.853.624,00	106,51
4.1.01	Pajak Daerah	41.080.651.214,00	44.752.209.670,00	108,94	23.077.762.541,00	23.691.080.250,00	102,66
4.1.02	Retribusi Daerah	92.534.636.288,00	96.656.956.695,00	104,45	87.502.495.973,00	93.272.708.497,30	106,59
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.275.525.706,00	13.275.525.706,00	100,00	12.381.453.735,00	12.381.453.735,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.100.138.838,00	12.193.875.084,93	109,85	7.212.368.365,00	9.304.611.142,00	129,01
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	604.804.101.469,00	611.557.713.708,00	101,12	601.863.079.214,00	613.134.671.289,00	101,87
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	574.958.593.689,00	579.808.401.303,00	100,84	571.341.676.793,00	575.781.818.001,00	100,78
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.845.507.780,00	31.749.312.405,00	106,38	30.521.402.421,00	37.352.853.288,00	122,38
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	4.000.000.000,00	0,00	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	100,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	100,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	4.000.000.000,00	0,00			
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	4.000.000.000,00	0,00			
	JUMLAH PENDAPATAN	762.795.053.515,00	782.436.280.863,93	102,57	733.573.159.828,00	753.320.524.913,00	102,69

Pada aspek pengelolaan Pendapatan Daerah, capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi Pendapatan Daerah yang mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar Rp762.795.053.515,00, terealisasi sebesar Rp782.436.280.864,00 atau mencapai 102,57%. Hal ini berkaitan dengan penyesuaian tarif setelah di sahkannya Perda Pendapatan dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku di Tahun 2024 dan juga pendapatan dari opsen pajak yang sekarang merupakan objek pajak daerah yang mulai diberlakukan pada Tahun 2025 ini. Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2024, dari target sebesar Rp733.573.159.828,00, dapat direalisasikan sebesar Rp753.320.524.914,00 atau mencapai 102,69%. Dengan demikian, secara nominal realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 meningkat sebesar Rp29.115.755.950,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Namun demikian, apabila ditinjau dari persentase capaian terhadap target, capaian Tahun Anggaran 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun Anggaran 2024, yang menunjukkan bahwa peningkatan realisasi tersebut berlangsung seiring dengan meningkatnya target pendapatan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025.

Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 terutama didorong oleh meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp157.990.952.046,00 dan terealisasi sebesar Rp166.878.567.156,00 atau mencapai 105,63%. Adapun pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp130.174.080.614,00 dan terealisasi sebesar Rp138.649.853.625,00 atau mencapai 106,51%. Dengan demikian, secara nominal terjadi peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp28.228.713.531,00. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari komponen Pajak Daerah, yang pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp41.080.651.214,00 dan terealisasi sebesar Rp44.752.209.670,00 atau mencapai 108,94%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp23.077.762.541,00 dan terealisasi sebesar Rp23.691.080.250,00 atau mencapai 102,66%. Selain itu, Retribusi Daerah juga menunjukkan

peningkatan realisasi, yaitu dari Rp93.272.708.497,00 pada Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp96.656.956.695,00 pada Tahun Anggaran 2025, meskipun dari sisi persentase capaian mengalami penurunan dari 106,59% menjadi 104,45%. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap menunjukkan capaian optimal sebesar 100,00% pada kedua tahun anggaran, sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meningkat dari realisasi sebesar Rp9.304.611.142,00 pada Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp12.193.875.085,00 pada Tahun Anggaran 2025, dengan capaian masing-masing sebesar 129,01% dan 109,85%.

Pada komponen Pendapatan Transfer, realisasi Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp611.557.713.708,00 dari target sebesar Rp604.804.101.469,00 atau mencapai 101,12%. Adapun pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp601.863.079.214,00 dan terealisasi sebesar Rp613.134.671.289,00 atau mencapai 101,87%. Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa secara nominal realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.576.957.581,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Pada subkomponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp579.808.401.303,00 dari target Rp574.958.593.689,00 atau mencapai 100,84%, sedikit lebih baik dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp575.781.818.001,00 dari target Rp571.341.676.793,00 atau mencapai 100,78%. Namun demikian, pada subkomponen Pendapatan Transfer Antar Daerah terjadi penurunan realisasi, yaitu dari Rp37.352.853.288,00 pada Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp31.749.312.405,00 pada Tahun Anggaran 2025. Penurunan sebesar Rp5.603.540.883,00 tersebut turut memengaruhi capaian Pendapatan Transfer secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan atau sebesar Rp0,00, namun terealisasi sebesar Rp4.000.000.000,00. Adapun pada Tahun Anggaran 2024, komponen ini dianggarkan sebesar Rp1.536.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.536.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi pada Tahun Anggaran

2025 tersebut seluruhnya berasal dari Dana Darurat, sedangkan Pendapatan Hibah tidak terealisasi. Oleh karena pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat target anggaran pada komponen dimaksud, maka persentase capaian tercatat 0,00% dan tidak dapat dibandingkan secara proporsional dengan Tahun Anggaran 2024. Meskipun demikian, secara nominal terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp2.464.000.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 tetap berada dalam kategori baik, karena realisasi pendapatan mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan secara nominal lebih tinggi dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh membaiknya realisasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada komponen Pajak Daerah. Namun demikian, apabila ditinjau dari aspek efektivitas pencapaian target, persentase capaian Tahun Anggaran 2025 sedikit berada di bawah Tahun Anggaran 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pendapatan daerah masih perlu terus diperkuat, terutama pada komponen Pendapatan Transfer dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, sehingga pada tahun anggaran berikutnya capaian pendapatan daerah tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga semakin efektif dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

b. Realisasi Belanja menurut jenis Belanja

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, diperoleh realisasi belanja daerah sebesar Rp765.450.084.970,00. Jumlah tersebut mencapai poin 89,95% dari jumlah belanja yang dianggarkan sebesar Rp851.009.111.090,00.

Secara rinci capaian realisasi belanja Tahun 2025 jika dibanding dengan anggaran Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
5	BELANJA DAERAH	851.009.111.090,00	765.450.084.970,00	89,95
5.1	BELANJA OPERASI	738.081.315.556,00	671.418.452.358,00	90,97
5.1.01	Belanja Pegawai	427.783.039.819,00	381.919.511.232,00	89,28
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.002.812.574,00	266.704.269.431,00	92,93
5.1.05	Belanja Hibah	22.270.963.163,00	21.829.971.695,00	98,02
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.024.500.000,00	964.700.000,00	94,16
	JUMLAH BELANJA OPERASI	738.081.315.556,00	671.418.452.358,00	90,97
5.2	BELANJA MODAL	106.201.784.050,00	94.027.132.612,00	88,54
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.647.190.400,00	1.598.164.430,00	97,02
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.700.361.892,00	38.662.905.255,00	82,79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.429.352.556,00	26.140.617.432,00	88,82
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.167.197.162,00	25.423.870.469,00	97,16
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.234.682.040,00	2.178.598.026,00	97,49
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	23.000.000,00	22.977.000,00	99,90
	JUMLAH BELANJA MODAL	106.201.784.050,00	94.027.132.612,00	88,54
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.726.011.484,00	4.500.000,00	0,07
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.726.011.484,00	4.500.000,00	0,07
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	6.726.011.484,00	4.500.000,00	0,07
	JUMLAH BELANJA	851.009.111.090,00	765.450.084.970,00	89,95

Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp851.009.111.090,00 dengan realisasi sebesar Rp765.450.084.970,00 atau mencapai 89,95%. Dengan demikian, secara umum pelaksanaan belanja daerah menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang cukup baik, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp85.559.026.120,00.

Realisasi belanja daerah tersebut terutama didukung oleh Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp738.081.315.556,00 dan direalisasikan sebesar Rp671.418.452.358,00 atau 90,97%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja untuk mendukung operasional pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan program prioritas daerah pada umumnya telah berjalan sesuai rencana. Dalam kelompok ini, Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp381.919.511.232,00 atau 89,28%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp266.704.269.431,00 atau 92,93%, Belanja Hibah sebesar Rp21.829.971.695,00 atau 98,02%, serta Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp964.700.000,00 atau 94,16%.

Selanjutnya, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp106.201.784.050,00 dan direalisasikan sebesar Rp94.027.132.612,00 atau 88,54%. Realisasi tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang berkaitan

dengan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan serta pelayanan publik telah berjalan cukup baik, walaupun belum sepenuhnya mencapai target anggaran. Komponen Belanja Modal yang terealisasi meliputi Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.598.164.430,00 atau 97,02%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.662.905.255,00 atau 82,79%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.140.617.432,00 atau 88,82%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp25.423.870.469,00 atau 97,16%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.178.598.026,00 atau 97,49%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp22.977.000,00 atau 99,90%.

Adapun Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp6.726.011.484,00, dengan realisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau 0,07%. Rendahnya realisasi pada pos ini menunjukkan bahwa selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat kebutuhan mendesak dan/atau keadaan darurat yang memerlukan penggunaan anggaran secara signifikan pada belanja tidak terduga.

Secara keseluruhan, realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah telah berjalan cukup efektif. Meskipun demikian, optimalisasi penyerapan anggaran masih perlu terus ditingkatkan, khususnya pada beberapa komponen belanja yang realisasinya belum mencapai target, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih maksimal.

untuk melihat capaian kinerja belanja tahun 2025 ini dibandingkan dengan Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.22
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	2025			2024		
		anggaran	realisasi	%	anggaran	realisasi	%
1	2	3	4	6,00	7	8	9
5	BELANJA DAERAH	851.009.111.090,00	765.450.084.970,00	89,95	801.754.372.153,00	742.725.057.279,00	92,64
5.1	BELANJA OPERASI	738.081.315.556,00	671.418.452.358,00	90,97	720.831.493.412,00	668.220.386.847,00	92,70
5.1.01	Belanja Pegawai	427.783.039.819,00	381.919.511.232,00	89,28	411.101.158.831,00	376.394.619.531,00	91,56
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.002.812.574,00	266.704.269.431,00	92,93	278.576.642.568,00	261.363.190.982,00	93,82
5.1.05	Belanja Hibah	22.270.963.163,00	21.829.971.695,00	98,02	27.872.884.813,00	27.373.461.334,00	98,21
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.024.500.000,00	964.700.000,00	94,16	3.280.807.200,00	3.089.115.000,00	94,16
	JUMLAH BELANJA OPERASI	738.081.315.556,00	671.418.452.358,00	90,97	720.831.493.412,00	668.220.386.847,00	92,70
5.2	BELANJA MODAL	106.201.784.050,00	94.027.132.612,00	88,54	79.695.229.741,00	73.985.819.648,00	92,84
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.647.190.400,00	1.598.164.430,00	97,02	1.031.232.950,00	834.832.535,00	80,95
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.700.361.892,00	38.662.905.255,00	82,79	25.278.135.102,00	21.973.427.518,00	86,93
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.429.352.556,00	26.140.617.432,00	88,82	19.368.489.189,00	17.929.842.688,00	92,57
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.167.197.162,00	25.423.870.469,00	97,16	31.537.223.750,00	30.784.644.322,00	97,61
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.234.682.040,00	2.178.598.026,00	97,49	2.476.148.750,00	2.459.672.585,00	99,33
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	23.000.000,00	22.977.000,00	99,90	4.000.000,00	3.400.000,00	85,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	106.201.784.050,00	94.027.132.612,00	88,54	79.695.229.741,00	73.985.819.648,00	92,84
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.726.011.484,00	4.500.000,00	0,07	1.227.649.000,00	518.850.784,00	42,26
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.726.011.484,00	4.500.000,00	0,07	1.227.649.000,00	518.850.784,00	42,26
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	6.726.011.484,00	4.500.000,00	0,07	1.227.649.000,00	518.850.784,00	42,26
	JUMLAH BELANJA	851.009.111.090,00	765.450.084.970,00	89,95	801.754.372.153,00	742.725.057.279,00	92,64

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja belanja Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025, dapat dijelaskan bahwa secara umum realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan secara nominal dibandingkan Tahun Anggaran 2024, namun persentase capaian kinerjanya mengalami penurunan. Pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp801.754.372.153,00 dan direalisasikan sebesar Rp742.725.057.279,00 atau 92,64%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp851.009.111.090,00 dan direalisasikan sebesar Rp765.450.084.970,00 atau 89,95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi belanja meningkat sebesar Rp22.725.027.691,00, tingkat capaian kinerja menurun sebesar 2,69 poin persentase.

Penurunan capaian tersebut terutama terlihat pada kelompok Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp671.418.452.358,00 atau 90,97%, lebih tinggi secara nominal dibanding Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp668.220.386.847,00, namun lebih rendah dari sisi capaian dibanding 92,70% pada Tahun 2024. Demikian pula Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp94.027.132.612,00 atau 88,54%, meningkat dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp73.985.819.648,00,

tetapi menurun dari sisi capaian dibanding 92,84% pada Tahun 2024. Adapun Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 hanya terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau 0,07%, yang menunjukkan bahwa selama tahun berjalan tidak terdapat kebutuhan darurat yang signifikan. Dengan demikian, peningkatan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi penyerapan anggaran, sehingga ke depan diperlukan penguatan perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan pengendalian anggaran agar capaian kinerja belanja daerah dapat lebih optimal.

c. Realisasi Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan Pembiayaan sebesar Rp88.214.057.575,00 dengan realisasi sebesar Rp88.214.057.575,00 atau sebesar 100,00 %. Adapun rincian target dan realisasi atas pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.23
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.214.057.575,00	88.214.057.575,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	88.214.057.575,00	88.214.057.575,00	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.214.057.575,00	88.214.057.575,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, dapat dijelaskan bahwa Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp88.214.057.575,00 dan direalisasikan sebesar Rp88.214.057.575,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi pembiayaan tersebut seluruhnya berasal dari kelompok Penerimaan Pembiayaan, yang juga dianggarkan sebesar Rp88.214.057.575,00 dan direalisasikan sebesar Rp88.214.057.575,00 atau 100,00%. Sumber utama penerimaan pembiayaan dimaksud berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp88.214.057.575,00, yang terealisasi sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang telah dianggarkan. Dengan demikian, pelaksanaan penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan optimal sesuai rencana.

Sementara itu, pada kelompok Pengeluaran Pembiayaan tidak terdapat alokasi anggaran dan tidak terdapat realisasi, sehingga jumlah Pengeluaran Pembiayaan tercatat sebesar Rp0,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah tidak melakukan pengeluaran pembiayaan, termasuk dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah. Secara keseluruhan, struktur pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa pembiayaan daerah sepenuhnya ditopang oleh penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya, tanpa adanya pengeluaran pembiayaan, sehingga pelaksanaan pembiayaan daerah dapat dinyatakan terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp 105.200.253.469 yang diperoleh dari :

PENDAPATAN 2025	782.436.280.864,00
BELANJA 2025	<u>765.450.084.970,00</u>
SURPLUS/DEFISIT	16.986.195.894,00
PEMBIAYAAN NETTO	<u>88.214.057.575,00</u>
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	105.200.253.469,00

Berdasarkan informasi diatas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp782.436.280.863,93, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp765.450.084.970,00, sehingga diperoleh surplus anggaran sebesar Rp16.986.195.893,93. Selain itu, pada tahun anggaran dimaksud terdapat realisasi pembiayaan neto sebesar Rp88.214.057.575,00. Dengan demikian, akumulasi antara surplus anggaran dan pembiayaan neto tersebut menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp105.200.253.468,93.

SiLPA tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 masih terdapat sisa sumber daya keuangan daerah yang belum dimanfaatkan dalam tahun berjalan dan akan menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya. Secara umum, kondisi ini mencerminkan bahwa realisasi pendapatan daerah mampu menutup realisasi belanja daerah, serta didukung oleh pembiayaan neto yang positif, sehingga pada akhir tahun anggaran pemerintah daerah mencatatkan SiLPA dalam

jumlah sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, posisi keuangan daerah pada akhir Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi dari setiap perangkat daerah. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2023 yang harus diperhatikan untuk penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Belum meratanya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh, SD dan SMP yang terakreditasi A masih sekitar 75%.
- b. Kekurangan Guru SD yang ASN (Guru kelas, Penjas dan Guru Agama) serta guru SMP pada mata pelajaran tertentu (BP, Keterampilan/TIK, Prakarya, Penjaskes) dan kekurangan ini akan bertambah karena ada yang pensiun serta berhalangan tetap (tidak bisa mengajar).
- c. Masih kurangnya kualitas serta terjadinya penurunan kualitas sarana prasarana pada beberapa sekolah.
- d. Masih rendahnya muatan Pendidikan karakter dan keagamaan pada sekolah negeri.

2. Urusan Kesehatan

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS;
- b. Terjadinya pergeseran gaya hidup berdampak pada pergeseran jenis penyakit yang sering muncul (dari Penyakit Menular menjadi Penyakit Tidak Menular); hipertensi, diabetes, TB, dll;
- c. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah penderita HIV;
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar.
- e. Peningkatan kasus penyakit menular
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS
- g. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal
- h. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- i. Belum tercapainya standarisasi pelayanan Kesehatan
- j. Kurangnya penanggulangan penyakit tidak menular
- k. Rendahnya upaya kesehatan berbasis masyarakat
- l. Rendahnya peran aktif masyarakat untuk hidup sehat

- m. Rendahnya upaya promotif dan preventif Kesehatan
- n. Masih rendahnya cakupan keluarga sehat

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pemenuhan infrastruktur perkotaan;
- b. Menurunnya kualitas pelayanan air bersih;
- c. Masih rendahnya ketersediaan bangunan pelengkap jalan;
- d. Belum maksimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
- f. Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan pemanfaatan ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman;
- b. Masih adanya rumah tidak layak huni;
- c. Masih tingginya kebutuhan rumah (backlog).
- d. Masih terdapatnya PSU Perumahan yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Payakumbuh

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Masih relatif tingginya kasus Narkoba;
- b. Masih relatif tingginya kasus penyakit masyarakat;
- c. Masih tingginya kasus pelanggaran PERDA;

6. Urusan Sosial

- a. Belum semua PPKS terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar ;
- b. Masih kurangnya fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas;
- c. Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- d. Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

- a. Masih rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan dan pengalaman pencari kerja;
- b. Masih kurangnya jiwa wirausaha, permodalan sehingga jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja tidak begitu nampak;
- c. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik yang muncul karena ketidaksesuaian antara spesifikasi lapangan kerja dengan ketersediaan sumber daya;
- d. Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja;

- e. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerja sama tenaga kerja ke luar negeri dan luar daerah.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat tidak diselesaikan karena pihak keluarga merasa keberatan untuk mengangkat kasusnya dengan pertimbangan menjaga nama baik keluarga;
 - b. Masih belum optimalnya pemenuhan terhadap hak-hak anak;
 - c. Belum semua stakeholder memahami konsep PUG.
 3. Urusan Pangan
 - a. Belum terpenuhinya ketersediaan energi sesuai dengan Pola Pangan Harapan;
 - b. Masih rendahnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standard AKE dan rendahnya pemanfaatan sumberdaya pangan local non beras non terigu;
 - c. Masih ditemukannya pangan segar yang belum aman dikonsumsi.
 - d. Masih tingginya fluktuasi harga pada beberapa komoditi pangan
 - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan
 4. Urusan Pertanahan
 - a. Banyak lahan yang belum bersertifikat;
 - b. Belum tuntasnya penyelesaian tanah Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP);
 5. Urusan Lingkungan Hidup
 - a. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung dan sumber mata air;
 - b. Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan dan pengelolaan sampah;
 - c. Belum memadainya sarana prasarana persampahan;
 - d. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sehat dalam berbagai macam aktifitas pembangunan;
 - e. Belum memadainya pengendalian pencemaran polutan dan kualitas udara (emisi kendaraan bermotor);
 - f. Belum optimalnya law enforcement (penegakan hukum) terhadap sanksi pelanggaran izin lingkungan.
 - g. Belum optimalnya pengelolaan sampah dalam hal pengurangan dan pemilahan sampah dari tingkat sumber.
 - h. Menurunnya kuantitas dan kualitas air permukaan.
 - i. Masih rendahnya capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL)
 6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Belum optimalnya proses pengelolaan administrasi dan dokumentasi kependudukan;
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Belum terpenuhinya SPM ditingkat kelurahan.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Kontrasepsi Prevalens Rate masih rendah;
 - b. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Payakumbuh yang lebih dipengaruhi oleh migrasi masuk penduduk;
 - c. Masih tingginya angka TFR (total fertility rate);
 - d. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya melaksanakan keluarga berencana;
 - e. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM Petugas KB;
 - f. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga.
9. Urusan Perhubungan
 - a. Belum tersedianya areal parkir baik penumpang maupun barang secara layak;
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku berlalu lintas yang baik;
 - c. Belum adanya sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan kenyamanan pengguna, keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah;
 - d. Belum optimalnya kualitas sarana prasarana perhubungan dan pengelolaan terminal penumpang;
 - e. Belum tersedianya terminal angkutan barang;
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik;
 - b. Belum optimalnya integrasi sistem informasi daerah yang telah tersedia dan cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan;
 - c. Terbatasnya kemampuan dan keahlian SDM dalam mengelola informasi dan komunikasi;
 - d. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur informatika.
11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a. Rendahnya jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas yang baik;
 - b. Belum optimalnya diversifikasi produk dan unit usaha koperasi-koperasi;
 - c. Lambatnya pertumbuhan skala usaha UMKM;
 - d. Belum terbangunnya kelembagaan UMKM yang kuat;
 - e. Kecenderungan menurunnya jumlah anggota koperasi karena koperasi sebagian besar belum berbasis syariah;
 - f. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi;
 - g. Masih terbatasnya partisipasi pengusaha pengolahan skala mikro melakukan promosi secara mandiri;
 - h. Masih kurangnya keinginan usaha pengolahan skala mikro untuk melakukan pemasaran secara online;
 - i. Masih kurangnya SDM pengelola usaha pengolahan skala mikro;
 - j. Masih terbatasnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha;
 - k. Masih terbatasnya akses permodalan dana CSR usaha pengolahan skala mikro ke BUMN dan pihak ketiga lainnya.
12. Urusan Penanaman Modal
 - a. Belum berkembangnya pola kemitraan dan kerja sama dengan investor baik dalam maupun luar negeri;

- b. Kurangnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi yang terbatas;
 - c. Rendahnya pertumbuhan realisasi investasi;
 - d. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung kawasan potensial investasi;
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- a. Kurangnya even-even olah raga dan kepemudaan;
 - b. Masih rendahnya prestasi atlet daerah;
 - c. Masih rendahnya peran organisasi olah raga dalam pembibitan dan pembinaan atlet muda berpotensi;
 - d. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang aktivitas latihan dan pertandingan olahraga;
 - e. Rendahnya aktifitas organisasi kepemudaan.
14. Urusan Statistik
- a. Belum adanya sistem data dan informasi sektoral yang terintegrasi dan terkini dari perangkat daerah.
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam penyelenggaraan urusan statistik
 - c. Tidak adanya SDM yang basicnya Ilmu Statistik
 - d. Saat ini urusan statistik dikelola oleh satu (1) orang
 - e. Kondisi kelembagaan yang mengelola urusan statistik belum ideal.
 - f. Ketersediaan anggaran yang minim untuk kegiatan statistik
 - g. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk kegiatan statistik
 - h. Tidak adanya Bidang /bagian yang fokus mengelola urusan statistik, artinya kegiatan statistik dikelola pada tingkat eselon 4/setingkat seksi.
15. Urusan Persandian
- a. Belum terukurnya persentase pemenuhan NSPK keamanan informasi
 - b. Domain kebijakan internal kebijakan informasi masih pada tingkat internal dinas
 - b. Masih belum maksimalnya indeks domain terkait kegiatan keamanan informasi
16. Urusan Kebudayaan
- a. Belum optimalnya pengelolaan seni dan budaya sebagai aset berharga daerah;
 - b. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya;
 - c. Masih kurangnya peran lembaga sosial keagamaan dan ninik mamak dalam membentuk karakter masyarakat;
 - d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pemuda tentang nilai-nilai sosial budaya serta adat istiadat.
 - e. Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya.
 - f. Belum adanya penetapan benda dan tradisi bersejarah di Kota Payakumbuh sebagai warisan budaya dan cagar budaya.
 - g. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Payakumbuh.

- h. Belum tersedianya sarana dan prasarana permuseuman.
- i. Perlunya penyesuaian nomenklatur dinas untuk menunjang program kebudayaan.

17. Urusan Perpustakaan

- a. Masih terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh informasi melalui buku;
- b. Masih rendahnya minat baca masyarakat, hal ini terlihat dari relatif kecilnya jumlah keanggotaan perpustakaan dan jumlah pengunjung.
- c. Masih kurangnya tenaga pustakawan khususnya untuk kendaraan perpustakaan keliling untuk menjangkau kelurahan dan sekolah-sekolah.
- d. Belum tersedia gedung perpustakaan yang representatif.

18. Urusan Kearsipan

- a. Belum tersedianya depo arsip dan masih terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan;
- b. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
- c. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah akan pentingnya arsip serta proses dan alur pelaksanaan kearsipan sesuai dengan regulasi yang ada.

Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Manajemen skala usaha perikanan masih rendah;
- b. Masih rendahnya produktifitas hasil perikanan;
- c. Belum terpenuhinya infrastruktur pendukung usaha perikanan;
- d. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kecakapan petani ikan;
- e. Rendahnya daya saing produk perikanan.

2. Urusan Pariwisata

- a. Rendahnya kunjungan wisata dan rata-rata lama kunjungan wisatawan;
- b. Masih kurangnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pariwisata;
- c. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan serapan tenaga kerja;
- d. Belum terbangunnya kemitraan dan kerjasama dengan daerah lain dalam mengembangkan pariwisata;
- e. Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata.

3. Urusan Pertanian

- a. Pertumbuhan jumlah populasi ternak cenderung stagnan, sehingga masuknya daging dari luar untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah;
- b. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
- c. Manajemen skala usaha pertanian pada umumnya masih rendah, sehingga potensi sektor pertanian tidak tergali;
- d. Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian Kota Payakumbuh;
- e. Berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian;
- f. Belum terpenuhinya infrastruktur pendukung usaha pertanian;
- g. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kecakapan petani;
- h. Belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh;

- i. Belum optimalnya nilai produksi pertanian;
 - j. Terjadinya pengrusakan lahan yang berdampak pada lahan pertanian;
 - k. Terjadinya penurunan tingkat kesuburan lahan pertanian (degradasi lahan);
 - l. Belum optimalnya penerapan inovasi teknologi anjuran.
4. Urusan Perdagangan
- a. Daya saing bisnis perdagangan Payakumbuh masih rendah;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran produk;
 - c. Belum optimalnya Infrastruktur pasar yang representatif;
 - d. Masih belum optimalnya penataan pusat perdagangan;
 - e. Usaha pedagang besar belum punya gudang di area yang telah ditentukan di sepanjang jalan lingkaran utara;
 - f. Belum adanya pasar tertib ukur;
 - g. Belum tertatanya pedagang kaki lima yang cepat dan cenderung tidak terkendali, sehingga menimbulkan eksternalitas negatif bagi sektor lainnya;
 - h. Terdapatnya fluktuasi harga kebutuhan pokok di Kota Payakumbuh;
 - i. Terbatasnya pemanfaatan kerjasama perdagangan antar provinsi untuk memperluas jaringan perdagangan pasar lokal.
5. Urusan Perindustrian
- a. Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk industri;
 - b. Belum optimalnya pengemasan produk industri;
 - c. Limbah industri kecil belum dikelola dengan baik.
 - d. Masih rendahnya SDM pengelola industri dalam hal manajemen (Bahan baku, proses produksi, tenaga kerja dan pemasaran)
 - e. Ketersediaan bahan baku industri.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan
- a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Masih belum semua target program pembangunan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan.
2. Urusan Keuangan
- a. Belum ada pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, dan atau melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta;
 - b. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas;
 - c. Potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah belum tergali secara optimal;
 - d. Belum optimalnya Pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
3. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
- a. Belum optimalnya Manajemen ASN;
 - b. Rendahnya Profesionalisme ASN;
4. Urusan Penelitian dan Pengembangan
- a. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik;

- b. Belum adanya kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan (Dewan Riset Daerah).

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1) VISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

Gambaran kondisi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan adalah meningkatnya kualitas Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, yang didukung dengan kinerja aparatur sepenuh hati dan penuh integritas, sehingga Payakumbuh maju, sehat, dan sejahtera dapat diwujudkan. Merujuk kepada pengumuman Komisi Pemilihan Umum nomor 27/PL.02.2-Pu/1376/2024 tentang visi, misi dan program pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh tahun 2024 dan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih adalah “Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, Dan Sentra Umkm Yang Kompetitif”

Visi ini selanjutnya akan menjadi visi kota Payakumbuh yang menjadi arah pandang semua komponen penyelenggara pemerintahan, Masyarakat dan seluruh stakeholders untuk menyatukan gerak dan langkah dalam Pembangunan kota Payakumbuh. Berdasarkan pendekatan perencanaan secara politis maka pada visi ini terdapat penekanan kebijakan daerah sehingga tanpa mengubah substansi politik. Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Payakumbuh meliputi wilayah Payakumbuh dengan kesatuan geografis, kesatuan demografis dan kesatuan budaya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dan berkembang sejak Pemerintah Kotamadya Payakumbuh disahkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970.

Maju memiliki arti menjadi **terdepan dan unggul** hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai kualitas hidup yang relatif tinggi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan infrastruktur, sarana dan utilitas yang memperhatikan efek keberlanjutan lingkungan. Kota maju merupakan sebuah kota yang dipahami maju dari kedua belah pihak: dari kota dan juga masyarakatnya. Kota yang maju tidak hanya terlihat pada ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, tetapi juga pada masyarakatnya yang seimbang baik dari segi kualitas dan juga distribusi kesejahteraannya. Kota yang maju juga ditandai dengan dukungan oleh infrastruktur yang memadai untuk memastikan kualitas hidup yang lebih tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi.

Bermartabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “bermartabat” yaitu memiliki harga diri, kesadaran, dan kebanggaan akan identitas dan jati diri. Kota yang bermartabat memberikan kepercayaan dari masyarakatnya bahwa Kota mereka memiliki karakteristik yang menjadikan mereka bangga akan kotanya.

Harga diri menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluralitas budaya yang ada disekitar kita. Oleh karena itu untuk memunculkan sebuah kota yang bermartabat, kota tersebut harus mampu memberikan kualitas hidup yang tinggi, kemajuan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, pola pemerintahan yang efektif dan efisien serta keberlanjutan terhadap lingkungan perkotaan, kebudayaan dan identitas jati diri kota.

Pemberdayaan adalah proses membangun dan meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian individu, kelompok, atau masyarakat untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan dilaksanakan pada berbagai bidang, tidak hanya pada kemampuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam menghadapi masalah sosial ataupun berpartisipasi dalam proses politik dan memperjuangkan hak-hak mereka tetapi juga pemberdayaan lingkungan dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Pemberdayaan selain meningkatkan kemampuan, dan kemandirian juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi individu atau kelompok dalam proses pembangunan sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup, dan tercapainya keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Pengembangan Kualitas Pendidikan adalah proses meningkatkan atau memperbaiki kemampuan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Pengembangan diartikan adalah peningkatan yang sifatnya tematik, dan parsial tetapi berkelanjutan. Kualitas pendidikan yang baik dipengaruhi oleh kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi guru, infrastruktur, dan tata kelola pendidikan. Pengembangan yang diharapkan dilakukan per-individu melalui peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan individu, pengembangan organisasi melalui peningkatan kemampuan, efisiensi dan efektivitas dan pengembangan masyarakat melalui meningkatkan kualitas hidup, serta memiliki kemampuan bersaing dan berinovasi. Kualitas pendidikan yang baik dipengaruhi oleh kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi guru, infrastruktur, dan tata kelola pendidikan. Walaupun begitu tidak hanya faktor internal saja yang diperhatikan, tetapi juga faktor luar diantaranya Kondisi sosial ekonomi: Kemiskinan, malnutrisi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang berdampak negatif pada prestasi siswa. Pengembangan kualitas pendidikan diharapkan mendorong budaya pendidikan yang menghargai pendidikan

Sentra UMKM yang Kompetitif adalah Sentra UMKM yang memiliki kemampuan atau keadaan di mana produk dapat bersaing dengan efektif dalam lingkungan yang sama. Secara literal sentra UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah suatu lokasi atau kawasan yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Tetapi secara konsep pembentukan Sentra UMKM bertujuan untuk memudahkan pembinaan dan pengembangan kapasitas UMKM karena ter-konsentrasi pada satu wilayah, dan memudahkan dalam penyediaan fasilitas pendukung, baik infrastruktur

maupun utilitas, serta memudahkan pengelolaan manajemen dan perluasan akses pasar. Sehingga nantinya UMKM tersebut akan meningkat kemampuan produksi, manajemen, pemasaran, dan pendapatan UMKM yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Jadi sentra UMKM yang kompetitif merupakan sentra UMKM yang dalam konteks bisnis, memiliki kemampuan untuk meningkatkan pangsa pasar, pendapatan, pengembangan produk atau jasa yang inovatif, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu juga mampu meningkatkan keterampilan, prestasi dan pencapaiannya hingga siap bersaing dengan kabupaten/kota lainnya.

Dari uraian visi dapat dituangkan pokok-pokok visi adalah maju, sehat dan sejahtera: dari kota yang maju, masyarakat yang sehat akan melahirkan Payakumbuh yang sejahtera. Walaupun diungkap dalam susunan kata dan kalimat yang berbeda, namun ketiga pokok visi tersebut memiliki isi, esensi, pesan, dan makna yang saling mengait dan melanjutkan, antara yang awal dan yang kemudian, yang bertujuan untuk melahirkan arahan rinci program yang sesuai dengan konteks permasalahan dan bahasa perencanaan.

Dengan visi ini dapat diartikan bahwa pemerintah berkomitmen, konsisten dan berupaya dalam menyediakan sebuah kota, kota Payakumbuh yang maju dan bermartabat melalui pemberdayaan dan pengembangan warga dan kotanya dengan peningkatan kualitas dan kompetensi pada sektor pendidikan dan UMKM. Dengan harapan ***Kota Payakumbuh mampu bertransformasi dari kota persinggahan menjadi kota destinasi; destinasi pendidikan, destinasi kesehatan, destinasi kuliner, seni budaya dan olahraga***. Untuk mencapai Payakumbuh maju dan bermartabat tersebut, dapat dilihat dari pencapaian sasaran visi sebagaimana tabel. 1.25. Beberapa target sasaran visi ini mengacu pada target imperative sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 050-459-2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 1.24 Sasaran Visi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASE-LINE 2024	TARGET					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	64,21	72,02	82,14	92,57	103,84	116,29	129,51
		2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,82	4,95	5,06	5,17	5,31	5,43	5,55

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASE-LINE 2024	TARGET					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	3. Tingkat Kemiskinan (%)	5,19	4,54	4,32	4,17	3,99	3,84	3,63
		4. Rasio Gini (indeks)	0,313	0,311	0,310	0,309	0,308	0,306	0,305
		5. Pertumbuhan ekonomi (%)	4,53	5,02	5,79	7,12	7,36	7,65	6,22
3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,078 8	3,400 0	3,415 0	3,440 0	3,463 0	3,482 4	3,500 0
		7. Indeks Inovasi Daerah	54,62	54,85	55,15	55,25	55,50	55,95	56,05
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	8. Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	80,76	81,43	81,97	82,50	83,09	83,79	84,23
		9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Tenaga Kerja)	70,58	70,80	71,50	72,02	73,3	74,03	75
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,52	68,37	68,56	68,74	68,97	69,20	69,43

Sumber: RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

2) MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama “Mewujudkan SDM yang berkualitas”. Mewujudkan SDM yang berkualitas dimaksudkan untuk melahirkan SDM yang memiliki kemampuan, pengetahuan, loyal, dan sikap yang dapat meningkatkan kinerja didukung dengan kesehatan yang baik. Karakteristik SDM yang berkualitas akan tercapai jika memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kepercayaan diri, watak yang dinamis, siap menghadapi perubahan, memiliki keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan, memiliki sikap toleransi yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, mampu bekerjasama dengan pihak lain, memahami bidangnya, mempunyai watak yang bermoral tinggi antara lain: jujur, menepati janji serta peka dengan hak dan kepentingan pihak lain. Sumber daya manusia yang berkualitas menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: *intelligence, creativity dan imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, sehingga produktivitasnya meningkat dan mampu bersaing dengan SDM daerah lain. Intinya SDM yang berkualitas menyangkut aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik). Kondisi ini diharapkan melahirkan SDM yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi, maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Misi Kedua: “Mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif” Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, dan mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat, dan meningkatkan investasi di Kota Payakumbuh. Salah satu amanah pembangunan adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Payakumbuh diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran, mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri. Memastikan keterjangkauan dan kestabilan harga-harga kebutuhan pokok terutama bagi masyarakat tidak mampu. Menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Payakumbuh. Lokomotif perekonomian Kota Payakumbuh merupakan sektor potensial yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat namun mengedepankan potensi lokal sebagai motor dan pilar utama perekonomian guna kemandirian ekonomi lokal dan daya saing daerah. Sampai tahun 2024, tiga sektor penyumbang utama PDRB Kota Payakumbuh adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (25,02%), sektor konstruksi (13,64) serta sektor Transportasi dan Pergudangan (11,82%).

Misi Ketiga: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif” Pemerintah memegang peranan penting bagi perkembangan daerah melalui fungsi sebagai regulator serta fasilitator. Dukungan pemerintah dalam pembangunan daerah harus didukung oleh layanan publik yang prima. Untuk mencapai kondisi layanan prima tersebut perlu terwujud pemerintahan

yang baik (**good government**) dan tata kelola yang baik (**good governance**). Layanan publik perlu didukung birokrasi yang bersih agar tidak menimbulkan biaya birokrasi tinggi. Pelayanan publik juga diharapkan mampu dinamis dan tangkas menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin bervariasi kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi sehingga tata kelola pemerintah dapat berjalan efektif. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi.

Misi Keempat: “Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat” Kebudayaan menjadi aset utama pembangunan. Kota Payakumbuh sebagai pusat perekonomian luak 50 tidak bisa mengesampingkan sejarah panjang Kota Payakumbuh yang mewariskan generasi saat ini dengan budaya, kesenian dan aspirasi kebudayaan lainnya untuk dikembangkan dengan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kebudayaan-kebudayaan lokal akan didorong untuk terus dikembangkan, tidak sekedar untuk melestarikan namun juga menjadi pemberi warna atas kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Payakumbuh. Kebudayaan juga tidak hanya dipandang sebagai kondisi statis, namun terus berkembang. Kreativitas masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebudayaan tetap terus relevan dalam perkembangan zaman. Kota Payakumbuh sejatinya adalah rumah besar bagi semua orang di luak limopuluah. Nilai-nilai kekeluargaan menjadi pusat gravitasi semua aktivitas individunya. Nilai moral, kesusilaan, agama dan religius digerakkan di lingkup masyarakat terkecil atau keluarga. Keluarga yang harmonis dan sehat secara mental juga akan melahirkan masyarakat yang mampu menempatkan dirinya dalam dinamika zaman yang terus berubah.

Misi Kelima: “Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan” Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang tertib, dan inklusif dengan pemenuhan infrastruktur kota yang memadai dan aman bagi setiap penghuninya terutama rasa aman bagi perempuan dan anak. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan layanan Pemerintah, serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan pengawasan keamanan di tempat-tempat publik serta respons atas pengaduan korban kekerasan secara baik dan cepat. Misi ini juga dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan pengelolaan tata ruang dan wilayah, mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas lingkungan di Kota Payakumbuh.

Tabel 1.25

Keterkaitan Visi dengan Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

VISI	POKOK- POKOK VISI	MISI
Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif	Maju	Misi Pertama: Mewujudkan SDM yang berkualitas Misi Ketiga: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif. Misi Kelima: Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan.
	Sehat	Misi Pertama: Mewujudkan SDM yang berkualitas
	Sejahtera	Misi Kedua: Mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif Misi Keempat: Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat

Sumber: RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Pokok-pokok visi dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Payakumbuh Maju:** Memiliki sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara lain menghadirkan pusat perbelanjaan yang nyaman melalui Revitalisasi dan modernisasi Pasar Tradisional Ibh tematik, tertata, rapi serta bersih. Selain itu juga pendidikan yang berkualitas dan menciptakan sumberdaya manusia yang kompetitif dan berdaya saing. Ditindaklanjuti melalui pemerataan pendidikan dasar dan mendukung sekolah rakyat serta memastikan kelanjutan pendidikan melalui insentif atau kerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Disamping itu juga maju dari sisi pemerintahan yang menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan kondusif dengan aparatur yang jujur dan loyal.
2. **Payakumbuh Sehat:** Peningkatan pelayanan kesehatan yang **paripurna**. Bidang kesehatan membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, peningkatan fasilitas dan pelayanan RSUD di Kota Payakumbuh. Juga meliputi Gizi Balita, TBC, Kelembagaan layanan kesehatan, kesehatan lingkungan dan sanitasi.
3. **Payakumbuh Sejahtera:** Peningkatan ekonomi masyarakat yang mampu bersaing dengan daerah sekitarnya, lapangan kerja yang berkualitas dengan prioritas pada kemandirian masyarakat secara sosial dan ekonomi dengan kawasan pilihan untuk produksi komoditas dari hulu ke hilir,

termasuk peningkatan ekonomi berbasis masjid serta partisipasi masyarakat dan dukungan pihak terkait.

3) TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis tingkat tinggi yang nantinya menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi Pertama: **“Mewujudkan SDM yang Berkualitas”**. Dimaksudkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berpendidikan, kesehatan yang baik sehingga mampu bersaing.

Tujuan: Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing

Sasaran:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan
3. Menurunkan tingkat kemiskinan
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak

Misi Kedua: **“Mewujudkan Iklim Ekonomi yang Kompetitif”**. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan inklusif.

Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif

Sasaran:

1. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat
2. Meningkatnya Sektor Strategis Berbasis Potensi Lokal
3. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah

Misi Ketiga: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif”**. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, serta mampu bersaing dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Meningkatnya pendapatan daerah
4. Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Misi Keempat: **“Mewujudkan Nuansa Imani Melalui Pendekatan Budaya dan Adat”**, dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, dengan tetap menghormati serta memanfaatkan kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat sebagai sarana dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Tujuan: Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK

Sasaran: Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

Misi Kelima: **“Mewujudkan Sarana Perkotaan yang Humanis Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan”**, dimaksudkan untuk menciptakan infrastruktur dan fasilitas kota yang nyaman bagi masyarakat, selaras dengan alam, serta dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan.

Tujuan: Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas .

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Tabel 1.26
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD untuk tahun 2025

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 1: Mewujudkan SDM yang Berkualitas							
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	75.31	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan dan pemerataan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat		
					Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan		Dinas Kesehatan
					Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan		
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	13.7		Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	5.81		Pengoptimalan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui kampanye pola hidup bersih dan sehat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kematian Ibu	2		Pengoptimalan Sistem pengawasan obat dan makanan		
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan	80		Peningkatan pengendalian		Dinas Kesehatan

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)			penyakit menular dan tidak menular.		
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	94		Pengembangan kemitraan dengan organisasi non- pemerintah dan swasta dalam mendukung kampanye imunisasi.		
					Dukungan Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak Balita.		Dinas Ketahanan Pangan
					Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat		Dinas Ketahanan Pangan

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14.62	Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan berkeadilan	Pemerataan dan peningkatan akses dan sarana prasarana Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi (%)	87,5		Peningkatan Kompetensi guru dan pengembangan guru berkarakter	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi (%)	84.4		Penguatan Pendidikan inklusif yang responsif untuk anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus		Dinas Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11.16		Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik		
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	21,70		Menyiapkan kebijakan yang mengatur tentang pendidikan sekolah negeri dan swasta		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	79.09		Meningkatkan pendidikan karakter, sehingga tercipta budaya yang berkarakter dan berakhlak		
					Pemberian insentif untuk Guru TPA, guru PAUD dan Guru Non ASN		
					Pemetaan kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan		
				Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat	Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat		Dinas Pustaka Arsip

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Mendorong layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT		Dinas Pustaka Arsip
				Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga	Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi		Dinas Parpora
					Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga		
					Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan		Dinas Parpora
							Dinas Parpora
				Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan/atau		Dinas Pendidikan

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					bagi yang memiliki berprestasi.		
3	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4.54	Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat	Perluasan cakupan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi masyarakat miskin, kelompok marginal dan rentan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100.00		Meningkatkan kualitas dan tata kelola data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi sebagai dasar dalam rancangan program yang lebih efektif dalam		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					mengurangi kemiskinan		
		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	31.38	Meningkatkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi	Meningkatkan pengentasan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani	5		Meningkatkan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis fakta		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		bidang ketenagakerjaan (orang)					
					Pemberian fasilitasi bantuan modal usaha dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin		Dinas Sosial
					Percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan graduasi yang terintegrasi		
					Pendampingan, monitoring dan		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					evaluasi pelaksanaan program kemiskinan		
					Pemberian insentif untuk tenaga relawan sosial		
					Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan		
					Peningkatan sarana dan prasarana penggulungan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					kesejahteraan sosial		
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66.8	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh kecamatan
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.151		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Indeks Perlindungan Khusus Anak	82.92		Penguatan dukungan anggaran operasional dan sarana dan		Seluruh kecamatan

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	63.89		Penyediaan insentif bagi petugas RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Tarunan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.		
					Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan keluarga dan kelompok masyarakat pada aspek sosial, ekonomi serta politik	Program Pemberdayaa n Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AP2K B

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak	Program Pengarusutam aan Gender Dan Pemberdayaa n Perempuan	DP3AP2K B
					Meningkatkan peran keluarga dalam melindungi hak-hak anak.		DP3AP2K B
					Meningkatkan peran serta perempuan dalam ketahanan keluarga		DP3AP2K B
					Meningkatkan peran serta Perempuan dan anak dalam pembangunan		
				Meningkatkan Pengendalian	Fasilitasi pembimbingan, pengembangan		DP3AP2K B

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
				penduduk Ketahanan Keluarga	dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 hari pertama kelahiran.		
					Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
					Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga		Dinas Ketahanan Pangan
					Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan		Dinas Ketahanan Pangan

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					kelompok masyarakat		
					Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal		
Misi 2: Mewujudkan Iklim Ekonomi Yang Kompetitif							
5	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0.311	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Nakerin

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4.75		Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi bagi masyarakat.		Dinas Nakerin
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/ tenaga kerja)	70,8	Meningkatkan kesempatan kerja	Memperkuat kerjasama, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap dan/atau menciptakan lapangan kerja baru		Dinas Nakerin
		Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	53.81		Mengembangkan kluster industri dan inkubasi bisnis dalam penciptaan pengusaha baru		Sekretariat Daerah
		Rasio Kewirausahaan (%)	9.3		Meningkatkan kualitas SDM <i>entrepreneur</i> melalui		Dinas Nakerin

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					pemberdayaan, pendampingan serta pendidikan formal dan informal		
6	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	33.34	Meningkatkan kualitas Usaha mikro dan koperasi	Mendorong peningkatan skala usaha mikro melalui penguatan modal Usaha mikro	Program Pengembang an Umkm	Dinas Koperasi & UKM
		Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	4.69		Penguatan proses bisnis dan kapasitas layanan Usaha mikro melalui perluasan peran ekosistem digital	Program Pemberdayaa n UMKM	
		Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	2.365		Perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis		
		Proporsi jumlah IKM (%)	3.43		Peningkatan produktivitas dan		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal.		
		Ketersediaan Pangan Utama (ton)	19,785		Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro.		
		Stabilisasi Harga Beras (%)	≤ 10		Penataan basis data dan penyederhanaan regulasi pemberdayaan usaha mikro, pengembangan kewirausahaan, dan koperasi	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
		Stabilisasi Harga Cabe (%)	≤ 25		Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar		
		Stabilisasi Harga Bawang (%)	≤ 25		Penguatan kelembagaan Koperasi	Program Pemberdayaa n dan	Dinas Koperasi dan UKM

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
						Perlindungan Koperasi	
		Tingkat Inflasi	0		Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi.		
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	19.7		Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan koperasi merah putih	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	4.95	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	Meningkatkan upaya pengendalian harga pangan strategis (inflasi daerah).	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi & UKM
		Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (%)	3.6		Revitalisasi dan penataan pasar tradisional, pertokoan Payakumbuh dan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi & UKM

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pedagang Kaki Lima		
		Jumlah Tamu wisatawan mancanegara	0,02		Penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi & UKM
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang)	35.27		Mendorong pertumbuhan dan menciptakan iklim yg kondusif serta perluasan pangsa pasar yang potensial.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi & UKM
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB	3,595		Peningkatan kualitas, inovasi dan promosi perdagangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

Sampai
361

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ekonomi Kreatif Provinsi (%)			secara berkelanjutan.		
		ROA BUMD (%)	6.18	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Mendorong bertumbuhnya industri dari hulu ke hilir	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Nakerin
					Penguatan kelembagaan sentra-sentra industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Nakerin
					Meningkatnya industri halal dan standarisasi produk sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kot a	Dinas Nakerin
					Penguatan infrastruktur		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					pendukung industri.		
					Mendorong pengembangan layanan usaha, pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan kemudahan akses pembiayaan usaha		
					Peningkatan kualitas pendataan dan pengawasan industri		
				Menumbuhkembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif	Inovasi pariwisata berkelanjutan (<i>Sustainability Tourism</i>) dan berbasis komunitas (<i>Community Based</i>	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Parpora

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					<i>Tourism</i>), budaya dan kearifan lokal		
					Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh antara lain melalui pelaksanaan <i>event-event</i> pariwisata, budaya dan olah raga	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Parpora
					Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industry pariwisata yang adaptif		
					Diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					mancanegara dan wisata nusantara		
					Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM dengan Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan UMKM melalui penyediaan akses pelatihan, pembiayaan, serta pemasaran produk produk lokal, terutama yang dapat diekspor ke negara negara <i>Global South</i> serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berinovasi dalam produk dan		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					layanan yang mendukung keberlanjutan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing		
				Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor jasa pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan dukungan terhadap pendidikan tinggi dan vokasi menjadi kampus dan sekolah unggulan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Mengoptimalkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan fungsi pelayanan perdagangan dan jasa di Kota Payakumbuh dengan menata	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi & UKM

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					kembali pusat- pusat kegiatan		
					Meningkatkan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang memadai	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Nakerin
					Meningkatkan ketersediaan ruang usaha bagi pengusaha informal, mikro dan kecil di Kora Payakumbuh	Program Penyelenggara an Penataan Ruang	Dinas PUPR
						Program Pengembang an Umkm	Dinas Koperasi & UKM
				Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing pertanian,	Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan pengolahan hasil pertanian		
					Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian, untuk petani/kelompok tani	Program Penyediaan Dan Pengembanga n Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Penguatan infrastruktur pertanian	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKD
					Meningkatkan pengawasan penerapan LP2B dengan penerapan insentif dan disinsentif penggunaan lahan		
						Program Pengendalian Kesehatan	Dinas Pertanian

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Peningkatan kualitas SDM petani	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian
					Pembinaan dan pengembangan komoditi pertanian (padi, jagung, cabe, bawang, jamur	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Meningkatkan ketersediaan pangan		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatkan Penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan	Optimalisasi upaya sirkular ekonomi (pengelolaan sampah, produksi dan konsumsi berkelanjutan)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkung an Hidup
					Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi pekerjaan sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan usaha/industri ramah lingkungan	Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati (Kehati)	Dinas Lingkung an Hidup
					Pengawasan dan pengendalian pencemaran	Program Perekonomian Dan	Setdako

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					lingkungan akibat kegiatan ekonomi	Pembangunan (Bagian PBJ)	
7	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rp)	660	Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Peningkatan data potensi dan peluang investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMDPTS P
		Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	6		Peningkatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMDPTS P
		Nilai Transaksi Saham Per Kapita (rupiah)	3,891,998		Peningkatan upaya promosi investasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi penanaman Modal	DPMDPTS P
		Total Kredit/PDRB (%)	24.4		Meningkatkan kualitas layanan PTSP kepada		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					masyarakat dan dunia usaha.		
		Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan (%)	6.05		Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Nakerperin
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24.86				
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif							
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3.75	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pengoptimalan layanan publik masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Indeks Pelayanan Publik	4.51		Peningkatan fasilitas dan koordinasi kerjasama daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a (Sekretariat Daerah)	Setdako
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.60			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekwan
					Optimalisasi pengelolaan arsip daerah	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Pustaka Arsip
				Mengembangkan pemerintahan berbasis digital	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penguatan aspek pemerintahan digital melalui implementasi SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
					Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
					Meningkatkan penerapan <i>Smart city</i>		
					Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, termasuk penerapan sistem berbasis cloud untuk administrasi	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					pemerintahan dan sistem pembayaran pajak online yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.		
	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP	78.00	Mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi	Penataan organisasi dan kelembagaan yang tepat fungsi dan adaptif	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Opini BPK atas laporan keuangan (opini)	WTP		Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a (Bagian Organisasi)	Setdako

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah	3.4000		Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi antar lembaga		
		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (indeks)	52				
		Indeks Reformasi Hukum (nilai)	87.2	Mewujudkan SDM Aparatur yang berkualitas	Peningkatan kualitas ASN yang professional dan bebas korupsi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Indeks Inovasi Daerah	54.85		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
					Peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					berdasarkan capaian kinerja.		
					Optimalisasi pemenuhan sumber daya aparatur berbasis kebutuhan		
				Meningkatkan transparansi dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.	Program Penyelenggara an Pengawasan	Inspektorat
					Mengoptimalkan pengembangan	Program Penelitian Dan	Bappeda

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan publik	Pengembangan Daerah	
					Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD
					Optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKD
					Optimalisasi pengelolaan asset-aset daerah, terutama aset sekolah, sarana kesehatan, aset		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					pasar, perkantoran dan infrastruktur.		
					Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Lima Puluh Kota, terkait dengan pengelolaan aset		
					Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggara an Pengawasan	Inspektorat
					Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Internal Pemerintah (APIP)		
					Optimalisasi kualitas pengadaan barang dan jasa	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Setdako
					Peningkatan fasilitasi dan koordinasi bidang hukum		
					Peningkatan kebijakan bidang perekonomian		
					Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Semua Perangkat Daerah

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	0.17	Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah	Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKD
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.35	Pengembangan BUMD	Peningkatan kualitas layanan BUMD	Program Pengelolaan BMD	BKD
					Kerjasama BUMD dengan pihak lain		
					Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMD		
11	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	5	Meningkatkan ketertiban umum dan pelayanan perlindungan masyarakat	Peningkatan fasilitas dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP & Damkar

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penegakan Perda	100		Peningkatan kemampuan personal pelayanan ketertiban dan penanganan situasi darurat		
		Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)	3.84		Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan penegak hukum, masyarakat dan stake holders	Program Pencegahan, Penanggulang an, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pol PP Damkar
		Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif	91.95		Meningkatkan pengamalan pancasila, demokrasi dan HAM dalam	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangp ol

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					kehidupan bermasyarakat		
		Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan	100		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga pendidikan Melalui Etika Serta Budaya Politik, Pendidikan Politik Dan pengembangan	Kesbangp ol
		Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat	100		Penguatan peran serta dan koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya	Program Pemberdayaa n Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangp ol

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
						Program Pembinaan Dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kesbangp ol
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangp ol
		Indeks Risiko Bencana (IRBI)	103.52	Meningkatkan kualitas pelayanan Penanggulangan Bencana	Mengembangkan sistim informasi kebencanaan yang valid secara terbuka ke masyarakat	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Mengembangkan sistim deteksi dini kebencanaan	Program Penanggulang an Bencana	BPBD
					Memperkuat masyarakat tangguh bencana	Program Pencegahan Penanggulang an, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	BPBD
					Meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
					Penguatan mitigasi bencana pada saat		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					bencana dan pasca bencana.		
Misi 4: Mewujudkan Nuansa Iman Melalui Pendekatan Budaya dan Adat							
12	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Karya Budaya yang Ditetapkan	1	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan	Meningkatkan penguatan pendidikan karakter berbasis agama kepada tenaga pendidik dan siswa	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
		Cakupan Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%)	58.35		Pemberian insentif kepada guru TPA dan Garin masjid		
					Pemberian bantuan operasional sarana ibadah di Kota Payakumbuh	Program Pemerintahan Dan Kesra (Bagian Kesra)	Setdako

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengembangan kelurahan madani		
					Mendorong munculnya kader ulama pembina umat dari mesjid		
					Peningkatan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat		
				Meningkatkan pengembangan kebudayaan	Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga adat dalam mendukung kebudayaan	Program Pengembang an Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
					Pelestarian adat dan budaya dengan pendekatan ABS SBK melalui edukasi dan digitalisasi	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Meningkatnya upaya penggalian dan penyelamatan literasi sejarah, budaya dan cagar budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
					Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan melalui pengembangan kegiatan bernuansa kebudayaan.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kesbangp ol
						Program Penguatan Ideologi Pancasila dan	Kasbangp ol

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
						Karakter Kebangsaan	
Misi 5: Mewujudkan Sarana Perkotaan yang Humanis Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan							
13	Meningkatnya dan kualitas lingkungan hidup	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	19.68	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Menigkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), taman kota dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).	Program Pengelolaan Dan Pengembang an Sistem penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
		Indeks Kualitas Lahan (indeks)	52.73		Meningkatnya pengelolaan limbah domestik dan non domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembang an Sistem drainase	Dinas PUPR
		RT dengan Akses Sanitasi Aman (%)	20.48		Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan	Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	33,13		Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
				Meningkatkan pengelolaan persampahan secara terpadu dan komprehensif.	Intensifikasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas LH
					Meningkatkan kualitas sarana prasarana pengelolaan persampahan kota	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPR

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi pengelolaan sampah kota, ditingkat sumber dan Kawasan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkung an Hidup
					Memperkuat kelembagaan dan regulasi pengelolaan persampahan kota, termasuk tingkat lokal dan non formal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR dan dinas PKP
					Optimalisasi penyediaan anggaran pengelolaan sampah		
					Meningkatkan upaya		

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					desentralisasi pengelolaan sampah		
				Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana, utilitas (PSU) permukiman	Program Pengembang an Perumahan	Dinas PKP
					Meningkatkan akses kepemilikan rumah dan hunian yang layak		
					Bantuan sanitasi dan peningkatan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah.		
					Pencegahan dan revitalisasi kawasan kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas PKP

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ikut memsukkseskan program strategis nasional 3 juta rumah		
14	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	64.09	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan ramah lingkungan	Pengembangan kawasan strategis perkotaan	Program Penyelenggara an Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubung an
		Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	82.73		Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pembangunan <i>Smart Transportation</i> (termasuk konektivitas dengan destinasi wisata luak nan bungsu)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PKP

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)	1,273		Ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran pemerintahan yang memadai	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem drainase	Dinas PUPR
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	5.21		Meningkatkan kualitas infrastruktur layanan dasar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	90.41		Penataan parkir yang representatif	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
					Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana dan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas PUPR

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGK AT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					prasarana perkotaan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR
						Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
				Meningkatkan kualitas penataan kota	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
					Optimalisasi penataan kota dan pedestrian		

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD

Dari program yang ada dalam Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, dalam RKPD Kota Payakumbuh tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan seperti yang terlihat pada tabel 1.27

Tabel 1.27
Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Dinas Pendidikan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Pendidikan	80 Nilai 88,50 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	93 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi pelaporan barang milik daerah	91 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Dinas Pendidikan sesuai standar	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	88 Persen	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	88 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS); Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	100 % 100 % 74,55 % 98 %	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/SMP terakreditasi A	76,24 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SD/SMP terakreditasi A	76,24 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentasi PAUD terakreditasi B	76,50 %	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Dikmas terakreditasi B	66,67 Persen	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih; Persentase sekolah yang dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang divalidasi	51;72 %	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Indeks Pemerataan Guru	58 % 81 %	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)	95 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Dinas Kesehatan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian yang diadakan	430 Paket	DINAS KESEHATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kegiatan administrasi perkantoran yang tersedia	6 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	107 unit	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan penunjang perkantoran yang tersedia	2 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	20 Unit	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana, prasarana, alat kesehatan dan penunjang fasilitas kesehatan yang disediakan sesuai standar	11 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen pengelolaan Informasi Kesehatan yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS sesuai standar yang diterbitkan izin operasional	4 Dokumen	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan sesuai standar	100 %	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SDM Kesehatan yang tersedia	2 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya	5 Orang	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik,toko obat,dll) yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan	100 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen izin fasilitas pelayanan kefarmasian yang diterbitkan	1 dokumen	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah dokumen penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan NO PIRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	1 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen sertifikat laik sehat yang tersedia Jumlah dokumen Sertifikat P- IRT yang diterbitkan	1 dokumen 1 Dokumen	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan gernas pada masyarakat	100 %	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakat yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Promkes yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 dokumen	DINAS KESEHATAN
UPT RSUD dr Adnaan WD			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Ibul			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Parit Rantang			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Payolansek			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Tiakar			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Air Tabit			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Puskesmas Tarok			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Lampasi			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk pelayan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Padang Karambia			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
UPTD Instalasi Farmasi			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana, prasarana, alat kesehatan dan penunjang fasilitas kesehatan yang disediakan sesuai standar	11 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	94,00 indeks 94,00 Nilai	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan Persentase Kesesuaian Renja dan Renstra	100 % 98,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan SKPD	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berprilaku Disiplin Persentase ASN Yang Menduduki Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi Persentase ASN yang mengikuti Bimtek sesuai Kompetensi	100 % 44,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Dinas	93,00 Indeks	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Alat Berat/Alat Besar/ Alat Perbengkelan sesuai Kebutuhan Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi yang dilaksanakan	100 % 97,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kinerja Operasional	98,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat Berat/Alat Besar Kondisi Baik Persentase Alat Laboratorium Konstruksi dengan Kondisi Baik Persentase Alat Perbengkelan Kondisi Baik	100 % 98,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Penataan sungai Persentase debit air baku yang tersedia Persentase irigasi dengan kondisi baik Persentase sungai yang berfungsi baik	28,45 % 58,63 % 72,90 % 92,85 %	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sungai yang Terpelihara	30 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif Persentase Ketersediaan Debit Air Irigasi	92.2 % 94.66 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Minum Persentase rumah tangga terlayani air minum perpipaan	90,41 % 92,00 %	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Terpasang Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih	29460 SR 90.61 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Prasarana Pengolahan Persampahan	31,00 %	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Prasarana Pengolahan Sementara	100 % 88 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Persentase Penyediaan Prasarana Tempat Pengolahan Akhir Sampah		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman	0 %	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman	0 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan kota yang memilki drainase	67,74 %	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Drainase Sesuai Kebutuhan	75,43 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/ Kota Persentase Pelaksanaan Pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota (Tahun Jamak) Persentase penyediaan sarana perkantoran tertentu yang representatif Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif	100,00 % 37,50 - 45,00 % 81,90 % 85,04 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memiliki SLF Persentase Permohonan Izin Bangunan yang Diterbitkan	1,04 % 98,65 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Persentase Jalan Lingkung Kondisi baik	15,00 % 48,27 %	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Lingkung Sesuai Kebutuhan	80,65 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas	52,83 %	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan Persentase Panjang jalan yang dipelihara	31,29 % 47,53 % 8,12 % 99,92 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan jasa konstruksi yang berkinerja baik	91,50 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	0,35 Indeks	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Standar Konstruksi	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasan tanpa Kecelakaan Konstruksi	87 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kepatuhan pelaku pembangunan sesuai rencana tata ruang	46,89 %	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang ditetapkan dan dievaluasi	66,67 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang disusun Persentase KKPR yang difasilitasi Persentase Peta dan Informasi RTR yang dihasilkan	50,00 % 75,00 % 84,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Tata Ruang yang Ditangani	92,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase tanah sengketa konflik yang difasilitasi	0 %	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang diinventarisasi	0 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	45,54 %	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota	22,75 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPTD Alat Berat			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	94,00 indeks 94,00 Nilai	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Alat Berat/Alat Besar/ Alat Perbengkelan sesuai Kebutuhan Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi yang dilaksanakan	100 % 97,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat Berat/Alat Besar Kondisi Baik Persentase Alat Laboratorium Konstruksi dengan Kondisi Baik Persentase Alat Perbengkelan Kondisi Baik	100 % 98,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPTD Laboratorium Konstruksi			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	94,00 indeks 94,00 Nilai	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi yang dilaksanakan	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat Berat/Alat Besar Kondisi Baik Persentase Alat Laboratorium Konstruksi dengan Kondisi Baik Persentase Alat Perbengkelan Kondisi Baik	100 % 98,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman	25,41 %	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman	22,58 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas PKP	80 nilai 87 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program dan Kegiatan	95 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan terhadap Aliran Kas	90 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan kepegawaian Dinas PKP	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penurunan angka Backlog	5161 Unit	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait SPM Perumahan	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang ditingkatkan Kualitasnya	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Rumah Swadaya	84,31 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak huni	97,53 %	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan Kualitasnya	11,52 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah	26,11 %	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dokumen persyaratan serah terima PSU yang selesai diverifikasi sesuai tahapan	5 lokasi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	87 Nilai 90 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan jumlah evaluasi kinerja yang tersedia	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan dan persentase dokumen kepegawaian yang lengkap	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan barang milik daerah Satpol PP dan Damkar	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan, Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetisinya, Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 % 80 % 100 %	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			DAN PEMADAM KEBAKARAN
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yg memahami perda pekat	80 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100 % 50 %	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan yang bersertifikat	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Dilaksanakan	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM BPBD	81 Nilai 92 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja kinerja program/kegiatan	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian BPBD	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum BPBD sesuai standar	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan umum BPBD sesuai standar	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana, Persentase penanganan pasca bencana	100 % 100 % 100 %	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan informasi rawan bencana	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana melalui jitupasna, rencana rehabilitasi, dan pasca rekonstruksi pasca bencana	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Dinas Sosial			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Sosial	90 Nilai 94 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 %	DINAS SOSIAL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	87 %	DINAS SOSIAL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Inspektorat yang sesuai Standar	100 %	DINAS SOSIAL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100 %	DINAS SOSIAL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi kebutuhan sarana prasarana Kantor	100 %	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100 %	DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100 %	DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	70 %	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	100 %	DINAS SOSIAL
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	65 %	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase PPKS yang terlayani	85 %	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80 %	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	100 %	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %	DINAS SOSIAL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	100 %	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	DINAS SOSIAL
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	100 %	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	100 %	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100 %	DINAS SOSIAL
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	85 Nilai 92.50 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap	100 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memakai Barang Milik Daerah	100 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibayarkan	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	3.87 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	46,50 % 46,50 %	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	46,50 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang	1424 Orang 4,03 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	75 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	0,10 % 20 % 26.00 %	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan Persentase Industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	100 % 2,60 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang Difasilitasi	6 IKM	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINAS Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	1 perusahaan 70 %	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri	66,67 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	0,10 % 20 % 26.00 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP DP3AP2KB oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	82 Nilai 90,60 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan pencapaian kinerja sesuai pedoman	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK,

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			KELUARGA BERENCANA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan gaji/tunjangan ASN	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	35 stel	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Persentase tamu yang dilayani sesuai standar	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah updating datan dan informasi di website Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 updating 90 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK,

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	151 unit	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang duduk di legislatif Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	16 % 3,82 % 63,89 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang memahami konsep gender dan PPRG Persentase pemenuhan dokumen untuk evaluasi PUG	40 lembaga 100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam kaukus perempuan politik indonesia	53 kelompok 40 orang	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	0 lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK,

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0 Orang	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Resiko kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0,248 100 % %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 advokasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan korban kekerasan perempuan yang dilayani melalui Mediko Legal	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	1 dokumen	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK,

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Jumlah organisasi perempuan yang aktif	0 Pembelajaran 34 organisasi	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	53 kelompok	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang	Jumlah Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	27 organisasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Jumlah perwako,himbauan,MOU terkait perlindungan anak	100 Persentase 1 Dokumen	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah updating data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA) Persentase pemanfaatan data gender dan anak oleh satuan kerja terkait	12 updating 90 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	61,31 indeks 750 Skor 9 kelurahan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelembagaan PHA Jumlah pelembagaan PHA	1 dokumen 40 lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	0,023 % 100 % 82,92 indeks	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak	1 dokumen	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak	47 koordinasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4 lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kebijakan Propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh TFR(Angka kelahiran total)	100 % 2,65 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	6,18-6,20 %	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah perumusan dan pemukhtahiran data keluarga pada aplikasi SiGA	12 pemukhtahiran	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemetaan sistem informasi keluarga	12 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi	11.3 % 63.07 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Modren (Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah pembinnan KB sesuai dengan kearifan lokal	2 momentum strategis	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian kebutuhan alokon Jumlah Faskes KB yang mendapatkan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	1 dokumen 30 Faskes KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Integrasi program Bangga Kencana di Kampung KB	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata rata Usia Perkawinan Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	22,5 Tahun 60,1 Persentase	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kader yang mendapatkan pembinaan sebagai kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	80 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisai Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	53 organisasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Dinas Ketahanan Pangan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh inspektorat Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	80,95 nilai 86,00 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	85 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	90 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan kepegawaian	100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Sesuai Standar	85 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	85 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Sesuai Standar	85 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasana kantor dalam kondisi baik	85 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan yang tersedia (Masyarakat+Pemda)	53,00 %	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	17 %	DINAS KETAHANAN PANGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE	58,00 % 62,00 %	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Persentase Pengembangan Usaha Kelembagaan Distribusi Pangan 2. Persentase Informasi Harga yang Up to Date	100 % 18 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	65 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Diversifikasi Konsumsi Pangan 2. Persentase Masyarakat yang telah Terampil dalam Mengolah Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	22 % 44 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH ketersediaan	89,20 skor	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait	50 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Hasil Pemanfaatan Pekarangan	19 %	DINAS KETAHANAN PANGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90,00 %	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang Memahami Zat Berbahaya bagi Pangan	19 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Dinas Lingkungan Hidup			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup	77,90 Indeks 89 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	95 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja realisasi keuangan program kegiatan	95 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dgn atribut lengkap	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Dinas Lingkungan Hidup sesuai standar	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum Dinas Lingkungan Hidup sesuai standar	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan yang Disusun	5 Dokumen	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen sebagai komitmen pemenuhan RPPLH	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,28 Indeks	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase industri yang dipantau Persentase sungai yang dipantau	100 % 80 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Publik	14,90 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase jenis spesies tanaman (flora) lokal yang dikelola Persentase RTH kota yang dipelihara dan ditata	1 % 25 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang Memiliki dokumen Lingkungan dan Memiliki Izin PPLH	50 %	
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase rekomendasi teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dikeluarkan terhadap usaha/kegiatan yang mengajukan permohonan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	60 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	74 %	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengawasan dari usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi dan	60 usaha/kegiatan 6 kegiatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya RPPLH		
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok Masyarakat dan Sekolah yang terbina Dalam Pengelolaan Lingkungan	20 %	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kelurahan yang dibina Persentase sekolah yang dibina dalam pengelolaan persampahan	20 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	96 %	
Pengelolaan Sampah	Persentase sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi baik	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD Laboratorium Lingkungan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,28 Indeks	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase industri yang dipantau Persentase sungai yang dipantau	100 % 80 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93 indek	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi Keuangan	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	90 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dalam Keadaan Baik	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Kantor yang Dibayarkan	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	20 % 75 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KK Cakupan Kepemilikan KTP el Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	65 % 97,75 % 99,56 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil pelaksanaan inovasi pelayanan dan sosialisasi	3 laporan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 % 100 % 100 % 100 %	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-17 tahun Cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua peristiwa yang perceraianya dilaporkan Cakupan kepemilikan akta perkawinan	100 % 99 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	pada semua peristiwa yang perkawinannya dilaporkan		
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelaksanaan inovasi pelayanan dan sosialisasi	3 laporan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan bimtek terkait pencatatan sipil	1 laporan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	91 %	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya pemutakhiran dan pemanfaatan database kependudukan	3 dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan melalui hak akses; Tersedianya standarisasi pelayanan dan media publikasi terkait adminduk	30; 1; 6 OPD; dokumen SP; Media Publikasi	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersusunnya laporan pembinaan dan pengawasan PIAK	2 laporan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	3 Dokumen	
Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Penyajian data dan Profil Kependudukan	3 dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Perhubungan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM	81 nilai 89 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN Dalam Berpakaian	100 %	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kondisi Sarana Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kondisi Sarana Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal ; Konektivitas Darat Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	82 % 86 %	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	0 %	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan dalam kondisi baik	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	86 %	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	0 %	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	0 %	DINAS PERHUBUNGAN
UPTD Terminal			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal ; Konektivitas Darat Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	82 % 86 %	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	0 %	DINAS PERHUBUNGAN
UPTD Parkir			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal ; Konektivitas Darat Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	82 % 86 %	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase kenaikan pengguna jasa parkir	80 %	DINAS PERHUBUNGAN
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal ; Konektivitas Darat Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	82 % 86 %	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kenaikan kendaraan yang melaksanakan pengujian	86 %	DINAS PERHUBUNGAN
Dinas Komunikasi dan Informatika			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP Nilai IKM	81.20 Indeks 86.30 Nilai	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Kepegawaian	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum diskominfo sesuai standar	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondidi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pelayanan penyaluran informasi pembangunan daerah melalui media Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan	100 % 78 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	kualitas informasi publik pemerintah daerah		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mempublikasikan data dan informasi publik melalui PPID Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyaluran pengaduan masyarakat melalui LAPOR SP4N ke Perangkat Daerah	31 OPD 100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Persentase pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	100 % 3 Indeks 85 %	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100 % 2.69 Poin	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik yang tersedia Persentase Perangkat Daerah terkait yang mengumpulkan data Rata-rata waktu penyelesaian pengumpulan data statistik sektoral	4 buku 50 % 6 bulan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Tingkat keamanan informasi pemerintah	46.2 Angka 85 %	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Koperasi dan UKM oleh Inspektorat Nilai IKM	84,85 Nilai 87,1 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Program/Kegiatan	90 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik	0 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang lengkap	100 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	39,86 %	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi kelembagaannya	60 Koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif Persentase penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	46 % 70 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang diawasi dan dinilai kinerja simpan pinjamnya	60 Koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	42 % 65 %	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperkuat SDM nya	120 Pengelola Koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	22,38 %	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	32 Koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya status usaha mikro dari non formal menjadi formal (legalitas usaha) Pertumbuhan wirausaha Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	0,30 % 11,26 % 4,84 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas usaha	0,20 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	0,20 % 1,84 %	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha mikro yang difasilitasi perluasan jaringan pasarnya	0,10 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	12,50 % 29 %	
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	55 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP	80 % 91,47 % 92 %	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana distribusi perdagangan yang disediakan	4 unit	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Pasar Persentase Pelanggaran Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Pasar Tradisional Persentase Pelanggaran Perda No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Persentase Pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima	3 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3 % 4,17 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	95 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	90 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga Persentase penanganan pengaduan konsumen	27 % 50,48 %	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Potensi alat UTTP yang dilakukan tera ulang	1780 unit	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan Jumlah kerjasama perdagangan	4 % 5 kerjasama	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Event yang dilaksanakan	3 kali	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
UPTD Promosi Produk UMKM			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah kerjasama perdagangan	5 kerjasama	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Event yang dilaksanakan	3 kali	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM DPMPTSP Nilai Evaluasi AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat	3,74 Indeks 81,20 Nilai	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelayanan publik	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			TERPADU SATU PINTU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan kepegawaian	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor	80 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa layanan kantor yang dibayarkan	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana gedung kantor yang terpelihara dengan baik	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target investasi Nilai realisasi investasi	100 % 230 Milyar	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase pembuatan peta potensi investasi yang telah divalidasi	25 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor Persentase peningkatan Investor yang berinvestasi	10 % 10 %	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	25 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100 % 100 %	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha Persentase peluang investasi yang telah divalidasi	10 % 28 %	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan kegiatan Penanaman Modal	60 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data perizinan dan non perizinan Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100 % 100 %	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP DPK oleh Inspektorat Nilai IKM DPK	80,05 nilai 86,75 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan dengan renstra	95,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	100,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum DPK sesuai standar	100,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	100,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66,20 Nilai	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Perpustakaan Jumlah perpustakaan yang dibina	2300 Orang 38 Pustaka	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Jumlah peserta lomba literasi	10000 Orang 120 Orang	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	102 eksemplar 1,60 %	
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya Etnis Nusantara yang ditemukan	102 Eksemplar	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti	71,00 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	yang sah dan pertanggungjawaban nasional		
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis sesuai standar kearsipan	35,50 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/arsip statis yang diterima	550 Arsip	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peserta sosialisasi yang meningkat pemahamannya dalam mengelola arsip	0 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	40,16 % 4,50 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader, pemuda pelopor dan wirausaha muda dan pelatihan paskibraka	3 kegiatan	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan	30 OKP	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga (tingkat daerah	55 medali	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase guru/pelatih yang aktif membina pelajar dalam cabang olahraga	80 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kompetisi / event olahraga yang diselenggarakan	5 event	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah olahraga rekreasi dan saran prasarana olahraga yang dikembangkan	2 event / unit	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Peringkat pramuka tingkat propinsi	2 peringkat	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi kepramukaan	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan dilestarikan	31 %	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dilestarikan	3 karya budaya	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah event kesenian tradisional yang dilestarikan	3 event	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga adat yang dilakukan pembinaan	22 lembaga	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Komunitas/Pelaku seni yang ditingkatkan kapasitasnya	5 %	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	telaksananya kegiatan diplomasi seni dan budaya	2 kegiatan	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi Jumlah cagar budaya dalam kondisi baik/terpelihara	28 bcb 28 cb	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah benda cagar budaya yang dilindungi	28 bcb	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi permuseuman yang dipelihara	100 %	
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	jumlah koleksi museum yang dikelola	80 unit	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Parpora Nilai AKIP oleh Inspektorat	100 Nilai 90 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik dan capaian kinerja program/kegiatan	100 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dibayarkan gaji	100 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	80 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	80 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	80 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	80 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik	1 ow 50 %	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan	4 ow	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata rata lama tinggal wisatawan Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	1.50 hari 7 Kerjasama 80 % 80 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan		
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	80 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi	1 fasilitas	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi	1 kegiatan	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPTD Pengelola Objek Wisata dan Usaha Pariwisata			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik	1 ow 50 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan	4 ow	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP dari Inspektorat Nilai IKM Dinas Pertanian	83,50 Nilai 88,00 indek	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah populasi sapi yang dipelihara	80 ekor	DINAS PERTANIAN
UPTD Puskesmas			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan	0,30 % 35 %	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan kesehatan hewan yang difasilitasi	1 kegiatan	DINAS PERTANIAN
UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana peternakan	18,34 % 85 %	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase pemanfaatan SDG Padi Bersertifikat sesuai target tanam 2. Indeks Pertanaman 3. Persentase pemenuhan layanan sarana pendukung pertanian	62 %; 2,8 ; 90 %	DINAS PERTANIAN
UPTD RPH dan Pasar Ternak			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan	0,30 % 35 %	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Unit Usaha yang memiliki Sertifikasi NKV	7 %	DINAS PERTANIAN
Dinas Pertanian			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran Jumlah total produksi perikanan	45 % 560 ton	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1. Persentase pemanfaatan lahan budidaya 2. Jumlah pembudidya yang mendapat akses permodalan 3. Jumlah peningkatan kelas kelompok pembudidaya	63 %; 7 orang; 1 Kelompok	DINAS PERTANIAN
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1. Persentase penggunaan benih ikan unggul yang digunakan pembudidaya 2. Persentase penurunan kematian ikan	70 % 6 %	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan JUmlah produksi olahan hasil perikanan	33,40 kg/kapita/th 7 ton	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peningkatan unit usaha pengolahan dan pemasaran perikanan	1 unit	DINAS PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP dari Inspektorat Nilai IKM Dinas Pertanian	83,50 Nilai 88,00 indek	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sasaran, proram dan kegiatan renja perangkat daerah selaras dengan renstra	90 %	DINAS PERTANIAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan Dinas	90 %	DINAS PERTANIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	90 %	DINAS PERTANIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen evaluasi pelayanan publik	2 Dokumen	DINAS PERTANIAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERTANIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana peternakan	18,34 % 85 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1. Persentase pupuk yang disalurkan 2. Jumlah alsintan yang di salurkan 3. Persentase pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	100 %; 2 jenis; 100 %	DINAS PERTANIAN
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase pemanfaatan SDG Padi Bersertifikat sesuai target tanam 2. Indeks Pertanaman 3. Persentase pemenuhan layanan sarana pendukung pertanian	62 %; 2,8 %; 90 %	DINAS PERTANIAN
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) tersedianya bibit ternak 2) pelatihan Budidaya ternak/pengolahan pakan 3) Tersedianya Pakan Ternak	500 dosis; 1 kali; 20 ton	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	59,20 %	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Rekomendasi Lahan Pertanian Berkelanjutan	12 laporan	DINAS PERTANIAN
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun	5 unit	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan	0,30 % 35 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase pelayanan ternak di paster sesuai sop - Persentase fasilitasi pemotongan dan pendistribusian daging tepat waktu	100 %; 100 %	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentasi fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	60 %	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1. Persentase luas lahan serangan OPT yang dikendalikan (Padi) 2. Persentase luas lahan serangan OPT yang dikendalikan (Kakao) 3. Jumlah Petani yang memanfaatkan Akses Permodalan Dan Pembiayaan 4. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan yang memanfaatkan akses Permodalan	1. 50% 2. 40% 3. 2595 petani 4. 17 Pelaku Usaha	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan	40 %	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran hasil olahan pertanian	6 UP3HP	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani ternak yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase luas tanam yang menerapkan teknologi tepat guna	23 % 45 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	45 %	DINAS PERTANIAN
Sekretariat Daerah			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	88,60 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Sekretariat Daerah Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	100 % 89 nilai	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90 %	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90 %	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39.09 %	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD indeks reformasi hukum	3,4000 Nilai 87 Indeks	
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi	100 %	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi		
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	5 MoU/PKS	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa	91,58 Indeks	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	100 % 4 kali	SEKRETARIAT DAERAH
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	1 dokumen	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat DPRD			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DPRD			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Sekretariat DPRD oleh Inspektorat Nilai IKM Sekretariat DPRD	72,95 Nilai 85 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan Persentase konsisten program kegiatan renstra dengan renja	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90 %	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Sekretariat Dewan yang sesuai standar	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90 %	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %	SEKRETARIAT DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	SEKRETARIAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Layanan Administrasi DPRD	Persentase terlaksananya layanan administrasi DPRD	100 %	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase ranperda yang ditetapkan	100 %	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
PERENCANAAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Nilai IKM Bappeda	89 indeks 89 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program / kegiatan Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD, Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 %, 100 %,	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	100 % 19.50 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah	98,5 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%	93,55 % 97.50 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan Tingkat aksesibilitas data	100 % 71.43 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan , Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 % 100 %, 100 %	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya "Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang sosial budaya	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	75 %	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 dokumen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 Dokumen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Badan Keuangan Daerah			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
KEUANGAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	72 Nilai 88 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi capaian kinerja program/ kegiatan	100 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan PD terhadap aliran kas	95 persen	BADAN KEUANGAN DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ASN yang berkapasitas	100 persen	BADAN KEUANGAN DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	80 persen	BADAN KEUANGAN DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined	80 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	80 persen	BADAN KEUANGAN DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset yang terpelihara	100 persen	BADAN KEUANGAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu Persentase realisasi belanja terhadap anggaran Laporan keuangan berbasis akrual	27 Des 95 % ADA -	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase dokumen penganggaran yang dihasilkan	100 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	100 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan PD	100 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan kewenangan daerah dan bantuan yang tersalurkan	70 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan dan implementasi sistem terhadap data keuangan daerah	100 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang telah mengelola BMD dengan baik	93.54 %	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD dan Aset Kota yang terkelola dengan baik	93,54 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	13.50 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Nilai IKM	5 % 86,5 Nilai	BADAN KEUANGAN DAERAH
UPTD Fasilitas Pembiayaan			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
KEUANGAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	72 Nilai 88 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	100 persen	BADAN KEUANGAN DAERAH
UPTD Pajak Daerah			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
KEUANGAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	13.50 %	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Nilai IKM	5 % 86,5 Nilai	BADAN KEUANGAN DAERAH
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
KEPEGAWAIAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP BKPSDM oleh Inspektorat Nilai IKM BKPSM	81,15 Nilai 90,00 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan Persentase Capaian Kinerja program/kegiatan Persentase konsistensi program kegiatan renstra dan renja Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum BKPSDM sesuai standar	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	12 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS yang difasilitasi tugas belajar dan izin belajar untuk Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	12 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	62 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Manajerial	60.00 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Inspektorat			
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
INSPEKTORAT DAERAH			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP Inspektorat Nilai IKM Inspektorat	83,00 89,00 Nilai Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik	100 %	INSPEKTORAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90 %	INSPEKTORAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang sesuai standar	100 %	INSPEKTORAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang sesuai standar	100 %	INSPEKTORAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan yang diadakan	100 %	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100 %	INSPEKTORAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kondisi BMD dalam keadaan baik	80 %	INSPEKTORAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Kapabilitas APIP Nilai indek refomasi birokrasi pada area pengawasan	3 Level 66 Indeks	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan Internal	100 %	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang meningkat nilai evaluasi internal dan eksternal Nilai Maturitas SPIP Rata-rata nilai AKIP PD hasil Evaluasi inspektorat	100 % 3 Level A Nilai	
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	100 %	INSPEKTORAT
Kecamatan Payakumbuh Barat			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Barat oleh Inspektorat Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Barat	81 Nilai 91,00 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan 2. Persentase Konsistensi Program Kegiatan Renstra dengan Renja	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Program Kegiatan	95 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Kecamatan Payakumbuh Barat yang diproses tepat waktu	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi Baik	80 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Usulan Musrenbang Kec. Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	75 % 85 %	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas	75 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM	100 % 91,00 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan lingkup Pemberdayaan yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100 %	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan Monitoring, Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Bulakan Balai Kandi			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Ibh			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Koto Tengah			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Kubu Gadang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kelurahan Labuah Basilang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Subarang Batuang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Nunang Daya Bangun			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Padangdata Tanahmati			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Padang Tinggi Piliang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Padangtengah Balainanduo			
UNSUR KEWILAYAHAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Pakan Sinayan			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Parak Batuang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Parit Rantang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Payolansek			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Talang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Tanjung Pauh			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kecamatan Payakumbuh Timur			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur Oleh Inspektorat Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Timur	81 Nilai 91.00 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program kegiatan Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 persen 90 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan payakumbuh timur sesuai standar	80 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	80 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	80 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	80 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	70,00 % 85,00 %	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	100 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase dokumen pelayanan yang diproses	100 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	"Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kec. Pyk Timur	100 %	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan trantibum yang difasilitasi	100 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di Kec. Pyk Timur	100 %	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase peningkatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	100 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Balai Jariang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Koto Baru			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Koto Panjang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Padang Alai Bodi			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Padang Tengah Payobadar			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Padang Tiakar			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kelurahan Payobasung			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Sicincin			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Tiakar			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kecamatan Payakumbuh Utara			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	81 Nilai 91 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan	95 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Kecamatan Payakumbuh Utara sesuai standar	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrenbang yang diterima Perangkat Daerah Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu	75 % 85 %	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	75 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100 %	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Balai Tongah Koto			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Ikua Koto Dibalai			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Kapalo Koto Dibalai			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapakrajo			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Napar			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Ompang Tanah Sirah			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Tigo Koto Diate			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Tigo Koto Dibiruuh			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Taratak Padang Kampuang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kecamatan Payakumbuh Selatan			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh selatan Oleh Inspektorat Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Selatan	81 Nilai 90 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program / kegiatan Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 % 95 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan yang sesuai standar	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrenbang kecamatan payakumbuh selatan yang diterima perangkat daerah Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	75,00 % 85,00 %	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	75 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	"Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kec pyk selatan	100 %	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di kec. Pyk Selatan	100 %	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan Monitoring Evaluasi lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kelurahan Balai Panjang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kelurahan Limbukan			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kelurahan Padang Karambia			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kelurahan Kapalo Koto Ampangan			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM	81 nilai 90 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program / kegiatan	100 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan yang sesuai standar	80 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan Musrenbang Kec. latina yang diterima Perangkat Daerah Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	70,00 % 85,00 %	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	70 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	100 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	"Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kec latina	100 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup trantibum yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di kec. latina	100 %	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pembinaan dan monitoring evaluasi kegiatan kemasyarakatan yang terlaksana	100 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kelurahan Koto Panjang Dalam			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kelurahan Koto Panjang Padang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kelurahan Padang Sikabu			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kelurahan Parambahan			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kelurahan Sungai Durian			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kelurahan Parik Muko Aia			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat Nilai IKM Kesbangpol	80 nilai 93 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	90 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program/kegiatan	92 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian layanan umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	90 %	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	120 orang	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100 %	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan	3 kegiatan	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	93 %	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1 rekomendasi	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat	100 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	11 rekomendasi	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik sosial yang diselesaikan	100 %	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti	10 kasus	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, maka pemerintah daerah harus memprioritaskan urusan ini dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib daerah berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Selanjutnya, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka,

terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam hal pengukuran penerapan SPM ditetapkan indikator SPM yang merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Disahkannya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 pertanda dimulainya pelaksanaan perogram kegiatan dan akan diupayakan oleh seluruh perangkat daerah untuk menuntaskannya.

1. Dasar Hukum

Landasan hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5877);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan pada SPM sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan pada SPM sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

2. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum APBD Kota Payakumbuh Tahun 2025 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2024 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025. KU-APBD juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang tertuang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2025, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh, melalui pencapaian visi Kota Payakumbuh yaitu: “Payakumbuh Maju, Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Sentra Umkm yang Kompetitif”.

Untuk mendorong hal tersebut, maka pemerintah telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan standar minimum pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO KOTA PAYAKUMBUH

Capaian kinerja makro dalam pencapaian dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro. Dilakukan untuk mendapatkan gambaran target keberhasilan pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai. Pada tabel 2.1 digambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Payakumbuh.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan 2024 ke 2025 (%)
1	2	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,76	81,62	1,06
2	Persentase Penduduk Miskin	5,19	4,95	- 4,62
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,87	4,96	1,85
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,53	3,55	-21,63
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	9,421	9,8129	4,16
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,313	0,271	- 13,42

Sumber : BPS 2025 dan 2026

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan,

serta standar hidup layak. Dikembangkan oleh UNDP, IPM digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. IPM adalah indeks yang holistik karena dimensi yang dikandungnya. IPM Payakumbuh dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan trend yang naik. Capaian IPM merupakan upaya terus menerus yang dilakukan Pemko Payakumbuh agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat Payakumbuh.

Komponen yang membangun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Usia Harapan Hidup (UHH); Harapan Lama Sekolah (HLS); Rata-rata Lama Sekolah (RTS); dan Pengeluaran Perkapita. Usia Harapan Hidup naik dari 75,08 tahun 2024 menjadi 75,54 tahun 2025. Ini berarti Usia Harapan Hidup meningkat, juga dapat menggambarkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Payakumbuh semakin baik. Harapan Lama Sekolah naik dari 14,57 tahun 2024 menjadi 14,79 di tahun 2025, dan Rata2 Lama Sekolah juga naik dari 10,89 tahun 2024 menjadi 11,08 tahun 2025. Ini berarti animo masyarakat untuk mendapatkan pendidikan semakin meningkat.

Kondisi ini menaikkan IPM Kota Payakumbuh naik dari 80,76 tahun 2024 menjadi 81,62 tahun 2025 Jadi Indeks Pembangunan Manusia naik 1,06% dari kondisi tahun 2024.

2) Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil survey BPS tahun 2025, kondisi Tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh turun dari 5,19 tahun 2024 menjadi 4,95 tahun 2025. Dari data yang ada tingkat kemiskinan turun 4,62% dari tahun 2024. Kondisi di Kota Payakumbuh kondisi daerah yang kurang ideal dimana pertumbuhan ekonomi tinggi, kemiskinan juga tinggi, kemungkinan hal ini terjadi karena sektor perdagangan menjadi sektor utama tertinggi dalam distribusi perekonomian, dimana sektor perdagangan menyumbang lebih 24% dari total PDRB di Kota Payakumbuh. Perdagangan ini lebih didominasi oleh pedagang besar dengan modal besar.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Hasil survey BPS tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Payakumbuh naik dari 4,87 tahun 2024 menjadi 4,96 tahun 2025.

Angka TPT Payakumbuh saat ini yang masih tergolong tinggi kami sikapi dengan rasa syukur. Kenapa ada 2 sisi yang bisa kita sikapi;

- a. Sisi negatifnya, TPT tinggi merupakan rapor buruk bagi pembangunan. Karena masih banyak stok penduduk potensial yang tidak terserap sebagai pelaku

pembangunan. Jika berkelanjutan ini akan menjadi beban bagi masyarakat pekerja karena harus menanggung pengangguran tersebut. Untuk itu sebagai bagian dari upaya amal ibadah kami selaku kepala daerah untuk mencari solusi dan upaya agar pencari kerja ini dapat terserap di pasar kerja.

- b. Sisi positifnya, TPT menggambarkan penduduk yang secara aktif mencari kerja atau yang mempersiapkan usaha. Tingginya TPT Payakumbuh, dapat juga mengindikasikan bahwa Payakumbuh dianggap sebagai destinasi para pencari kerja untuk bekerja. Ini biasanya terjadi di daerah yang dianggap maju dan dapat memberikan kesejahteraan.

Tingkat pengangguran Kota Payakumbuh merupakan terendah ke 8 dari 19 Kabupaten/Kota dan peringkat 3 terendah dari 7 Kota di Sumatera Barat. Tahun 2025 kondisi ini turun dengan menjadi terendah ke 10 dari 19 Kabupaten/Kota dan peringkat 4 terendah dari 7 Kota di Sumatera Barat setelah Kota Sawahlunto.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2025 belum mencapai kondisi sebelum COVID-19. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 adalah 5,92 tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Sampai tahun 2025, kondisi pertumbuhan ekonomi masih belum pulih sepenuhnya. Karena kondisi covid-19 pertumbuhan ekonomi tahun 2020 turun menjadi -1,66. Ini karena terjadinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga beberapa sektor pertumbuhan terganggu termasuk yang memberi kontribusi besar pada PDRB Kota Payakumbuh seperti sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan pergudangan dan Konstruksi yang ketiganya memberi kontribusi lebih kurang 50% dari PDRB. Angka Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh tahun 2023 pada angka 4,70%. Namun kondisi ini menurun pada tahun 2024 menjadi 4,53%. Tahun 2025 kembali turun ke 3,55 %, ini dipengaruhi terbakarnya pusat pertokoan blok barat sebagai salah satu urat nadi pertumbuhan ekonomi pada akhir bulan agustus tahun 2025. Jadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 21,63 %

5) PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Angka Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Payakumbuh tahun 2024 sebesar 9.42. Selanjutnya tahun 2025 kembali naik menjadi 9.81 Juta atau 4,16 % dari tahun sebelumnya

6) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks gini melambangkan ketimpangan pendapatan. Semakin besar angka gini ratio semakin tinggi ketimpangan pendapatan di antara masyarakat. Ini menggambarkan bahwa di antara penduduk Kota Payakumbuh, masalah pendapatan masih sangat

bervariasi. Naik turunnya gini pada periode tahun tertentu mengindikasikan masih rentannya pendapatan penduduk di Kota Payakumbuh.

Gini rasio Payakumbuh dalam kurun waktu 5 tahun, menunjukkan fluktuasi, belum bisa menjadikan tren menurun atau menaik. Gini ratio berdasarkan survey BPS tahun 2020 adalah 0,325 lalu turun menjadi 0,316 pada tahun 2021 dan turun menjadi 0,311 pada tahun 2022 lalu tahun 2023 naik menjadi 0,316 lalu turun menjadi 0,313 pada tahun 2024. Tahun 2025 kembali turun ke angka 0,271. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Payakumbuh sudah berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi tersebut menggambarkan gini ratio turun 13,42 % dari tahun 2024.

Kondisi gini ratio yang turun, kemiskinan turun, pengangguran naik dan pertumbuhan ekonomi turun diperkirakan karena tidak ada lagi penggelontoran bansos penanggulangan kemiskinan ekstrim, stunting dan pengendalian inflasi seperti di tahun 2024. Pendapatan masyarakat sendiri di tahun 2025 diperkirakan sudah mulai pulih. Mereka yang kehilangan pekerjaan di saat Covid-19, sudah mulai mendapatkan pekerjaan mendekati pendapatan sebelum Covid-19.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Tabel II.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Payakumbuh

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pendidikan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	2920	5350	54,58	%
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	25231	29517	85,48	%
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	1860	2820	65,96	%
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	616	937	65,74	%
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	886	1159	76,45	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	2920	5350	54,5794393	%
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	25231	29517	85,4795542	%
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	1860	32937	5,6471445	%
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	616	937	65,7417289	%
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	886	1159	76,4452114	%

2. Urusan Kesehatan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	2	1878	0,11	%

1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	220	8497	2,59	%
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1878	1878	100	%
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1878	1878	100	%
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1860	1860	100	%
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	8508	8689	97,92	%

1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	23568	23568	100	%
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	96525	96525	100	%
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	17773	17773	100	%
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	14110	14129	99,87	%
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	1994	1994	100	%

1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	339	339	100	%
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	3407	3407	100	%
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2429	3179	76,41	%

3. Urusan Sosial

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	656	656	100	%
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	34	34	100	-

1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	329	329	100	-
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	14	14	100	-
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	25	25	100	-
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	33019	73985	44,63	-

4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3	3	100	%

1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	72	72	100	%
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	12	12	100	%
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	260	260	100	%
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	223	223	100	%
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	92	92	100	%

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	1	1	100	%

		pada tahun N					
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	1	1	100	%
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	95	100	95	%
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	0	5	-	%

6. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2113,33	2455	86,08	%
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	232,308	295,38	78,65	%

1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	149828	149828	100	%
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	36551	36845	99,20	%
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	1	1	100	%
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	1	100	%

1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	378	378	100	%
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	1	1	100	%
1.c.9	Persentase tenaga operator/tekniisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	753	845	89,11	%
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	19	311	6,11	%

2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Kebudayaan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	52	55	94.55	%
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	-	-	(tidak ada data)	%

2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	90	30	300	%
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	5858	38486	15.22	%

2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	5	678	0.74	%
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	21	21	100	%

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	32	32	100	%
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	24	24	100	%

4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	44771	44990	99.51	%

2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	28779	42158	68.26	%
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	2	2	100	%
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	107807	108355	99.49	%
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	11024	11024	100	%
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	60732	65849	92.23	%
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	2792	4046	69.01	%

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	1	1	100	%

		tahun berdasarkan indeks desa per tahun					
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	1	1	100	%
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	1	1	100	%

6. Urusan Penanaman Modal

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	7.09	6.58	7.75	%
2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	7.09	6.6	107.52	%

7. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	1.4862	1.3931	6.68	%
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	2883	15707	18.35	%

8. Urusan Tenaga Kerja

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	5	5	100	%
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	4	128	3.13	%

	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).						
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	0	1	0	%

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	91	91	100	%
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	200	214	93.46	%

2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penduduk	102746	102746	100	%
-------	--	--	-----------------	--------	--------	-----	---

10. Urusan Statistik

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	360	360	100	%

11. Urusan Persandian

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah	Nilai indeks keamanan informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimasl indeks keamanan informasi (KAMI) (918)	415	918	45.21	%

12. Urusan Pertanahan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	2268916,01	3324445,12	68,25	%
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	5552,47	7783,68	71,33	%
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1	1	100	%

13. Urusan Perhubungan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	$KTDaerah = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$	-	0,56	-	0,56	Rasio
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-	0,37	-	0,37	Rasio
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	1	1	100	%

14. Urusan Lingkungan Hidup

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	30	40	75	%
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	33566,1	35547	94,43	%

15. Urusan Pangan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Target jumlah cadangan pangan	41228,26	28822	143,04	%

16. Urusan Perpustakaan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	-	58,43	-	58,43	Nilai
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	-	16,32	-	16,32	Nilai

17. Urusan Kearsipan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	-	70,84	-	70,84	%

18. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	1,68	2,3	73,04	%

2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	9682	16750	57,80	%
2.h.3	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	21,44	14,83	144,57	%

2.2.3 Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi Tahun N	27534968000	709.664.611.209	3,88	%
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	7	229	-96,94	%

3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	33090	92348	-64,17	%
-------	---	---	----------------------------	-------	-------	--------	---

2. Urusan Perindustrian

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	-	100	-	100	%

3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	176	3865	4,55	%
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	3865	2500	54,6	%
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	1,05081E+11	7,09665E+11	14,81	%

3. Urusan Perdagangan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	1455	2296	63,37	%

4. Urusan Pertanian

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	43246,39	46466,99	-6,93	%

3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	4660,81	10262,83	-54,59	%
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	12526,69	13161,8	-4,83	%
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	4108,71	4108,71	100	%

5. Urusan Kelautan Perikanan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	44,28	-	44,28	Kg / Kap / Tahun
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	572,2	560	102,18	%

2.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17	17	100	%

2. Urusan Keuangan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3.78915	851.009.111.090	44.53	%

4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	166.878.567. 156	782.436.280. 864	21.33	%
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	492.639.180. 105	765.455.545. 090	64.36	%
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	292.050.247. 363	851.009.111. 090	34.32	%

3. Urusan Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1121	1329	84.35	%

4. Urusan Fungsi Pengawasan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	4	-	4	Nilai
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	2	-	2	Nilai
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	4	-	4	Nilai
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	1040	1246	83.47	%

5. Urusan Pengadaan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	40	-	40	Poin
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	28.8	-	28.8	Poin
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	22.94	-	22.94	Poin

	Barang/Jasa (SDM PBJ)						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

6. Urusan Hubungan dan Perwakilan Daerah

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1	-	1	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	4	13	30.77	%

7. Urusan Pelayanan Publik

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	1	-	100	Nilai

8. Urusan Penelitian dan Pengembangan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	50	50	100	%

2.2.4 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (***Clean and Good Governance***) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (***Good Governance***) dan berorientasi kepada hasil (***Result Oriented Government***), sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan melalui Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP ini memuat Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Evaluasi internal sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja:

Target Kinerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dituangkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja Walikota Payakumbuh Tahun 2025, yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dokumen perencanaan daerah. Tahun 2025 di Kota Payakumbuh terjadi pergantian Walikota pasca pilkada serentak diakhir tahun 2024. Untuk itu dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini kami sajikan

Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2025 berdasarkan perencanaan awal tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2025 berdasarkan perubahan perencanaan tahun 2025.

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja pada Perencanaan Awal

Pada masa transisi pasca berakhirnya masa jabatan Wali Kota Payakumbuh pada bulan September 2022, maka dokumen perencanaan Daerah merujuk kepada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, untuk mewujudkan Arah Pembangunan Pemerintah Kota Payakumbuh pada masa transisi tersebut, ditetapkan 5 Tujuan, 12 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama. Adapun Komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh untuk tahun ketiga (tahun 2025) periode perencanaan 2023-2026 tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebagai berikut :

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025.

Target Kinerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dituangkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja Walikota Payakumbuh Tahun 2025, yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2025

Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SUMBER DATA/ PD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	1	Angka harapan lama sekolah	14,31	Dinas Pendidikan
		2	Rata-rata lama sekolah	11,39	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka usia harapan hidup	74,47	Dinas Kesehatan
		4	Prevalensi stunting	13	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,01	DP3AP2KB

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SUMBER DATA/ PD PENANGGUNG JAWAB
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	6	Tingkat Kemiskinan	5.29	Bappeda/BPS
		7	Tingkat Pengangguran	5,52	Dinas Naker Perind/BPS
5	Meningkatnya sektor strategis	8	Pertumbuhan PDRB Sektor industri	3,04	Dinas Naker Perind/BPS
		9	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	4,55	Dinas Koperasi & UKM/BPS
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10	Nilai Realisasi Investasi (Milliar Rupiah)	230	DPM-PTSP

Tujuan III : Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SUMBER DATA/ PD PENANGGUNG JAWAB
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	11	Nilai Evaluasi AKIP Kota	A	Setdako
		12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78	BKD
8	meningkatkan Pelayanan pulik yang prima	13	Indeks SPBE	3,00	Dinas Kominfo
		14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,60	Setdako

Tujuan IV : Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SUMBER DATA/ PD PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	15	Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	86,64	Dinas PUPR
		16	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	75,31	Dinas PUPR
10	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,27	Dinas LH
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	18	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,49	Dinas PUPR

Tujuan V : Meningkatnya tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	19	Persentase Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	100	Dinas Parpora
		20	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	52,58	Dinas Pendidikan

Sumber data : Dokumen Perjanjian Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025

Anggaran Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Payakumbuh pada Tahun 2025 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awal Kota Payakumbuh Tahun 2025 dengan total belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 828.661.781.131,-

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja pada Perubahan Perencanaan Tahun 2025.

Pasca ditetapkannya Wali Kota Payakumbuh periode 2025-2029 oleh Presiden RI pada bulan Februari 2025, maka disusunlah dokumen perencanaan Daerah merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 000.8.6.3/7.2.813/Wk-Pyk/2025 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, untuk mewujudkan Arah Pembangunan Pemerintah Kota Payakumbuh, ditetapkan Visi Kota Payakumbuh yaitu: **“PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka di tetapkan 5 Misi 5 Tujuan, 14 Sasaran Strategis dan 30 Indikator Kinerja Utama. Adapun Komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh untuk tahun pertama (tahun 2025) periode perencanaan 2025-2029 telah dituangkan dalam bentuk Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2025

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan.

Target Kinerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dituangkan dalam bentuk dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025, yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 serta Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 000.8.6.3/ 7.2.813/Wk-Pyk/2025 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2025

**VISI : "PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN,
DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF"**

MISI I : MEWUJUDKAN SDM YANG BERKUALITAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
I.	Terwujudnya SDM yang Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing (Tujuan 1)	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,43	Bappeda/BPS
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2 Usia Harapan Hidup	75,31	Bappeda/BPS
		3 Prevalensi stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita	13,70	Dinas Kesehatan
		4 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	5,81	BPS
2	Meningkatnya Pemerataan kualitas Pendidikan	5 Harapan lama sekolah	14,62	Dinas Pendidikan/BPS
3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	6 Tingkat Kemiskinan	4,54	Bappeda/BPS
4	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak	7 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,80	DP3AP2KB/BKKBN
		8 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.151	DP3AP2KB/BKKBN

MISI II : MEWUJUDKAN IKLIM EKONOMI YANG KOMPETITIF

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
II.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	9 Pertumbuhan Ekonomi	5.02	Bappeda/BPS

	yang Berkualitas dan Inklusif (Tujuan 2)	10	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,93	BRIN
		11	Proporsi Kontibusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi	2,89	BPS
		12	PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	72,02	BPS
5	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	13	Rasio Gini	0,311	BPS
		14	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,75	BPS/Dinas Naker Perind
6	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	15	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	33,34	BPS
7	Meningkatnya iklim investasi daerah	16	Nilai Realisasi Investasi	660	DPM-PTSP

MISI III : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN KONDUSIF

KEMERIN				
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/ PD PENANGGUNG JAWAB
III.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan & Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel (Tujuan 3)	17 Indeks Reformasi Birokrasi	84	Setdako/KemenPAN RB
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	18 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.75	KemenPAN-RB/Kominfo
		19 Indeks Pelayanan Publik	4.51	KemenPAN-RB/Setdako
		20 Indeks Kepuasan Masyarakat	88.6	KemenPAN-RB/Setdako
9	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	21 Nilai Evaluasi AKIP Kota	78.00	KemenPAN-RB/Setdako
		22 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	BPK/BKD
10	Meningkatnya pendapatan Daerah	23 Rasio PAD terhadap APBD	0,17	BKD
11	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24 Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	5,00	Satpol PP dan Damkar

MISI IV : MEWUJUDKAN NUANSA IMANI MELALUI PENDEKATAN BUDAYA DAN ADAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
VI.	Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang Berlandaskan ABS-SBK (Tujuan 4)	25 IPK Berbasis ABS SBK	72,4	Bappeda
12	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Bermasyarakat	26 Karya Budaya yang Ditetapkan	1.00	Dinas Parpora
		27 Cakupan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	58,35	Dinas Pendidikan

MISI V : MEWUJUDKAN SARANA PERKANTORAN YANG HUMANIS RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
V.	Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak Huni dan Berkelanjutan (Tujuan 5)	28 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	68.37	Dinas LH
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	29 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	19.68	Dinas LH
14	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	30 Indeks Infrastruktur	64.09	Dinas PUPR

Sumber data : Dokumen Perubahan Perjanjian Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025

Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Payakumbuh pada Tahun 2025 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Payakumbuh Tahun 2025 dengan total belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp851.009.111.090,-

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian kinerja.

Dalam mengevaluasi Indikator Kinerja, digunakan interpretasi interval nilai realisasi kinerja guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025

MISI I : MEWUJUDKAN SDM YANG BERKUALITAS

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
I.	Terwujudnya SDM yang Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing (Tujuan 1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,43	81.62	100.23	Sangat Tinggi
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,31	75.54	100.31	Sangat Tinggi
		Prevalensi stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita	Persentase	13,70	16.40	80.29	Tinggi
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persentase	5,81	7.53	70.40	Sedang
2	Meningkatnya Pemerataan kualitas Pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	14,62	14.79	101.16	Sangat Tinggi
3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persentase	4,54	4.95	90.97	Tinggi
4	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66,80	78,5	117,51	Sangat Tinggi
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.151	0.17	87.42	Tinggi

MISI II : MEWUJUDKAN IKLIM EKONOMI YANG KOMPETITIF

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
II.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif (Tujuan 2)	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,02	3,55	70,72	Sedang
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,93	3,92	99,75	Sangat Tinggi
		Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi	Persentase	2,89	2,78	96,19	Sangat Tinggi
		PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Juta Rupiah	72,02	66,037	91,69	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini	Indeks	0,311	0.271	112.86	Sangat Tinggi
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,75	4.96	95.58	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	33,34	33.74	101.20	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya iklim investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rupaih	660	709.65	107.52	Sangat Tinggi

MISI III : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN KONDUSIF

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
III.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan & Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel (Tujuan 3)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84	83.28	99.14	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.75	3.89	103.73	Sangat Tinggi
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.51	4.35	96.45	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.6	89.80	101.35	Sangat Tinggi

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
9	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Prediket/Nilai	78.00	76.31	97.83	Sangat Tinggi
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Nilai	0,17	0.21	123.53	Sangat Tinggi
11	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	Persentase	5,00	14.84	296.80	Sangat Tinggi

MISI IV : MEWUJUDKAN NUANSA IMANI MELALUI PENDEKATAN BUDAYA DAN ADAT

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
IV	Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yg Berlandaskan ABS-SBK (Tujuan 4)	IPK Berbasis ABS SBK	Indeks	72,4	72,09	99,57	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Bermasyarakat	Karya Budaya yang Ditetapkan	Jumlah	1	4	400	Sangat Tinggi
		Cakupan Penguatan Idiologi Panca sila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	58,35	56.65	97.09	Sangat Tinggi

MISI V : MEWUJUDKAN SARANA PERKANTORAN YANG HUMANIS RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
V	Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak huni dan Berkelanjutan (Tujuan 5)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,37	70.67	103.36	Sangat Tinggi

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KATEGORI
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase	19.68	18,96	96,34	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	Indeks	64.09	64.22	100.20	Sangat Tinggi

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

MISI I: MEWUJUDKAN SDM YANG BERKUALITAS

Data Capaian Kinerja Sasaran Misi I Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2024	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
I.	Terwujudnya SDM yang Sehat, Cerdas & Berdaya Saing (Tujuan 1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80.76	81,43	81.62	100.23	Sangat Tinggi
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	75.08	75,31	75.54	100.31	Sangat Tinggi
		Prevalensi stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita	16.40	13,70	16.40	80.29	Tinggi
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	8.17	5,81	7.53	70.40	Sedang
2	Meningkatnya Pemerataan kualitas Pendidikan	Harapan lama sekolah	14.57	14,62	14.79	101.16	Sangat Tinggi
3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5.19	5.29	4.95	90.97	Tinggi
4	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65.6	66,80	65.6	98.20	Sangat Tinggi
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.175	0.151	0.17	87.42	Tinggi

Misi II : MEWUJUDKAN IKLIM EKONOMI YANG KOMPETITIF

Data Capaian Kinerja Sasaran Misi II Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2024	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
II.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif (Tujuan 2)	Pertumbuhan Ekonomi	4.53	5.02	3.55	70.72	Sedang
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.89	3.93	3.92	99.75	Sangat Tinggi
		Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi	2.84	2.89	2.78	96.19	Sangat Tinggi
		PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	64.21	72.02	66.037	91.69	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Pemerataan pendapatan Masyarakat	Rasio Gini	0.313	0.311	0.271	112.86	Sangat Tinggi
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4.87	4.75	4.96	95.58	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya sektor strategis Berbasis Potensi Lokal	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	33.33	33.34	33.74	101.20	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya iklim investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	658.63	660	709.65	107.52	Sangat Tinggi

Sumber Data: BPS 2025 dan hasil monev perangkat daerah diolah

MISI III : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN KONDUSIF

Data Capaian Kinerja Sasaran Misi III Tahun 2025 Dibandingkan dengan Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2024	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
III.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan & Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel (Tujuan 3)	Indeks Reformasi Birokrasi	83.28	84	83.28	99.14	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.75	3.75	3.89	103.73	Sangat Tinggi

		Indeks Pelayanan Publik	4.50	4.51	4.35	96.45	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.37	88.60	89.80	101.35	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	76.01	78	76.31	97.83	Sangat Tinggi
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	0.165	0.17	0.21	123.53	Sangat Tinggi
11	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	28.49	5.00	14.84	296.80	Sangat Tinggi

Sumber : Kementerian PAN-RB, BPK RI, KPK 2025 dan data Olahan BKD dan Satpol PP

MISI IV : MEWUJUDKAN NUANSA IMANI MELALUI PENDEKATAN BUDAYA DAN ADAT

Data Capaian Kinerja Sasaran Misi IV Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2024	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
IV.	Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang Berlandaskan ABS-SBK (Tujuan 4)	IPK Berbasis ABS SBK	72.09	72.40	72.09	99.57	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Karya Budaya yang Ditetapkan	2.00	1.00	4	400.00	Sangat Rendah
		Cakupan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	57.65	58.35	56.65	97.09	Sangat Tinggi

Sumber data : Bapeda, Dinas Parpora dan Dinas Pendidikan 2025.

MISI V : MEWUJUDKAN SARANA PERKOTAAN YANG HUMANIS RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN

**Data Capaian Kinerja Sasaran Misi V Tahun 2025
dibandingkan dengan Tahun 2024**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2024	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	%	
V.	Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak huni dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58.52	68.37	70.67	103.36	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	15.90	19.68	18.96	96.34	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	63.19	64.09	64.22	100.20	Sangat Tinggi

Sumber data : Dinas LH dan Dinas PUPR 2025.

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

MISI I : MEWUJUDKAN SDM YANG BERKUALITAS

**Data Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Misi ke1 Tahun 2025
dibandingkan dengan Target RPJMD**

No	Indikator	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD 2029	Capaian Th 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,43	81.62	100.23	Sangat Tinggi	83.72	97.49
2	Usia Harapan Hidup	75,31	75.54	100.31	Sangat Tinggi	76.36	98.93
3	Prevalensi stunting (Pendek dan sangat pendek) pd balita	13,70	16.40	80.29	Tinggi	8.70	11.49
4	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	5,81	7.53	70.40	Sedang	4.01	12.22
5	Harapan lama sekolah	14,62	14.79	101.16	Sangat Tinggi	15.16	97.56
6	Tingkat Kemiskinan	4.54	4.95	90.97	Tinggi	3.84	71.09
7	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,80	78.50	117.51	Sangat Tinggi	71.10	110.41

No	Indikator	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD 2029	Capaian Th 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.151	0.17	87.42	Tinggi	0.055	-109.09

MISI II : MEWUJUDKAN IKLIM EKONOMI YANG KOMPETITIF

Data Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Misi ke 2 Tahun 2025 dibandingkan dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD 2029	Capaian Th 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %			
9	Pertumbuhan Ekonomi	5.02	3.55	70.72	sedang	7.65	46.41
10	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.93	3.92	99.75	Sangat Tinggi	4.09	95.84
11	Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi	2.89	2.78	96.19	Sangat Tinggi	3.07	90.55
12	PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	72.02	66.037	91.69	Sangat Tinggi	166.29	39.91
13	Rasio Gini	0.311	0.271	112.86	Sangat Tinggi	0.306	111.44
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.75	4.96	95.58	Sangat Tinggi	4.33	85.45
15	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	33.34	33.74	101.20	Sangat Tinggi	33.38	101.08
16	Nilai Realisasi Investasi	660	709.65	107.52	Sangat Tinggi	680.00	104.36

Sumber Data: BPS 2025 dan hasil money perangkat daerah diolah

**) data proyeksi

MISI III : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN KONDUSIF

Data Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Misi ke 3 Tahun 2025 dibandingkan dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	2025				Target Akhir RPJMD 2029	Capaian Th 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %	Kategori		
17	Indeks Reformasi Birokrasi	84.00	83.28	99.14	Sangat Tinggi	88.00	94.64
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.75	3.89	103.73	Sangat Tinggi	4.12	94.42

No	Indikator Kinerja	2025				Target Akhir RPJMD 2029	Capaian Th 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %	Kategori		
19	Indeks Pelayanan Publik	4.51	4.35	96.45	Sangat Tinggi	4.55	95.60
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.60	89.80	101.35	Sangat Tinggi	88.95	100.96
21	Nilai Evaluasi AKIP Kota	78	76.31	97.83	Sangat Tinggi	83.00	91.94
22	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	WTP	100
23	Rasio PAD terhadap APBD	0.17	0.21	123.53	Sangat Tinggi	0.21	100.00
24	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	5.00	14.84	296.80	Sangat Tinggi	5.00	296.80

Sumber : Kementerian PAN-RB, BPK RI, KPK 2025 dan data Olahan BKD dan Satpol PP

MISI IV : MEWUJUDKAN NUANSA IMANI MELALUI PENDEKATAN BUDAYA DAN ADAT

Data Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Misi ke 4 Tahun 2025 dibandingkan dengan Target RPJMD

	Indikator Kinerja	2025				Target Akhir RPJMD 2029	Capaian Th 2025 thdp RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %	Kategori		
25	IPK Berbasis ABS SBK	72.40	72.09	99.57	Sangat Tinggi	75.05	96.06
26	Karya Budaya yang Ditetapkan	1.00	4.00	400.00	Sangat Tinggi	5.00	80.00
27	Cakupan Pengua-tan Idiologi Panca sila dan Karakter Kebangsaan	58.35	56.65	97.09	Sangat Tinggi	59.30	95.53

Sumber data : Bapeda, Dinas Parpورا dan Dinas Pendidikan 2025.

MISI V : MEWUJUDKAN SARANA PERKOTAAN YANG HUMANIS RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN

Data Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Misi ke 5 Tahun 2025 dibandingkan dengan Target RPJMD

No	Indikator	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD 2029	Capaian tahun 2025 terhadap RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Nilai Capaian %			
28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68.37	70.67	103.36	Sangat Tinggi	69.22	102.09
29	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	19.68	18.96	96.34	Sangat Tinggi	34.79	54.50
30	Indeks Infrastruktur	64.09	64.22	100.20	Sangat Tinggi	67.51	95.13

2.3.5 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (Kinerja) yang telah dicapai.

Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 14 (empat belas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebesar Rp851.009.111.090,- dan terealisasi sebesar Rp758.277.667.943,- atau sebesar 89,10%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 14 (empat belas) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp92.731.443.147,- atau 10,90%. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Kota Payakumbuh dapat disimpulkan bahwa, anggaran yang digunakan efektif dan efisien terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Dikaitkan dengan hasil kinerja atau ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 14 (empat belas) Sasaran Strategis dengan 30 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, bahwa 25 indikator atau 83.33 % mencapai target bermakna **Sangat Tinggi**, 3 Indikator atau **10.00%** dengan capaian bermakna **Tinggi** dan 2 indikator atau 6.67% dengan capaian target bermakna

sedang. Jadi jika di total Rata-rata capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2025 sebesar **114,66%** bermakna **Sangat Tinggi**, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar **113,95%**, mengalami **peningkatan** sebesar **0,71%**.

Peningkatan total rata-rata capaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2025 terjadi karena beberapa indikator Kinerja realisasinya tercapai sehingga mempengaruhi hasil capaian rata-rata Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh secara keseluruhan.

Penyebab dari Peningkatan total rata-rata capaian indikator kinerja tersebut adalah karena Komitmen seluruh stake holder di Kota Payakumbuh untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati, sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan lancar guna menunjang pencapaian target Indikator Kinerja Pemerintah Kota.

2.3.6 Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 14 (dua belas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program
Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN		BELANJA DAERAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%
I	MISI : MEWUJUDKAN SDM YANG BERKUALITAS				
	TUJUAN : TERWUJUDNYA SDM YANG SEHAT, CERDAS DAN BERDAYASAING				
1	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		66,582,171,224.00	61,437,251,926.00	92.27
	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	37,668,972,024.00	34,808,100,567.00	92.41

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN			BELANJA DAERAH		
				ANGGARAN	REALISASI	%
	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		15,099,681,724.00	13,697,019,612.00	90.71
	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		22,410,766,850.00	21,049,281,007.00	93.92
	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		115,950,000.00	36,900,000.00	31.82
	4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		42,573,450.00	24,899,948.00	58.49
	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		511,696,900.00	389,974,269.00	76.21
	1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		5,001,000.00	4,479,000.00	89.56
	2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		506,695,900.00	385,495,269.00	76.08
	3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		514,182,600.00	451,249,661.00	87.76
	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		6,028,000.00	5,604,390.00	92.97
	2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		435,942,900.00	376,366,077.00	86.33
	3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		72,211,700.00	69,279,194.00	95.94
	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1,233,954,150.00	1,206,980,578.00	97.81
	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,088,028,200.00	1,077,571,192.00	99.04
	2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		69,748,800.00	58,480,910.00	83.85
	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		76,177,150.00	70,928,476.00	93.11
	5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		26,030,109,500.00	24,020,217,230.00	92.28
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		26,030,109,500.00	24,020,217,230.00	92.28
	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		117,590,700.00	100,052,721.00	85.09
	1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		117,590,700.00	100,052,721.00	85.09

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN		BELANJA DAERAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%
7	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		65,872,650.00	63,737,786.00	96.76
	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	65,872,650.00	63,737,786.00	96.76
8	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		10,946,000.00	10,280,037.00	93.92
	1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	5,066,000.00	4,818,943.00	95.12
	2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5,880,000.00	5,461,094.00	92.88
9	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		428,846,700.00	386,659,077.00	90.16
	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	182,276,750.00	164,164,814.00	90.06
	2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	6,229,000.00	5,752,169.00	92.34
	3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	240,340,950.00	216,742,094.00	90.18
2	MENINGKATNYA PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN		55,351,091,620.00	52,331,079,724.00	94.54
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		48,895,464,645.00	46,381,968,683.00	94.86
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	23,100,041,863.00	23,505,307,522.00	101.75
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12,744,995,214.00	10,195,687,713.00	80.00
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8,442,276,810.00	8,294,099,962.00	98.24
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4,608,150,758.00	4,386,873,486.00	95.20
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		118,017,050.00	107,746,443.00	91.30
	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	118,017,050.00	107,746,443.00	91.30
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		91,918,000.00	65,088,308.00	70.81
	1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	91,918,000.00	65,088,308.00	70.81
4	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		491,349,170.00	482,701,387.00	98.24
	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	466,024,870.00	458,426,463.00	98.37
	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,324,300.00	24,274,924.00	95.86
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		126,593,750.00	86,605,663.00	68.41
	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	76,940,000.00	52,333,405.00	68.02
	2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49,653,750.00	34,272,258.00	69.02
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING		5,190,088,005.00	4,791,068,063.00	92.31

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN		BELANJA DAERAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%
		KEOLAHRAGAAN			
	1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,289,201,755.00	1,254,800,055.00	97.33
	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,471,686,750.00	3,255,048,484.00	93.76
	3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	429,199,500.00	281,219,524.00	65.52
	7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	437,661,000.00	415,901,177.00	95.03
	1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	437,661,000.00	415,901,177.00	95.03
3	MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN		1,642,013,400.00	1,541,791,382.00	93.90
	1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	680,239,850.00	649,623,796.00	95.50
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	680,239,850.00	649,623,796.00	95.50
	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	390,482,500.00	374,508,826.00	95.91
	1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6,093,500.00	5,825,920.00	95.61
	2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	384,389,000.00	368,682,906.00	95.91
	3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	571,291,050.00	517,658,760.00	90.61
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	571,291,050.00	517,658,760.00	90.61
4	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		3,012,227,000.00	2,450,629,705.00	81.36
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,315,538,500.00	1,139,473,835.00	86.62
	1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	708,338,500.00	539,313,835.00	76.14
	2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	607,200,000.00	600,160,000.00	98.84
	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-
	3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	261,055,350.00	118,325,613.00	45.33
	1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	110,709,400.00	82,679,460.00	74.68
	2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107,759,500.00	14,800,668.00	13.73

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN			BELANJA DAERAH		
				ANGGARAN	REALISASI	%
		3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42,586,450.00	20,845,485.00	48.95
	4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		76,201,500.00	73,872,081.00	96.94
		1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	6,807,200.00	6,413,950.00	94.22
		2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	69,394,300.00	67,458,131.00	97.21
	5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		265,588,250.00	176,710,051.00	66.54
		1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	118,237,000.00	116,185,169.00	98.26
		2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	97,314,750.00	17,921,897.00	18.42
		3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,036,500.00	42,602,985.00	85.14
	6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		583,813,650.00	487,248,927.00	83.46
		1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	340,844,650.00	255,444,746.00	74.94
		2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	242,969,000.00	231,804,181.00	95.40
	7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		7,666,700.00	7,082,049.00	92.37
		1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,666,700.00	7,082,049.00	92.37
	8	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		73,516,350.00	61,258,072.00	83.33
		1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	73,516,350.00	61,258,072.00	83.33
	9	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		428,846,700.00	386,659,077.00	90.16
		1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	182,276,750.00	164,164,814.00	90.06
		2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	6,229,000.00	5,752,169.00	92.34
		3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	240,340,950.00	216,742,094.00	90.18

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN		BELANJA DAERAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%
II	MISI 2 : MEWUJUDKAN IKLIM EKONOMI YANG KOMPETITIF				
	TUJUAN : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS				
5	MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT		1,266,560,438.00	1,218,608,904.00	96.21
	1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	400,274,800.00	380,009,650.00	94.94
	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	97,031,700.00	88,148,903.00	90.85
	2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	18,603,350.00	17,333,175.00	93.17
	3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	274,036,900.00	264,228,791.00	96.42
	4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	10,602,850.00	10,298,781.00	97.13
	2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	753,513,636.00	730,856,801.00	96.99
	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	731,787,386.00	710,518,871.00	97.09
	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	21,726,250.00	20,337,930.00	93.61
	3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	91,277,502.00	87,525,495.00	95.89
	1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	29,974,450.00	28,048,471.00	93.57
	2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	61,303,052.00	59,477,024.00	97.02
	4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	21,494,500.00	20,216,958.00	94.06
	1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	21,494,500.00	20,216,958.00	94.06
6	MENINGKATNYA SEKTOR STRATEGIS BERBASIS POTENSI LOKAL		14,973,260,879.00	13,297,842,786.00	88.81
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	161,207,650.00	160,444,584.00	99.53
	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	161,207,650.00	160,444,584.00	99.53
	2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	19,749,200.00	19,234,409.00	97.39
	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	19,749,200.00	19,234,409.00	97.39
	3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	14,999,550.00	14,764,502.00	98.43
	1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14,999,550.00	14,764,502.00	98.43
	4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	75,999,470.00	75,260,845.00	99.03
	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75,999,470.00	75,260,845.00	99.03
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	84,846,850.00	83,770,992.00	98.73
	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	84,846,850.00	83,770,992.00	98.73

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN		BELANJA DAERAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%
	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	108,231,900.00	107,588,901.00	99.41
	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	108,231,900.00	107,588,901.00	99.41
	7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5,098,792,578.00	4,592,280,173.00	90.07
	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3,660,805,928.00	3,254,975,181.00	88.91
	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1,437,986,650.00	1,337,304,992.00	93.00
	8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	184,848,000.00	180,256,092.00	97.52
	1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	166,885,950.00	163,055,156.00	97.70
	2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17,962,050.00	17,200,936.00	95.76
	9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	59,086,700.00	57,677,752.00	97.62
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	59,086,700.00	57,677,752.00	97.62
	10	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	428,846,700.00	386,659,077.00	90.16
	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	182,276,750.00	164,164,814.00	90.06
	2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	6,229,000.00	5,752,169.00	92.34
	3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	240,340,950.00	216,742,094.00	90.18
	11	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	7,957,750.00	7,523,405.00	94.54
	1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7,957,750.00	7,523,405.00	94.54
	12	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	10,946,000.00	10,280,037.00	93.92
	1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	5,066,000.000	4,818,943.000	95.12
	2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5,880,000.000	5,461,094.000	92.88
	13	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	58,206,550.00	53,814,162.00	92.45
	1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	58,206,550.00	53,814,162.00	92.45

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN		BELANJA DAERAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%
	14	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	41,415,150.00	39,642,333.00	95.72
	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	41,415,150.00	39,642,333.00	95.72
	15	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	409,289,200.00	196,991,034.00	48.13
	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	409,289,200.00	196,991,034.00	48.13
	16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	691,142,434.00	627,119,172.00	90.74
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	691,142,434.00	627,119,172.00	90.74
	17	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15,190,900.00	14,301,072.00	94.14
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	15,190,900.00	14,301,072.00	94.14
	18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	461,976,700.00	251,568,418.00	54.45
	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	461,976,700.00	251,568,418.00	54.45
	19	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	360,601,120.00	329,663,949.00	91.42
	1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	360,601,120.00	329,663,949.00	91.42
	20	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	346,612,550.00	226,972,120.00	65.48
	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	346,612,550.00	226,972,120.00	65.48
	21	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	346,316,250.00	281,716,636.00	81.35
	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	346,316,250.00	281,716,636.00	81.35
	22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3,530,340,616.00	3,325,724,585.00	94.20
	1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	432,180,354.00	389,638,913.00	90.16
	2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	226,129,712.00	142,726,976.00	63.12
	3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	354,151,650.00	309,825,256.00	87.48
	4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	49,053,000.00	45,137,170.00	92.02
	5	Pengembangan Prasarana Pertanian	305,597,900.00	303,864,494.00	99.43
	6	Pembangunan Prasarana Pertanian	2,163,228,000.00	2,134,531,776.00	98.67
	23	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	769,131,780.00	708,097,948.00	92.06
	1	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	175,599,328.00	166,069,359.00	94.57

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN			BELANJA DAERAH		
				ANGGARAN	REALISASI	%
	2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		452,606,186.00	405,093,174.00	89.50
	3	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		140,926,266.00	136,935,415.00	97.17
	24	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		959,432,631.00	898,805,793.00	93.68
	1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		629,473,050.00	608,866,850.00	96.73
	2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		329,959,581.00	289,938,943.00	87.87
	25	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		71,272,500.00	64,713,551.00	90.80
	1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		71,272,500.00	64,713,551.00	90.80
	26	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		26,679,000.00	22,075,035.00	82.74
	1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		26,679,000.00	22,075,035.00	82.74
	27	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		49,999,100.00	47,409,247.00	94.82
	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		49,999,100.00	47,409,247.00	94.82
	28	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		17,773,750.00	15,873,882.00	89.31
	1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		17,773,750.00	15,873,882.00	89.31
	29	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		542,688,950.00	478,877,938.00	88.24
	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		542,688,950.00	478,877,938.00	88.24
	30	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		19,679,350.00	18,735,142.00	95.20
	1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		19,679,350.00	18,735,142.00	95.20
7	MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI DAERAH			1,178,356,155.00	1,060,661,047.00	90.01
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		56,014,950.00	54,386,575.00	97.09
	1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		56,014,950.00	54,386,575.00	97.09
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		54,922,300.00	18,753,060.00	34.14
	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		54,922,300.00	18,753,060.00	34.14
	2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		351,349,471.00	325,190,080.00	92.55
	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		351,349,471.00	325,190,080.00	92.55

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN		BELANJA DAERAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%
	3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	41,660,800.00	25,137,674.00	60.34
	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41,660,800.00	25,137,674.00	60.34
	4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	38,188,500.00	28,827,546.00	75.49
	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38,188,500.00	28,827,546.00	75.49
	5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	691,142,434.00	627,119,172.00	90.74
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	691,142,434.00	627,119,172.00	90.74
III	MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN KONDUSIF				
	TUJUAN : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL				
8	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		597,421,088,248.00	541,768,638,517.00	90.68
	1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3,486,252,900.00	3,108,144,311.00	89.15
	1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,486,252,900.00	3,108,144,311.00	89.15
	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,435,811,072.00	1,252,262,727.00	87.22
	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,435,811,072.00	1,252,262,727.00	87.22
	3	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	208,184,820.00	200,885,944.00	96.49
	1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	149,989,070.00	146,403,645.00	97.61
	2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	58,195,750.00	54,482,299.00	93.62
	4	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	203,848,084.00	198,458,080.00	97.36
	1	Pelayanan Pencatatan Sipil	182,779,384.00	177,899,688.00	97.33
	2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	21,068,700.00	20,558,392.00	97.58
	5	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	255,927,200.00	219,177,243.00	85.64
	1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	12,991,400.00	12,264,134.00	94.40
	2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37,639,250.00	35,061,545.00	93.15
	3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	205,296,550.00	171,851,564.00	83.71
	6	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	25,210,750.00	23,523,287.00	93.31
	1	Penyusunan Profil Kependudukan	25,210,750.00	23,523,287.00	93.31
	7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	214,179,000.00	192,888,236.00	90.06
	1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	17,979,000.00	16,039,330.00	89.21

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN			BELANJA DAERAH		
				ANGGARAN	REALISASI	%
		2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	196,200,000.00	176,848,906.00	90.14
	8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		1,680,331,000.00	1,514,615,617.00	90.14
		1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	541,800,000.00	417,870,136.00	77.13
		2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	662,024,000.00	654,424,906.00	98.85
		3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	213,307,000.00	201,566,200.00	94.50
		4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	263,200,000.00	240,754,375.00	91.47
	9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		351,349,471.00	325,190,080.00	92.55
		1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	351,349,471.00	325,190,080.00	92.55
	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		577,074,610,098.00	523,194,254,648.00	90.66
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125,759,700.00	119,721,603.00	95.20
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	389,479,606,534.00	344,640,626,271.00	88.49
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	83,275,000.00	83,034,260.00	99.71
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,522,778,130.00	2,358,581,068.00	93.49
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13,414,991,276.00	12,689,901,433.00	94.59
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19,479,846,692.00	18,126,021,920.00	93.05
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,324,207,809.00	19,780,348,239.00	92.76
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,584,913,296.00	12,307,093,365.00	90.59
		9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,644,569,667.00	1,531,360,881.00	93.12
		10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1,244,148,700.00	1,212,371,553.00	97.45
		11	Penataan Organisasi	283,644,850.00	278,557,526.00	98.21
		12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,057,041,032.00	1,808,687,163.00	87.93
		13	Peningkatan pelayanan BLUD	102,272,320,284.00	96,621,948,328.00	94.48
		14	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9,384,212,008.00	9,146,947,140.00	97.47
		15	Layanan Administrasi DPRD	173,295,120.00	162,251,540.00	93.63
	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		168,319,750.00	152,730,983.00	90.74
		1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	138,803,500.00	126,598,119.00	91.21

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN			BELANJA DAERAH		
				ANGGARAN	REALISASI	%
		2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	29,516,250.00	26,132,864.00	88.54
	12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		11,811,782,753.00	10,966,603,694.00	92.84
		1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11,486,624,753.00	10,661,991,337.00	92.82
		2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	325,158,000.00	304,612,357.00	93.68
	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		505,281,350.00	419,903,667.00	83.10
		1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	505,281,350.00	419,903,667.00	83.10
9	MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL			605,154,576,634.00	543,265,592,457.00	89.77
	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		709,330,250.00	695,178,910.00	98.00
		1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	550,035,750.00	538,370,160.00	97.88
		2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	159,294,500.00	156,808,750.00	98.44
	2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		298,575,250.00	291,224,194.00	97.54
		1	Pendampingan dan Asistensi	298,575,250.00	291,224,194.00	97.54
	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		577,074,610,098.00	523,194,254,648.00	90.66
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125,759,700.00	119,721,603.00	95.20
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	389,479,606,534.00	344,640,626,271.00	88.49
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	83,275,000.00	83,034,260.00	99.71
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,522,778,130.00	2,358,581,068.00	93.49
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13,414,991,276.00	12,689,901,433.00	94.59
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19,479,846,692.00	18,126,021,920.00	93.05
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,324,207,809.00	19,780,348,239.00	92.76
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,584,913,296.00	12,307,093,365.00	90.59
		9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,644,569,667.00	1,531,360,881.00	93.12
		10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1,244,148,700.00	1,212,371,553.00	97.45
		11	Penataan Organisasi	283,644,850.00	278,557,526.00	98.21
		12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,057,041,032.00	1,808,687,163.00	87.93
		13	Peningkatan pelayanan BLUD	102,272,320,284.00	96,621,948,328.00	94.48
		14	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9,384,212,008.00	9,146,947,140.00	97.47
		15	Layanan Administrasi DPRD	173,295,120.00	162,251,540.00	93.63
	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		596,906,500.00	574,193,520.00	96.19
		1	Pengembangan Kompetensi Teknis	188,578,750.00	184,241,705.00	97.70
		2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	408,327,750.00	389,951,815.00	95.50

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN		BELANJA DAERAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%
	5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	270,408,400.00	270,267,861.00	99.95
	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	99,999,700.00	99,972,489.00	99.97
	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	99,999,700.00	99,973,023.00	99.97
	3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	70,409,000.00	70,322,349.00	99.88
	6	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,280,048,050.00	1,062,938,427.00	83.04
	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	125,472,700.00	120,186,208.00	95.79
	2	Mutasi dan Promosi ASN	698,838,600.00	564,931,137.00	80.84
	3	Pengembangan Kompetensi ASN	371,439,000.00	322,264,565.00	86.76
	4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	84,297,750.00	55,556,517.00	65.91
	7	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	667,788,100.00	646,854,516.00	96.87
	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	464,774,950.00	449,101,613.00	96.63
	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	11,429,500.00	11,336,278.00	99.18
	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,809,750.00	96,636,350.00	95.86
	4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	90,773,900.00	89,780,275.00	98.91
	8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	555,523,000.00	447,338,036.00	80.53
	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	246,301,000.00	245,416,190.00	99.64
	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	101,916,550.00	8,654,699.00	8.49
	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	207,305,450.00	193,267,147.00	93.23
	9	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9,475,451,084.00	2,387,629,983.00	25.20
	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,534,697,600.00	1,411,379,515.00	91.96
	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	441,428,450.00	299,155,877.00	67.77
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	302,219,300.00	279,369,250.00	92.44
	4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6,726,011,484.00	4,500,000.00	0.07
	5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	471,094,250.00	393,225,341.00	83.47
	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	54,182,500.00	53,121,580.00	98.04
	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54,182,500.00	53,121,580.00	98.04
	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	112,822,752.00	109,590,425.00	97.14
	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	112,822,752.00	109,590,425.00	97.14

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN		BELANJA DAERAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%
	12	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	90,347,900.00	65,128,866.00	72.09
	1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	36,355,900.00	35,477,386.00	97.58
	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	53,992,000.00	29,651,480.00	54.92
	13	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13,968,582,750.00	13,467,871,491.00	96.42
	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	77,769,450.00	40,828,827.00	52.50
	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	428,231,250.00	267,935,332.00	62.57
	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	86,583,050.00	43,408,392.00	50.13
	4	Peningkatan Kapasitas DPRD	1,248,756,000.00	1,160,740,684.00	92.95
	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5,450,840,000.00	5,283,835,564.00	96.94
	6	Fasilitasi Tugas DPRD	6,676,403,000.00	6,671,122,692.00	99.92
10	MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH		1,178,032,435.00	1,024,047,824.00	86.93
	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,178,032,435.00	1,024,047,824.00	86.93
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,178,032,435.00	1,024,047,824.00	86.93
11	TERCIPTANYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT		7,170,909,422.00	6,921,916,063.00	96.53
	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,202,004,266.00	4,149,330,160.00	98.75
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,437,146,866.00	3,403,433,063.00	99.02
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	764,857,400.00	745,897,097.00	97.52
	2	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61,997,100.00	53,362,597.00	86.07
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	61,997,100.00	53,362,597.00	86.07
	3	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	428,370,100.00	422,061,573.00	98.53
	2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	428,370,100.00	422,061,573.00	98.53
	4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	456,866,850.00	439,324,387.00	96.16
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	24,999,900.00	23,162,580.00	92.65
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	309,008,250.00	297,605,419.00	96.31
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	102,868,250.00	100,951,949.00	98.14
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	19,990,450.00	17,604,439.00	88.06
	5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	103,249,800.00	46,727,135.00	45.26
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	83,212,800.00	27,274,535.00	32.78
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	20,037,000.00	19,452,600.00	97.08

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN			BELANJA DAERAH		
				ANGGARAN	REALISASI	%
	6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		124,217,500.00	112,628,187.00	90.67
		1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	124,217,500.00	112,628,187.00	90.67
	7	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1,794,203,806.00	1,698,482,024.00	94.66
		1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,665,699,606.00	1,574,243,155.00	94.51
		2	Investigasi Kejadian Kebakaran	6,494,450.00	6,275,601.00	96.63
		3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	61,874,750.00	60,100,294.00	97.13
		4	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	60,135,000.00	57,862,974.00	96.22
IV	MISI 4 : MEWUJUDKAN NUANSA IMANI MELALUI PENDEKATAN BUDAYA DAN ADAT					
	TUJUAN : TERWUJUDNYA KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT YANG BERLANDASKAN ABS SBK					
12	MENINGKATNYA PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT			8,433,501,303.00	7,741,624,040.00	91.80
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		1,582,388,850.00	1,343,433,866.00	84.90
		1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60,712,600.00	59,291,704.00	97.66
		2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	338,334,900.00	243,000,845.00	71.82
		3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,183,341,350.00	1,041,141,317.00	87.98
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		74,097,300.00	70,842,104.00	95.61
		1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	74,097,300.00	70,842,104.00	95.61
	3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		18,807,800.00	18,474,510.00	98.23
		1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	18,807,800.00	18,474,510.00	98.23
	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		120,621,590.00	117,048,430.00	97.04
		1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	120,621,590.00	117,048,430.00	97.04
	5	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		12,204,700.00	11,593,950.00	95.00
		1	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12,204,700.00	11,593,950.00	95.00
	6	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		840,015,600.00	812,149,094.00	96.68
		1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	840,015,600.00	812,149,094.00	96.68

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN		BELANJA DAERAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%
	7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	882,230,113.00	872,795,705.00	98.93
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	882,230,113.00	872,795,705.00	98.93
	8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	119,924,100.00	114,154,499.00	95.19
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	119,924,100.00	114,154,499.00	95.19
	9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	225,995,650.00	224,830,756.00	99.48
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	225,995,650.00	224,830,756.00	99.48
	10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4,557,215,600.00	4,156,301,126.00	91.20
	1	Administrasi Tata Pemerintahan	654,010,050.00	601,877,746.00	92.03
	2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3,247,850,150.00	3,053,562,263.00	94.02
	3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	637,771,000.00	484,181,194.00	75.92
	4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	17,584,400.00	16,679,923.00	94.86
V	MISI 5 : MEWUJUDKAN SARANA PERKOTAAN YANG HUMANIS RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN				
	TUJUAN : TERWUJUDNYA KAWASAN PERKOTAAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN				
13	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		31,784,669,214.00	25,320,069,893.00	79.66
	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	358,157,160.00	224,964,423.00	62.81
	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	358,157,160.00	224,964,423.00	62.81
	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2,083,640,010.00	2,046,496,525.00	98.22
	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2,083,640,010.00	2,046,496,525.00	98.22
	2	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	12,646,310.00	10,784,248.00	85.28
	3	Penyimpanan sementara Limbah B3	12,646,310.00	10,784,248.00	85.28
	3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	176,422,130.00	155,261,791.00	88.01
	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	176,422,130.00	155,261,791.00	88.01
	4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN	663,807,580.00	547,668,192.00	82.50

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN		BELANJA DAERAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%
		DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
	1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	663,807,580.00	547,668,192.00	82.50
	5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	418,544,862.00	368,804,233.00	88.12
	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	418,544,862.00	368,804,233.00	88.12
	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	17,282,104,886.00	13,234,076,864.00	76.58
	1	Pengelolaan Sampah	17,282,104,886.00	13,234,076,864.00	76.58
	7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7,440,516,988.00	5,878,961,701.00	79.01
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7,440,516,988.00	5,878,961,701.00	79.01
	8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,684,847,800.00	2,634,674,109.00	98.13
	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2,684,847,800.00	2,634,674,109.00	98.13
	9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	-
	10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	511,807,910.00	180,580,607.00	35.28
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	175,761,710.00	97,621,078.00	55.54
	2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	102,090,550.00	73,813,099.00	72.30
	3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	203,197,200.00	-	0.00
	4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	19,999,950.00	-	0.00
	5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10,758,500.00	9,146,430.00	85.02
	11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	164,819,888.00	48,581,448.00	29.48
	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	164,819,888.00	48,581,448.00	29.48
14	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS		40,767,202,330.00	39,428,463,238.00	96.72
	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	10,732,636,531.00	10,142,904,720.00	94.51
	1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	10,732,636,531.00	10,142,904,720.00	94.51
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	335,264,256.00	270,474,962.00	80.68
	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	204,080,000.00	164,136,653.00	80.43
	2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	73,377,756.00	63,763,308.00	86.90
	3	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	57,806,500.00	42,575,001.00	73.65
	3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11,335,901,482.00	11,105,772,348.00	97.97

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN			BELANJA DAERAH		
				ANGGARAN	REALISASI	%
	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4,769,833,960.00	4,706,198,028.00	98.67
	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		6,566,067,522.00	6,399,574,320.00	97.46
	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		217,787,500.00	216,570,505.00	99.44
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		217,787,500.00	216,570,505.00	99.44
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		2,816,415,195.00	2,667,546,299.00	94.71
	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		2,816,415,195.00	2,667,546,299.00	94.71
	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		8,674,144,922.00	8,615,322,697.00	99.32
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		8,674,144,922.00	8,615,322,697.00	99.32
	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		2,948,296,620.00	2,784,130,894.00	94.43
	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1,161,592,800.00	1,099,806,576.00	94.68
	2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1,118,911,070.00	1,030,339,216.00	92.08
	3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		363,250,750.00	358,320,287.00	98.64
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		304,542,000.00	295,664,815.00	97.09
	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		304,658,512.00	283,243,332.00	92.97
	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		304,658,512.00	283,243,332.00	92.97
	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		2,972,127,400.00	2,931,882,285.00	98.65
	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		2,972,127,400.00	2,931,882,285.00	98.65
	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		390,302,662.00	371,338,731.00	95.14
	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		116,555,500.00	113,507,003.00	97.38
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		46,700,252.00	44,630,985.00	95.57
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		227,046,910.00	213,200,743.00	93.90
	11	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		39,667,250.00	39,276,465.00	99.01

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/POGRAM/KEGIATAN		BELANJA DAERAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%
	1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	39,667,250.00	39,276,465.00	99.01
		JUMLAH TOTAL	851,009,111,090.00	765,455,545,090.00	89.95

Sumber Data : BKD Kota Payakumbuh Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 14 (empat belas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Revisi Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebesar Rp851.009.111.090,- dan terealisasi sebesar Rp765.455.545.090,- atau sebesar 89,95%. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap pencapaian Tujuan Pemerintah Kota Payakumbuh dapat disimpulkan bahwa, anggaran yang digunakan efektif terhadap pencapaian kinerja organisasi.

2.3.7 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Penghargaan Digitalisasi Keuangan



Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman menjadi narasumber dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Rabu

(12/3/2025). Pada kesempatan itu Payakumbuh dinobatkan sebagai **Daerah Terbaik Nasional Wilayah Sumatera dalam Implementasi Digitalisasi Keuangan Daerah.**

2. Penghargaan Teknologi Tepat Guna



Pemerintah Kota Payakumbuh kembali mengukir prestasi gemilang di bidang inovasi. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Senin (2/6/2025), Kota Payakumbuh dinobatkan sebagai **Juara 1 Kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)**

Tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat bersama Ketua DPRD Provinsi kepada perwakilan Kota Payakumbuh. Ini menjadi kemenangan keempat secara berturut-turut yang diraih kota tersebut dalam ajang serupa sejak 2022.

3. Penghargaan Tryout UTBK



Abinsya Akbar Ramadhan, siswa SMA Negeri 2 Payakumbuh, berhasil meraih **nilai tertinggi secara nasional dalam program Ilmupedia Tryout UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) 2025.** Program ini diikuti oleh lebih dari 18 ribu pelajar tingkat SMA/ sederajat

dari berbagai daerah di Indonesia. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di aula SMAN 2 Payakumbuh, Kamis (03/07/2025), sebagai bentuk apresiasi dari Telkomsel atas capaian luar biasa tersebut. Tryout UTBK 2025 ini merupakan hasil kolaborasi Telkomsel dengan platform pembelajaran digital Kuncie yang digelar secara hybrid, menggabungkan sesi online dan offline.

4. Penghargaan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi



Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menerima kunjungan resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat di ruang kerjanya, Rabu (23/07/2025). Kunjungan ini dalam rangka

penyerahan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat terkait penetapan pemenang Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Nagari DPMD Sumbar, Desrianto Boy, menyerahkan langsung SK Gubernur kepada Wakil Wali Kota Elzadaswarman. Berdasarkan keputusan tersebut, Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh Barat, ditetapkan sebagai **Juara I Tingkat Provinsi Sumatera Barat** dengan nilai tertinggi, yakni 90,72. Prestasi ini sekaligus mengantarkan Koto Tangah sebagai wakil Sumatera Barat dalam Lomba Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2025.

5. Penghargaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) ke- VIII



Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta memberikan apresiasi tinggi kepada para atlet Kota Payakumbuh yang sukses mengharumkan nama daerah pada **Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII** di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (13/8/2025). Bersama Ketua KORMI Kota Payakumbuh YB Dt. Parmato Alam dan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Nofriwandi, Wali Kota mengundang seluruh atlet yang berprestasi untuk menerima penghargaan secara langsung. Momentum ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyemangat bagi para pegiat olahraga rekreasi di Payakumbuh.

6. Penghargaan Verka V3 International Inline Skate Open 2025



Kontingen sepatu roda Kota Payakumbuh berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada ajang **Verka V3 International Inline Skate Open 2025** yang digelar di Jakarta International Roller Track Arena (JIRTA), Sunter, Jakarta Utara, 29-31 Agustus 2025. Kepulangan

kontingen disambut langsung oleh Wakil Wali Kota (Wawako) Payakumbuh, Elzadaswarman, di arena sepatu roda kawasan GOR Nan Ompek, Minggu (07/09/2025). "Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan keluarga dan klub, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Payakumbuh, bahkan Indonesia. Anak-anak kita telah membuktikan bahwa generasi muda Payakumbuh mampu bersaing di kancah olahraga internasional," kata Wawako Elzadaswarman.

7. Penghargaan Kelompok Dasa Wisma Berprestasi



Kelompok Dasa Wisma Teratai Putih IV dari Kelurahan Sungai Durian berhasil meraih **Juara III Lomba Ketua Kelompok Dasa Wisma Berprestasi** saat Temu Kader PKK Berprestasi dan Pekan Kreativitas Dasa Wisma Tahun 2025 yang digelar di Gedung Youth Center, Bagindo

Aziz Chan, Padang, Rabu (23/10/2025). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Harneli Mahyeldi, didampingi Ny. Dianita Vasko, kepada Ketua Kelompok Dasa Wisma Teratai Putih IV Susi Febri Ariza, bersama Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Ny. Eni Zulmaeta, didampingi Ny. Yeni Elzadaswarman.

8. Penghargaan Inovasi Geospasial Tahun 2025



Kota Payakumbuh kembali mencatatkan namanya di tingkat nasional setelah menerima penghargaan dalam ajang **Inovasi Geospasial Tahun 2025**. Hanya 15 inovasi terbaik yang dipilih sebagai penerima

penghargaan. Dan Payakumbuh, kota kecil dengan sumber daya terbatas, berhasil masuk ke dalam kelompok tersebut. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama BIG, Belinda Arunarwati Margono, kepada Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Selasa (18/11/2025).

9. Penghargaan Ajang Anugerah Inovasi Award Kota Payakumbuh Tahun 2025



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Payakumbuh kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih predikat sebagai **OPD Terinovasi dalam ajang Anugerah Inovasi Award Kota Payakumbuh Tahun 2025**.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Payakumbuh melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman, kepada Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wal Asri, pada gelaran puncak penganugerahan yang digelar oleh Bappeda Kota Payakumbuh, di Aula Ngalau Indah Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh. Rabu (26/11/2025).

10. Penghargaan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025



Kota Payakumbuh kembali meraih pengakuan nasional sebagai **kota terbaik kawasan Sumatera** dalam ajang **Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025**. Raihan tersebut

diumumkan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Graha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat lalu. Dan penghargaan itu kemudian diterima oleh Kepala BKD Kota Payakumbuh, Andri Narwan, mewakili Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, pada Senin (01/12/2025).

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuannya adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan pemerintahan absolut yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah. Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekwensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas

penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan arah kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia dalam mendukung Swasembada Pangan 2025, Satuan Kerja (Satker) yang difokuskan pada peningkatan produksi pangan (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Sarana dan Prasarana) memiliki tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai kemandirian pangan nasional lebih cepat dari target semula. Hal ini sejalan dengan ***Asta Cita (visi ke-2)***, khususnya dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Hubungan keduanya bersifat strategis: swasembada pangan digunakan untuk memastikan kedaulatan, kesejahteraan petani, dan stabilitas nasional, yang didukung melalui rehabilitasi irigasi, reformasi pupuk subsidi, dan mekanisasi pertanian dengan Total Anggaran sebesar ***Rp6.003.590.000,-***, yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Dirjen Lahan dan Irigasi (Dirjen LIP)

Program usulan (Aplikasi e-form) dibawah dirjen LIP, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh melalui Bidang Sarana dan Prasarana mengajukan kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) Non Rawa dengan mengusulkan lokasi berdasarkan data hasil CPCL melalui data spatial (polygon) dan data tabular dengan usulan lebih kurang 1.038 ha Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi anggaran sebesar ***Rp5.885.960.000,- (Tahap II seluas 788 ha dan Tahap III seluas 250 ha)*** yang meliputi kegiatan :

- a. Rehabilitasi/Pembangunan RJIT sebanyak 44 lokasi di masing-masing kelompok tani
- b. Pembangunan Irigasi Perpomaan sebanyak 2 lokasi kelompok tani

Pembangunan/Rehabilitasi dan Irigasi perpompaan ini berupa bapem dengan mekanisme pelaksanaan secara swakelola oleh kelompok tani. Secara teknis SID yang akan dituangkan dalam bentuk RUKK dikerjakan oleh Tim Pelaksana Universitas Andalas Padang yang selajutnya didampingi oleh konsultan pengawasan pada pelaksanaan pembangunan fisik dilapangan.

Sasaran bapem dari Kemeterian Pertanian ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan IP selain berupa bapem pembangunan fisik juga olah lahan dengan bantuan berupa biaya olah lahan sebesar Rp900.000,-/ha.

1. Dirjen Sarana dan Prasarana

Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian tahun 2025 difokuskan pada penguatan swasembada pangan, melalui modernisasi pertanian, serta penyaluran pupuk bersubsidi. Pada Tahun Anggaran 2025 Kota Payakumbuh mendapatkan anggaran sebesar **Rp117.630.000,-** dengan sasaran utama kegiatan berupa fasilitasi penyusunan pupuk bersubsidi melalui fasilitasi penyusunan e-RDKK dimasing-masing kelompok tani yang ada di Kota Payakumbuh disamping pendampingan dari tim verval kecamatan sampai tingkat kota berupa monev dan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung tercapainya swasembada pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita. Dengan total anggaran sebesar Rp6.003.590.000,- yang bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, seluruh kegiatan yang dilaksanakan — mulai dari Optimasi Lahan Non Rawa, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (RJIT), Pembangunan Irigasi Perpompaan, hingga fasilitasi penyusunan pupuk bersubsidi melalui e-RDKK diarahkan secara konsisten untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas pertanian di Kota Payakumbuh

3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Tabel III
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tuga Pembantuan

No	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kota	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan (%)	Ket
1	Permentan RI Nomor : 64/Permentan/RC.130/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker 08) Dirjen PSP	Payakumbuh	Pertanian	117,630,000	113,854,720	96.79%	100%	
		Program Dukungan Manajemen	Payakumbuh	Pertanian	25,000,000	23,402,000	99.61%	100%	
		ProgramProgram Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker 13) Dirjen LIP							
		Kegiatan : Pelindungan dan Penyediaan Lahan							

	Keluaran : Prasarana Pengembangan Kawasan[Base Line]	Payakumbuh	Pertanian	5,885,960,000	5,711,134,100	97.03%	100%	
	- <i>Optimasi Lahan</i>			106,376,000	106,376,000	100.00%	100%	
	- <i>Infrastruktur (Pembangunan Fisik)</i>			5,779,584,000	5,604,758,100	96.98%	100%	
	Pengawasan/Pendampingan 778 ha (Tahap II)			53,584,000	53,584,000	100.00%	100%	
	Pengawasan/Pendampingan 250 ha (Tahap III)			17,000,000	17,000,000	100.00%	100%	
	Konstruksi Oplah Non Rawa 778 ha (Tahap II)			3,624,800,000	3,624,800,000	100.00%	100%	
	Konstruksi Oplah Non Rawa 778 ha (Tahap III)			1,150,000,000	1,150,000,000	100.00%	100%	
	Olah Lahan (Tahap II dan III) dengan luas 1038 Ha			934,200,000	759,374,100	81.29%	100%	Akibat keterlambatan trasfer biaya olah lahan dari pusat ke kelompok tani pada bulan Desember yang mengakibatkan ada sebagian lahan pertanian yang sudah

									melewati masa tanam (TM IV), disamping adanya lahan sawah yang beralih fungsi ke tanaman hortikultura akibat musim kering yang berkepanjangan (musim kering lebih kurang 6 bulan) yang mengakibatkan sistim pengairan dan pola tanam petani terganggu
		TOTAL PAGU TUGAS PEMBANTUAN (Rp)			6,003,590,000				

4. Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Payakumbuh.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan Pendidikan membuat :

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah kabupaten/ kota meliputi:

- a. Pendidikan Dasar, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).
- b. Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
- c. Pendidikan anak usia dini dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

4.1.2 Target Pencapaian

Perhitungan pencapaian target SPM dihitung secara persentasi, yakni capaian 100% dari target yang telah ditetapkan. Adapun target pencapaian SPM pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					100.00 %	
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini					100.00 %	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	

2.	A. Jumlah yang harus dilayani :		5,167	4,284	883	82.091 %	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Angka partisipasi sekolah	%	5,167	5,167	0	100.00 %	
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	122	122	0	100.00 %	
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	322	322	0	100.00 %	
	4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	5	5	0	100.00 %	
	5. Kecukupan formasi guru ASN	%	78	78	0	100.00 %	
	6. Indeks distribusi guru	%	15	15	0	100.00 %	
	7. Proporsi PTK bersertifikat	%	142	142	0	100.00 %	
	8. Proporsi PTK penggerak	%	4	4	0	100.00 %	
	9. Pengalaman pelatihan guru	%	322	322	0	100.00 %	
	JUMLAH	5,984	5,984	5.984	0	100.00%	
	Pendidikan Dasar						100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	

A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		24,586	24,586	0	100.00 %	
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
SD						
1. Angka partisipasi kasar	%	100	107,39	0	100.00 %	
2. Angka partisipasi sekolah	%	99,97	99,97	0	100.00 %	
3. Angka partisipasi murni	%	95,70	95,70	0	100.00 %	
4. Kemampuan literasi	Nilai	84	84,68	0	100.00 %	
5. Kemampuan numerasi	Nilai	75	79,84	0	100.00 %	
6. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2,67	2,67	0	100.00 %	
7. Perbedaan Skor numerasi	Nilai	3	3	0	100.00 %	
8. Indeks iklim keamanan	Nilai	73	74,59	0	100.00 %	
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	2,19	2,19	0	100.00 %	
10. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	89	0	90.00 %	
11. Indeks distribusi guru	%	90	70	0	77.00 %	
12. Proporsi PTK bersertifikat	%	80	80	0	100.00 %	
13. Proporsi PTK penggerak	%	14	14	0	100.00 %	
14. Pengalaman pelatihan guru	%	660	660	0	100.00 %	
SMP						

	1. Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %	
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100.00 %	
	3. Angka partisipasi murni	%	90	90	0	100.00 %	
	4. Kemampuan literasi	Nilai	88	89,23	0	100.00 %	
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	85	85,56	0	100.00 %	
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	2,33	2,33	0	100.00 %	
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	3	0	100.00 %	
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	72	72,79	0	100.00 %	
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	2,24	2,24	0	100.00 %	
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	90	85	0	94.00 %	
	11. Indeks distribusi guru	%	90	85	0	100.00 %	
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	80	80	0	80.00 %	
	13. Proporsi PTK penggerak	%	14	14	0	100.00 %	
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	50	50	0	100.00 %	
	JUMLAH	4,098	4,098	0	2,800.00 %		
3 .	Pendidikan Kesetaraan			100.00 %			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. Jumlah yang harus dilayani :		2,325	1,395	930	100.00 %	
	Persentase Pencapaian Mutu		20.00 %				

Minimal Layanan Dasar (20%)						
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
1. Angka partisipasi kasar	%	80	80	0	100.00 %	
2. Angka partisipasi sekolah	%	70	70	0	100.00 %	
3. Angka partisipasi murni	%	65	60	0	100.00 %	
4. Kemampuan literasi	Nilai	1,74	1,74	0	100.00 %	
5. Kemampuan numerasi	Nilai	1,66	1,66	0	100.00 %	
6. Perbedaan skor literasi	Nilai	0,1	0,1	0	100.00 %	
7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,1	0,1	0	100.00 %	
8. Indeks iklim keamanan	Nilai	2	2	0	100.00 %	
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	1,8	1,8	0	100.00 %	
10. Kecukupan formasi guru ASN	%	80	30	0	100.00 %	
11. Indeks distribusi guru	%	5	5	0	100.00 %	
12. Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00 %	
13. Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100.00 %	
14. Pengalaman pelatihan guru	%	80	100	0	100.00 %	

4.1.3 Realisasi

Tabel 4.2
Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					100.00 %	
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini					100.00 %	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	C. Jumlah yang harus dilayani :		5,167	4,284	883	82.091 %	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %	
	D. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	10. Angka partisipasi sekolah	%	5,167	5,167	0	100.00 %	
	11. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	122	122	0	100.00 %	
	12. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	322	322	0	100.00 %	
	13. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	5	5	0	100.00 %	
	14. Kecukupan formasi guru ASN	%	78	78	0	100.00 %	

	15. Indeks distribusi guru	%	15	15	0	100.00 %	
	16. Proporsi PTK bersertifikat	%	142	142	0	100.00 %	
	17. Proporsi PTK penggerak	%	4	4	0	100.00 %	
	18. Pengalaman pelatihan guru	%	322	322	0	100.00 %	
	JUMLAH	5,984	5,984	5,984	0	100.00%	
2 .	Pendidikan Dasar					100.00 %	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	C. Jumlah Yang Harus Dilayani :		24,586	24,586	0	100.00 %	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %	
	D. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	SD						
	15. Angka partisipasi kasar	%	100	107,39	0	100.00 %	
	16. Angka partisipasi sekolah	%	99,97	99,97	0	100.00 %	
	17. Angka partisipasi murni	%	95,70	95,70	0	100.00 %	
	18. Kemampuan literasi	Nilai	84	84,68	0	100.00 %	
	19. Kemampuan numerasi	Nilai	75	79,84	0	100.00 %	
	20. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2,67	2,67	0	100.00 %	
	21. Perbedaan Skor numerasi	Nilai	3	3	0	100.00 %	
	22. Indeks iklim keamanan	Nilai	73	74,59	0	100.00 %	

23. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	2,19	2,19	0	100.00 %	
24. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	89	0	90,00 %	
25. Indeks distribusi guru	%	90	70	0	77.00 %	
26. Proporsi PTK bersertifikat	%	80	80	0	100.00 %	
27. Proporsi PTK penggerak	%	14	14	0	100.00 %	
28. Pengalaman pelatihan guru	%	660	660	0	100.00 %	
SMP						
15. Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %	
16. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100.00 %	
17. Angka partisipasi murni	%	90	90	0	100.00 %	
18. Kemampuan literasi	Nilai	88	89,23	0	100.00 %	
19. Kemampuan numerasi	Nilai	85	85,56	0	100.00 %	
20. Perbedaan skor literasi	Nilai	2,33	2,33	0	100.00 %	
21. Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	3	0	100.00 %	
22. Indeks iklim keamanan	Nilai	72	72,79	0	100.00 %	
23. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	2,24	2,24	0	100.00 %	
24. Kecukupan formasi guru ASN	%	90	85	0	94.00 %	
25. Indeks distribusi guru	%	90	85	0	100.00 %	
26. Proporsi PTK bersertifikat	%	80	80	0	80.00 %	
27. Proporsi PTK penggerak	%	14	14	0	100.00 %	

	28. Pengalaman pelatihan guru	%	50	50	0	100.00 %	
	JUMLAH	4,098	4,098	0	2,800.00 %		
3 .	Pendidikan Kesetaraan			100.00 %			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	C. Jumlah yang harus dilayani :		2,325	1,395	930	100.00 %	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		20.00 %				
	D. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	15. Angka partisipasi kasar	%	80	80	0	100.00 %	
	16. Angka partisipasi sekolah	%	70	70	0	100.00 %	
	17. Angka partisipasi murni	%	65	60	0	100.00 %	
	18. Kemampuan literasi	Nilai	1,74	1,74	0	100.00 %	
	19. Kemampuan numerasi	Nilai	1,66	1,66	0	100.00 %	
	20. Perbedaan skor literasi	Nilai	0,1	0,1	0	100.00 %	
	21. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,1	0,1	0	100.00 %	
	22. Indeks iklim keamanan	Nilai	2	2	0	100.00 %	
	23. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	1,8	1,8	0	100.00 %	

24. Kecukupan formasi guru ASN	%	80	30	0	100.00 %	
25. Indeks distribusi guru	%	5	5	0	100.00 %	
26. Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00 %	
27. Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100.00 %	
28. Pengalaman pelatihan guru	%	80	100	0	100.00 %	

4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah. Besaran anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Target	Realisasi	Capaian
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.895.464.645	46.381.968.683	94,86
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	23.100.041.863	21.794.994.522	94,35
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	125.449.300	122.335.825	97,52
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	133.694.140	129.249.930	96,68
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	428.089.032	419.372.000	97,96
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	111.064.890	102.544.317	92,33
6	Pengadaan Mebel Sekolah (DAK SD)	318.353.052	269.267.583	84,58
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	858.339.800	709.372.480	82,64

8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD	49.973.520	-	0,00
9	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	266.534.000	210.558.262	79,00
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	1.725.330.10 0	1.392.675.1 00	80,72
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	165.850.000	113.034.165	68,15
12	Peembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	62.524.000	45.962.997	73,51
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.312.500.0 00	15.241.618. 361	99,54
14	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	37.645.000	32.762.001	87,03
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	19.719.000	19.454.000	98,66
16	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	39.632.000	28.102.493	70,91
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	202.000.000	174.758.400	86,51
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200.000.000	200.000.000	100,00
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.044.531.05 3	1.031.268.1 29	98,73
1	Pembangunan Laboratorium	881.244.976	755.578.417	85,74
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	398.000.000	355.000.000	89,20
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	719.568.000	442.080.062	61,44
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	12.744.995.2 14	12.000.010. 713	94,15
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	522.604.214	516.743.748	98,88
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	183.000.000	169.800.000	92,79
7	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	245.231.600	208.540.298	85,04
8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	702.751.350	395.700.000	56,31

9	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	106.955.500	97.265.325	90,94
10	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	138.960.600	127.706.480	91,90
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.949.100.00 0	9.908.382.1 50	99,59
12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.065.800	10.105.238	71,84
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36.841.150	35.616.286	96,68
14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	169.800.000	148.018.660	87,17
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	675.685.000	382.132.528	56,55
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.442.276.81 0	8.176.535.3 62	96,85
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	180.559.400	171.209.598	94,82
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	110.413.000	101.591.085	92,01
2	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.945.711.10 0	2.836.626.3 08	96,30
3	Pengadaan Mebel PAUD	162.966.200	152.283.430	93,44
4	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD (DAK)	339.628.050	229.826.052	67,67
5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.920.800.00 0	2.914.511.1 65	99,78
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	41.441.800	40.782.562	98,41
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	200.000.000	200.000.000	100,00
8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	58.999.700	56.999.714	96,61
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.240.950	28.470.767	94,15

1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	40.770.000	39.192.990	96,13
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	550.812.610	546.774.055	99,27
3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	859.934.000	858.267.636	99,81
4	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal /Kesetaraan	4.608.150.758	4.410.428.086	95,71
5	Pengadaan Mebel Sekolah	27.000.000	23.400.000	86,67

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Jumlah personil jajaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pergolongan tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Dukungan Personil

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	II b	1
2	Sekretaris	III a	1
3	Kepala Bidang	III b	3
4	Kasubag	IV a	1
5	Kasi	IV a	7
6	Fungsional Penyetaraan	-	3
7	Staf	-	34
8	SKB Kota Payakumbuh		
	Kepala SKB		1
	Pamong Belajar		3
	Tata Usaha		3
9	TK Negeri		
	Kepala TK		4
	Guru TK		71
10	SD Negeri		
	Kepala SD	-	66

	Guru SD	-	536
11	SMP Negeri	-	
	Kepala SMP	-	10
	Guru SMP	-	260
	Tata Usaha		19
12	Penilik	-	2
12	Pengawas	-	9
	JUMLAH		1.036

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.5
Permasalahan dan Solusi Bidang Pendidikan

No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	-Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan Dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata	Ke depan pendataan harus berbasis kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara nasional
2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	- Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat. - belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah - belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi	- Perlu peningkatan koordinasi dengan kemenag untuk ketersediaan data yang valid dan akurat. - Perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan - Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, namun hanya sebatas jenjang SD dan SMP negeri dan swasta karena terbatasnya anggaran.

		Dapodik secara berkala	
3	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia	Penghitungan kebutuhan disesuaikan realisasi jumlah siswa yang ada sehingga terdapat selisih antara perencanaan dan realisasi
4	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	Belum ada SOP di Tingkat Kota tentang pelaksanaan penerapan SPM	Koordinatasi dengan Bagian Organisasi untuk penyusunan regulasi dan SOP penerapan SPM

4.2 Urusan Kesehatan

SPM bidang kesehatan akan meliputi jenis pelayanan dasar, mutu layanan dasar, penerima layanan dasar, dan pernyataan standar.

Adapun jenis indikatornya adalah sebagai berikut :

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi
- h. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita DM
- i. Pelayanan Kesehatan Pada Gangguan Jiwa Berat
- j. Pelayanan Kesehatan Orang TB
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

4.2.2 Target Pencapaian

Adapun Target pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Indikator/ Jenis Pelayanan Dasar	Target 2025		Target Nasional
		Satuan	Target	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	1.958	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang	1.878	100
3	Pelayanan kesehatan bayi lahir	Orang	1.860	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Orang	8.689	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	23568	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang	96525	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	17773	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Orang	14.129	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabet Melitus	Orang	1.994	100

10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang	339	100
11	Pelayanan orang dengan TB	Orang	3.407	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang	3.179	100

4.2.3 Realisasi

Tabel 4.7
Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan
Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Pencapaian			Target Nasional
		Sasaran	Jumlah	%	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.958	1966	100	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.878	1.904	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi lahir	1.860	1.867	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	8.689	8.508	98	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	23568	23.574	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	96525	96.559	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	17773	18.134	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	14.129	14.110	99	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabet Melitus	1.994	2.104	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	339	345	100	100
11	Pelayanan orang dengan TB	3.407	3.609	100	100

12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	3.179	2.429	76	100
----	--	-------	-------	----	-----

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan semuanya sudah mencapai target

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian SPM pada Tahun 2024 tersebar pada beberapa program dan kegiatan :

Tabel 4.8
Anggaran SPM Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	458.411.150	441.221574	96,25
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin			
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	193.111.000	158.074.472	81,86
4	Pelayanan kesehatan Balita	52.024.300	50.753.325	97,56
5	Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	265.971.400	244.750.457	92,02
6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	30.813.700	30.625.857	99,39
7	Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	89.684.550	83.339.819	92,93
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	21.279.300	20.801.057	97,75
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	21.139.650	20.639.334	97.63
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	79.280.000	78.476.220	98,99
11	Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	390.292.350	372.260.290	95,38

12	Pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	102.439.900	85.092.296	83,07
JUMLAH		1.704.447.300	1.586.034.700	93,05

4.1.5 Dukungan Personil

Tabel 4.9
Dukungan Personil Dalam Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator	Dukungan Personil	
		PNS	NON PNS
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-Dokter umum/ Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi : 24 -Bidan : 102 -Perawat :57 -Tenaga Farmasi : 15 -Tenaga Gizi :12	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-Dokter umum/ Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi : 24 -Bidan : 102 -Perawat :57 -Tenaga Farmasi : 15 -Tenaga Gizi :12	
	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	-Dokter umum /Dokter Spesialis Anak : 24 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Tenaga Farmasi : 15 -Tenaga Gizi :12 -Tenaga Promkes dan Ilmu Prilaku : 8	

No	Indikator	Dukungan Personil	
		PNS	NON PNS
	Pelayanan Kesehatan Balita	-Dokter : 21 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Ahli Gizi : 12	-Guru PAUD : 36 -kader Kesehatan : 825
2	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	-Dokter/ Dokter Gigi : 31 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Ahli Gizi : 12 -Tenaga Kesmas : 8 -Tenaga Farmasi : 15	-Kader Kesehatan : 78
3	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	-Dokter: 21 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Ahli Gizi : 12 -Tenaga Kesmas : 8 -Tenaga Promkes : 8 -Tenaga Farmasi : 15	-Kader Kesehatan : 78
4	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-Dokter: 24 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Ahli Gizi : 12 -Tenaga Kesmas : 8 -Tenaga Promkes : 8 -Tenaga Farmasi : 15	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita hipertensi	-Dokter: 21 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Ahli Gizi : 12 -Tenaga Kesmas : 8 -Tenaga Promkes : 8 -Tenaga Farmasi : 15	
6	Pelayanan Kesehatan pada penderita DM	-Dokter: 21 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Ahli Gizi : 12 -Tenaga Kesmas : 8 -Tenaga Promkes : 8 -Tenaga Farmasi : 15	

No	Indikator	Dukungan Personil	
		PNS	NON PNS
		-Tenaga ATLM : 13	
7	Pelayanan Kesehatan pada Gangguan Jiwa Berat	-Dokter: 26 -Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan wewenang di bidang kejiwaan : 8 -Tenaga Lain yang terlatih : 8 -Tenaga Profesional lainnya : 1	
8	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	-Dokter umum/dokter spesialis Penyakit - Dalam/ Dokter Spesialis Paru : 25 -Perawat : 57 -ATLM :13 -Penata Rontgen : 4 -Tenaga Kesmas : 8 -Tenaga Farmasi 15	-Kader Kesehatan : 78
9	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Dokter umum/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin : 25 -Bidan :102 -Perawat : 57 -ATLM :13 -Tenaga Kesmas : 8	- Tenaga nn kesehatan yang terlatih : 8

4.10 Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hambatan	Solusi
1	Pelayanan kesehatan balita	Kurangnya Pemahaman & Motivasi: Orang tua tidak mengerti manfaat imunisasi atau merasa tidak perlu Hal ini berpengaruh terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan Balita	Melaksanakan sosialisasi terhadap manfaat imunisasi bagi kesehatan Balita
2	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rendahnya Kepatuhan Kunjungan: Banyak penderita hipertensi tidak rutin memeriksakan diri ke Puskesmas atau Posbindu, seringkali hanya datang saat merasa sakit parah.	

4.3 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Kota Payakumbuh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.

4.3.2 Target Pencapaian

Target Pencapaian Pemenuhan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.11
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan
Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian		
		Satuan	Target	Tahun
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Rumah Tangga	34.976	2025

4.3.3 Realisasi

Hasil capaian, indikator pencapaian dan total pencapaian SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian			Capaian
		Satuan	Target	Realisasi	
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Rumah Tangga	34.967	34.967	100 %

4.3.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum (Penyediaan
Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari)

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Target	Realisasi	Capaian
	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota			
1	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	217.787.500	216,570,505	99.44

4.3.5 Dukungan Personil

4.13

Dukungan Personil Dinas PUPR Kota Payakumbuh Kondisi Desember 2025

No	Golongan	Esselon			Non Esselon	Jumlah
		II	III	IV	Staf	
1	Golongan IV	1	5		1	7
2	Golongan III		1	1	42	44
3	Golongan II				6	6
4	Golongan I				1	1
5	PPPK					12
6	Tenaga jasa Pelayanan Umum					62
7	Pekerja Kontrak Outsourcing					2
JUMLAH						134

4.3.6

Tabel 4.14

Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi Permasalahan
1	Permasalahan Perhitungan Kebutuhan 1. Kurang nya kualitas, jumlah serta ketersediaan ASN. 2. Masih kurangnya kualitas transfer pengetahuan, yang menyebabkan kewalahan saat terjadi pergeseran atau pergantian personil.	Perlunya Meningkatkan kapasitas pengawas lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, tidak hanya pada kualitas, tetapi juga pada jumlah dan ketersediaannya.

2	Permasalahan Pelaksanaan 1. Tingginya tingkat kebocoran air air yang penyebab utamanya disebabkan oleh umur sebagiann besar pipa distribusi sudah berumur diatas 30 tahun. 2. Kota payakumbuh adalah kota dengan kepadatan tingkat sedang, dan tingginya aktifitas harian di kota payakumbuh sehingga menyebabkan Tingginya kebutuhan terhadap air, sehingga debit air baku yang ada masih kurang untuk melayani smua wilayah.	1. perlu adanya pengganti pipa distribusi/ rekonstuksi 2. perlu ada penambahan sumber air baru 3. perlu dilakukan zonasi layanan
---	---	--

4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

a. Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam:

- 1) Rehabilitasi rumah;
- 2) Pembangunan kembali rumah;
- 3) Relokasi rumah;
- 4) Bantuan sewa rumah.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota/kabupaten:

- 1) Fasilitasi Ganti aset;
- 2) Subsidi uang sewa;
- 3) Penyediaan rumah layak huni.

4.4.2 Target Pencapaian

Tabel 4.15
Rencana dan Target Pencapaian SPM Bencana

No	Tahun	Kec/Kel	Jumlah Target Rumah Tangga Terlayani			
			Rehabilitasi Rumah	Pembangunan Kembali	Relokasi Rumah	Bantuan Sewa Rumah
1	2025	Kota Payakumbuh	10 %	-	-	-

Sumber: Dokumen Anggaran Dinas PKP

Tabel 4.16
Rencana dan Target Pencapaian SPM Relokasi

No	Tahun	Kec/Kel	Jumlah Target Rumah Tangga Terlayani		
			Fasilitasi Ganti Aset	Subsidi Uang Sewa	Penyediaan RLH
1	2025	Kota Payakumbuh	Tidak Ada Program Pemerintah Kota yang mengakibatkan rumah terkena relokasi		

Sumber: Dokumen Anggaran Dinas PKP

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.17
Hasil Capaian SPM Bencana Tahun 2025

No	Jenis Layanan	Target (RT)	Realisasi (RT)
1	Rehabilitasi Rumah	-	-
2	Pembangunan Kembali	-	-
3	Relokasi Rumah	-	-
4	Bantuan Sewa Rumah	-	-

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Hasil capaian indikator SPM Bencana tahun 2025 adalah 0 %.

Walaupun tidak ada kejadian bencana yang dikeluarkan berdasarkan surat penetapan bencana dari pemerintah, capaian SPM bidang perumahan tetap 100% karena dipenuhinya data form lampiran dari Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 4.18
Hasil Capaian SPM Relokasi Tahun 2025

No	Jenis Layanan	Target (RT)	Realisasi (RT)
1	Fasilitas Ganti Aset	Tidak Ada Program Pemerintah Kota yang mengakibatkan rumah terkena relokasi	
2	Subsidi Uang Sewa		
3	Penyediaan Rumah Layak Huni		

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

Hasil capaian indikator SPM relokasi dikategorikan **Not Available (NA)** karena program pemerintah yang mengakibatkan terjadinya relokasi tidak ada.

4.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan

Standar Pelayanan minimal Satpol PP dan Damkar mempunyai dua jenis pelayanan dasar meliputi:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;

4.19 Target Pencapaian SPM Urusan Trantibum

No	Jenis Peayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	target	Tahun	Indikator	Target	Tahun
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten/ Kota	80%	2025	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	145	2025
					Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	32	2025
					Standar operasional prosedur satpol pp	345	2025
					standar sarana prasarana satpol pp	12	2025
					Standar peningkatan kapasitas anggota satpol pp dan anggota perlindungan satlinmas	5	2025
					Standar pelayanan yang	1	2025

					terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada		
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%	2024	Tingkat waktu tanggap response time 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba lokasi	100%	2025
					Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	2025
					Sarana prasara pemadam kebakaran dan penyelamatan dan evakuasi	54	2025
					Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ sumber daya manusia	48	2025
	Jumlah						

4.5.4 Alokasi Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kota Payakumbuh Tahun 2025:

Tabel 4.20

Alokasi Anggaran Urusan Trantibumlinmas

No	Uraian Program dan Kegiatan		Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian
A		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,202,004,266	4,149,330,160	98.75 %
	I	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,437,146,866	3,403,433,063	99.02 %
	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3,327,680,516.00	3,295,195,924.00	99.02 %
	2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa HAM	38,312,450.00	37,789,249.00	98.63 %

	3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	71,153,900.00	70,447,890.00	99.01 %
	II	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	764,857,400	745,897,097	97.52 %
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	13,472,500.00	12,814,665.00	95.12 %
	2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	751,384,900.00	733,082,432.00	97.56 %
B		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,794,203,806	1,698,482,024	94.66 %
	I	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,665,699,606	1,574,243,155	94.51 %
	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,041,800.00	19,785,773.00	98.72 %
	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,238,917,656.00	1,216,811,337.00	98.22 %

	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	406,740,150.00	337,646,045.00	83.01 %
	II	Investigasi Kejadian Kebakaran	6,494,450	6,275,601	96.63 %
	1	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	6,494,450.00	6,275,601.00	96.63 %
	II	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	61,874,750	60,100,294	97.13 %
	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	61,874,750.00	60,100,294.00	97.13 %
	I	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	60,135,000	57,862,974	96.22 %
	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	60,135,000.00	57,862,974.00	96.22 %

4.5.5 Dukungan Personil

Tabel 4.21
Dukungan Personil Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh
Kondisi Desember 2025

No	Golongan	Esselon			Non Esselon	Jumlah
		II	III	IV	Staf	
1	Golongan IV	1	2	-	-	3
2	Golongan III	-	1	9	9	18
3	Golongan II	-	-	-	19	19
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	PPPK	-	-	-	29	29
6	Sopir esselon	-	-	-	-	-
7	Tenaga kebersihan	-	-	-	-	2
8	Tenaga Pemadam kebakaran	-	-	-	-	21
9	Banpol PP	-	-	-	-	97
10	Tenaga Sopir	-	-	-	4	4
Total						192

4.22

Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi Permasalahan
	Peralatan perlengkapan personil dalam operasional pemadaman yang masih belum bisa mengcover seluruh personil.	Diharapkan kedepannya peralatan operasional khususnya mobil bisa ditambah dengan yang baru.
	Belum semua aparat petugas operasional yang memiliki bekal pelatihan dasar pemadam kebakaran, namun hal tersebut bisa ditutupi dengan tingginya pengalaman dilapangan.	Melakukan Diksar bagi personil Pol PP bagi personil yang belum mengikutinya dengan menganggarkan biaya untuk tahun berikutnya.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

4.23 Target Pencapaian

No	Jenis Layanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (jumlah total yang harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	656	2025	Dinas Sosial
	1	Layanan data dan pengaduan		2	2025	Dinas Sosial
	2	Penyediaan layanan kedaruratan /		1	2025	Dinas Sosial

		layanan reaksi cepat				
	3	Penyediaan permakanan		656	2025	Dinas Sosial
	4	Penyediaan sandang		79	2025	Dinas Sosial
	5	Penyediaan alat bantu		19	2025	Dinas Sosial
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	2025	Dinas Sosial
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		60	2025	Dinas Sosial
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar		1	2025	Dinas Sosial
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	2025	Dinas Sosial
	10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		553	2025	Dinas Sosial
	11	Pemberian pelayanan		1	2025	Dinas Sosial

		penelusuran keluarga				
	1 2	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	2025	Dinas Sosial
	1 3	Layanan rujukan		1	2025	Dinas Sosial
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	34	2024	2025
	1	Layanan data dan pengaduan		1	2025	Dinas Sosial
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat		1	2025	Dinas Sosial
	3	Penyediaan permakanan		5	2025	Dinas Sosial
	4	Penyediaan sandang		34	2025	Dinas Sosial
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	2025	Dinas Sosial
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1	2025	Dinas Sosial
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar		1	2025	Dinas Sosial
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda		1	2025	Dinas Sosial

		Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan				
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		15	2025	Dinas Sosial
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	2025	Dinas Sosial
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	2025	Dinas Sosial
	12	Layanan rujukan		1	2025	Dinas Sosial
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	329	2025	2025
	1	Layanan data dan pengaduan		2	2025	Dinas Sosial
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		2	2025	Dinas Sosial
	3	Penyediaan permakanan		329	2025	Dinas Sosial
	4	Penyediaan sandang		2	2025	Dinas Sosial

	5	Penyediaan alat bantu		18	2025	Dinas Sosial
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	2025	Dinas Sosial
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1	2025	Dinas Sosial
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar		1	2025	Dinas Sosial
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	2025	Dinas Sosial
	10	Akses ke layanan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan kesehatan		1	2025	Dinas Sosial
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	2025	Dinas Sosial
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	2025	Dinas Sosial
	13	Layanan rujukan		1	2025	Dinas Sosial

4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	14	2025	2025
	1	Layanan data dan pengaduan		1	2025	Dinas Sosial
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat		6	2025	Dinas Sosial
	3	Penyediaan permakanan		14	2025	Dinas Sosial
	4	Penyediaan sandang		1	2025	Dinas Sosial
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	2025	Dinas Sosial
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1	2025	Dinas Sosial
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis		1	2025	Dinas Sosial
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti		1	2025	Dinas Sosial

		dokumen kependudukan				
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		7	2025	Dinas Sosial
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		6	2025	Dinas Sosial
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		6	2025	Dinas Sosial
	12	Layanan rujukan		1	2025	Dinas Sosial
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	25	2025	2025
	1	Penyediaan permakanan		25	2025	Dinas Sosial
	2	Penyediaan sandang		8	2025	Dinas Sosial
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		5	2025	Dinas Sosial
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan		1	2025	Dinas Sosial

	5	Pelayanan dukungan Psikososial		25	2025	Dinas Sosial
	6	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)		0	2025	Dinas Sosial

4.6.3 Realisasi

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah 100 % dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (jumlah total yang harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang Terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	Persentase (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	656	656	0	100

	1	Layanan data dan pengaduan		2	2	0	100
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		1	1	0	100
	3	Penyediaan permakanan		656	341	315	51,98
	4	Penyediaan sandang		79	79	0	100
	5	Penyediaan alat bantu		19	19	0	100
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	1	0	100
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		60	58	2	96,67
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar		1	1	0	100
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	1	0	100

	10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan		553	553	0	100
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	100
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	1	0	100
	13	Layanan Rujukan		1	1	0	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	34	34	0	100
	1	Layanan data dan pengaduan		1	1	0	100
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat		1	1	0	100
	3	Penyediaan permakanan		5	5	0	100
	4	Penyediaan sandang		34	34	0	100
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	1	0	100

	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1	1	0	100
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar		1	1	0	100
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	1	0	100
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		15	15	0	100
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	100
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	1	0	100
	12	Layanan rujukan		1	1	0	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia		Jumlah Warga Negara lanjut usia	329	329	0	100

	Terlantar di Luar Panti Sosial		terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				
	1	Layanan data dan pengaduan		2	2	0	100
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		2	2	0	100
	3	Penyediaan permakanan		329	329	0	100
	4	Penyediaan sandang		2	2	0	100
	5	Penyediaan alat bantu		18	18	0	100
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	1	0	100
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1	1	0	100
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar		1	1	0	100
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran,		1	1	0	100

		Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan					
	10	Akses ke layanan kesehatan dasar/ fasilitas layanan kesehatan		1	1	0	100
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	100
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	1	0	100
	13	Layanan rujukan		1	1	0	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	14	14	0	100
	1	Layanan data dan pengaduan		1	1	0	100
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat		6	6	0	100
	3	Penyediaan permakanan		14	14	0	100
	4	Penyediaan sandang		1	1	0	100

	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	1	0	100
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1	1	0	100
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis		1	1	0	100
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	1	0	100
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		7	7	0	100
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		6	6	0	100
	11	Pemberian pelayanan		6	6	0	100

		reunifikasi keluarga					
	12	Layanan rujukan		1	1	0	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/ Kota	25	25	0	100
	1	Penyediaan permakanan		25	25	0	100
	2	Penyediaan sandang		8	8	0	100
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		5	5	0	100
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan		1	1	0	100
	5	Pelayanan dukungan Psikososial		25	25	0	100
	6	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur		0	0	0	100

		program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)					
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Payakumbuh (%)							100

4.6.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.24
Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Urusan Sosial Kota Payakumbuh

No	Jenis belanja	Anggaran
1	APBD	Rp 1.354.780.700
2	APBN	Rp 30.591.095.000
	- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/ Program Sembako	Rp 16.488.000.000
	- PKH (Program Keluarga Harapan)	Rp 14.103.095.000
JUMLAH		Rp 31.945.875.700

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2023, didukung oleh Program dan Kegiatan yang terdapat pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

A. URUSAN PENDIDIKAN

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan sebagai berikut:

- I. Program Program Pengelolaan Pendidikan
 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa
 - b. Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP
 - b. Penyediaan Biaya Personil siswa SMP
 - c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
 - b. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD
 - c. Pengelolaan Dana BOP PAUD
 4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - a. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - b. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan
 5. Pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Non Formal
 6. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b. Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 7. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b. Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

8. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b. Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan
 - a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b. Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
- II. Program Pengelolaan Pendidikan
 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. Penambahan Ruang Kelas Baru
 - b. Pembangunan ruang UKS
 - c. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - d. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas
 - e. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala SekolahTU
 - f. Rehabilitasi sedang/berat sarana/prasarana dan Utilitas sekolah
 - g. Pengadaan mebel sekolah
 - h. Pembangunan Laboratorium
 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - b. Pembangunan Laboratorium
 - c. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas
 - d. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru
 - e. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
 - f. Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium
 - g. Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - h. Pengadaan mebel sekolah
 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD

- b. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD
- c. Rehabilitasi sedang/berat/Gedung Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- d. Rehabilitasi Sedang/Berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD
- e. Pengadaan mebel PAUD (siswa PAUD)
- 4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - a. Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah Non Formal/Kesetaraan
 - b. Rehabilitasi Sedang/Berat sarana prasarana dan utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan
 - c. Pengadaan mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

B. URUSAN KESEHATAN

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
 - g. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
 - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
 - i. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

- j. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- k. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

- 2. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP ke wewenang daerah kabupaten/kota
 - a. Pengadaan obat, vaksin
 - b. Pengadaan bahan habis pakai

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh pada tahun 2024 sebagai berikut:

- I. Program Persentase Pelayanan Air Minum sebesar 100% (Seratus Persen),

- 1. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan

Dengan menghitung indikator-indikator sebagai berikut :

Capaian program	:	Persentase rumah tangga terlayani air minum perpipaan dengan target 91 %
Keluaran	:	Kapasitas Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun dengan target 194,10 liter/detik
Indikator kegiatan	sub :	- Jumlah sambungan Rumah Terpasang dengan target 29.110 SR - Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih sebesar 91%

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut:

I. Pengembangan Perumahan

1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten kota
 - a. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - b. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani
 - c. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - d. Pendataan dan Verifikasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - e. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
 - f. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
 - b. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan
 - c. Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Layanan
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- a. Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satpol PP dan BPBD sebagai berikut:

- I. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pencegahan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan pengawalan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - c. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - b. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengadaan sarana dan prasana pencegah penanggulangan kebakaran dan Alat Perlindungan Diri
2. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran
 - a. Sub Kegiatan Investigasi Kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
4. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/ atau Mengancam Keselamatan Manusia

F. URUSAN SOSIAL

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Sosial sebagai berikut:

- I. Program Rehabilitasi Sosial
 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Alat Bantu

- d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- f. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis dan masyarakat
- g. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

II. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

III. Program Penanganan Bencana

- 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Makanan
 - b. Penyediaan Sandang

BAB V

P E N U T U P

Memperhatikan gambaran kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, baik penyelenggaraan urusan wajib ataupun penyelenggaraan urusan pilihan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan telah berjalan dengan baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari totalitas dukungan yang diberikan semua pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh mengucapkan terima kasih.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri, dengan keterbatasan sumber daya pembangunan kota yang dimiliki, belum seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh bersama-sama dengan segenap komponen pembangunan kota harus terus bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mewujudkan harapan-harapan dan kebutuhan yang lebih besar tersebut pada masa yang akan datang, sehingga tercipta masyarakat dan Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, dan bermartabat, dengan semangat kebersamaan menuju Payakumbuh menang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 ini kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan bahan *progress report* dan informasi pembangunan Kota Payakumbuh selama tahun anggaran 2025.



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH INSPEKTORAT

Jalan Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
Email: inspektoratpyk@gmail.com

Pernyataan Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 sesuai Pedoman Umum Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2025. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Payakumbuh, 30 Maret 2026
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH



Dr. SYAHRI S.H., M.H., CGCAE.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700405 199703 1 004